



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DISERTASI

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor (Dr.) Program Studi
Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

AMAT BUDIMAN

NIM. 31694104637

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442/2021



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : Amat Budiman
Nomor Induk Mahasiswa : 31694104637
Jelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA
Penguji I/Ketua

Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag
Penguji III

Dr. Hj. Helmiati, M. Ag
Penguji IV

Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S. Ag., M. Ag
Penguji V

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
Penguji VI/Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
Penguji VII/Co- Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 11 Februari 2021



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR TERTUTUP DISERTASI

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disertasi yang berjudul “Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau”, yang ditulis oleh Sdr. Amat Budiman, Nim 31694104637 Program Studi Pendidikan Agama Islam telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji seminar ujian tertutup disertasi pada tanggal 1 Desember 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Uji Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI:

1. Prof. Dr. Afrizal M, MA.
Penguji I/Ketua.

2. Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.
Penguji II /Sekretaris.

3. Prof. Dr. Sunhaji, M.Ag.
Penguji III.

4. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
Penguji IV.

5. Prof. Dr.H. Munzir Hitami, MA.
Penguji V/Promotor.

6. Dr. Zamsiswaya, M.Ag.
Penguji VI /Co-Promotor).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI

Disertasi yang berjudul “ Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau “, yang ditulis oleh Sdr. Amat Budiman Nim 31694104637 Program Studi Pendidikan Agama Islam telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji seminar hasil disertasi pada tanggal 22 Oktober 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam siding Uji Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI:

Dr. H. Abu Anwar,M.Ag
(Reviewer I / Ketua)

.....
Tanggal .

Dr. Abu Bakar, M.Pd
(Reviewer II/Sekretaris)

.....
Tanggal.

Dr. Hj. Helmiati.M.Ag
(Reviewer III)

.....
Tanggal .

Prof. Dr.H. Munzir Hitami,MA
(Reviewer IV/Promotor)

.....
Tanggal.

Dr. Zamsiswaya,M.Ag.
(Reviewer V/Co-Promotor)

.....
Tanggal .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul “ Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau ” yang ditulis oleh:

Nama : Amat Budiman
 NIM : 31694104637
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam ujian Seminar Hasil Disertasi pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor

Prof. Dr.H. Munzir Hitami, MA.
 NIP. 19540422 198603 1 002.

Cb. Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag.
 NIP. 19700121 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. H. Abu Anwar, M. Ag
 NIP. 1967 08171994021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. H. Munzir Hitami., MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Amat Budiman

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Amat Budiman
NIM	: 3169410637
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Seminar Hasil Disertasi Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Pekanbaru, September 2020
Promotor

Prof. Dr. H. Munzir Hitami., MA
NIP. 19540422 198603 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zamsiswaya, M.Ag.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Amat Budiman

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Amat Budiman
NIM'	: 31694104637
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi	: Pendidikan Agama Islam
Judul	: Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Anti korupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Seminar Hasil Disertasi Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Pekanbaru, September 2020
Co. Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag.
NIP. 19700121 199703 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Amat Budiman
NIM : 31694104637
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: “ **Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau** ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, September 2020

Yang menyatakan,



Amat Budiman
 31694104637



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur khadirat Allah SWT, atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahNya serta ikmat iman dan kecerdasan yang telah diberikan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul: **“Pengembangan Peengembangan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau”**. Disertasi ini sengaja dibuat untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berperan dalam proses penyelesaian studi di Program Pascasarjana ini. Mereka itu antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr.Suyitno, M.Ag., Plt. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Afrizal, M.MA., Direktru Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Dr. Abu Anwar., M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau. Atas asuhan dan kepemimpinan mereka, baik selama saya menjalani masa-masa perkuliahan maupun andilnya dalam keberhasilan studi saya.
2. Penghargaan tertinggi kepada yang mulia Prof. Dr. H. Munzir Hitami., MA., sebagai promotor dan Dr. Zamsiswaya, M.Ag. sebagai Co. Promotor saya yang dengan ikhlas, kesabaran dan ketelitiannya menunjukkan serta mengarahkan penulisan disertasi saya ini, sehingga berhasil dan selesai ditulis. Dan ilmu yang sangat membekas yang beliau berikan dan pengajaran akhlak aktual yang beliau perlihatkan kepada saya.
3. Para dosen dan semua staf Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah menyampaikan ilmu dengan tulus ikhlas kepada saya. Juga semua staf di bagian akademik yang telah memberikan pelayanan administrasinya dengan baik.
4. H. Joni Irwan, SH.,MH., Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BPSDM) Provinsi Riau beserta Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan staf, yang telah membantu dalam penelitian dan pengembangan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi.

5. Para Widyaiswara Ahli utama, Widyaiswara Ahli Madya, Widyaiswara Ahli Muda dan Widyaiswara Ahli Muda, dan lain-lain yang telah membantu dalam pengisian kuisner dalam mendukung penelitian ini.
6. Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau, perpustakaan Pascasarjana UIN Suska Riau di Sukajadi, yang telah andil besar dalam menyediakan rujukan-rujukan khususnya tentang kurikulum, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan disertasi ini.
7. Para ulama, cendekiawan dan ilmuwan yang tulisannya dijadikan rujukan oleh saya dalam penulisan disertasi ini.

Untuk para sahabat yang ada di Program Pascasarjana UIN Suska Riau, dalam saat-saat kuliah yang penuh kenangan, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dalam lembar pengantar ini, saya hanya dapat berdo'a semoga amal shaleh mereka di terima sebagai amal akherat yang kekal abadi. Amin.

Disertasi ini secara khusus saya dedikasikan kepada Ayahanda tersayang (alm. Haji Kholifah Jamil), Ibunda tercinta (Almarhumah Hj. Rokiah), isteri tercinta (Hj. Endah Tursilowati, S.Psi. Anak-anak yang tercinta Rizki Permata Fitri, SE. Miftahul Ngilmatul Faiqoh, Ahmad Afiq Arridho dan Muhammad Rajab Khadafi), yang dengan segala ketulusan serta kelonggaran kalbunya memberi motivasi, do'a dan rasa cinta kasih sejati kepada saya. Inilah salah satu sumber energi saya yang tak pernah habis dan kering serta selalu menunjukkan untuk melakukan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberikan *hidayah* dan *ma'unah*-Nya, perjuangan sungguh-sungguh mereka, meskipun harus hidup tertatih-tatih di tengah kesulitan dan penderitaan yang besar di dunia ini. Amin.

Pekanbaru, Desember 2020
Penyusun,

ttd

Amat Budiman

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Nota Dinas Promotor/Co Promotor

Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi

Surat Pernyataan.

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Abstract :	
Bahasa Indonesia.....	xii
Bahasa Inggris	xiii
Bahasa Arab	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	14
1. Identifikasi Masalah	14
2. Batasan Masalah	14
3. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	16



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori	19
1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi.....	19
Antikorupsi	19
a) Kurikulum	19
1) Pengertian	19
2) Tinjauan dan Fungsi Kurikulum	24
3) Organisasi Kurikulum	25
4) Landasan Penyusunan Kurikulum	32
2. Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi.....	39
1) Model Administratif Smith, Stanley, Shores	43
2) Model <i>Grass Roots</i> Smith, Stanley, Shores.....	46
3) Model Demonstrasi Smith, Stanley, Shores.....	49
4) Model Beauchamp	52
5) Taba's Inverted Model	56
6) Model Tyler	63
7) Rogers Model of Interpersonal Relation	66
3. Konsep Korupsi	76
a) Pengertian	76
b) Klasifikasi	81
c) Dasar Yuridis	85
d) Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	98
e) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	103
4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	140
a) Pengertian Lembaga Pendidikan	140
b) Pengertian Pelatihan	149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pengertian Pendidikan Dan Pelatihan	154
d) Tujuan Pendidikan Dan Pelatihan	155
e) Tolok Ukur (Indikator) Pendidikan dan Pelatihan.....	161
b. PenelitianTerdahulu	166

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	178
B. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Pengembangan	179
C. Informen Penelitian	183
D. Sumber Data Penelitian	184
1. Data Prime.....	184
2. Data Sekunder.....	184
E. Teknik Pengumpulan Data	184
F. Teknik Analisa Data	185

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian	187
1. Pengertian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau	187
2. Visi Kepala Daerah dan Misi Badan Pengem- bangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau	189
3. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau	193
B. Temuan Khusus Penelitian	229
1. Bentuk Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Yang digunakan selama ini	230
1. Penelitian Awal dan Pengumpulan informasi	230
2. Melakukan Perencanaan Penelitian	242
2. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada BPSDM Provinsi Riau.....	244
3. Mengembangkan desain Model Awal (tahap 1).....	242
4. Melakukan Uji Coba Pengembangan Model Awal..	251
5. Melakukan Revisi Terhadap Desain Awal (Model Tahap 2).....	253
6. Melakukan Uji Coba Model Tahap ke 2.....	264
7. Revisi Model Tahap ke 2 (model Tahap 3).....	264
8. Melakukan Uji Coba Model Tahap 3.....	277
9. Finalisasi Desain Pengembangan Model	277
3. Keefektifan Modul Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi Yang telah dikembangkan Pada BPSDM Prov Riau	278
10. Disseminasi dan Implementasi	289

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	290
B. Saran	291

DAFTAR KEPUSTAKAAN

INSTRUMEN PENELITIAN

TOEFL

TOAFL

SURAT RISET

BIODATA PENULIS.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel IV.1	Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan/Eselon Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau	205
Tabel IV.2	Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau berdasarkan Kepangkatan.....	206
Tabel IV.3	Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	206
Tabel IV. 4	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pelatihan Penjenjangan.	207
Tabel IV. 5	Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenis kelamin pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.....	208
Tabel IV. 6	Tenaga Pelatihan dan Jenis Sertifikat yang dimiliki pengelola Kediklatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.	209
Tabel IV.7	Tenaga Pendukung/Non PNS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.	210
Tabel IV. 8	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau	221
Tabel IV. 9	Kurikulum Pendidikan Antikorupsi yang digunakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau	232
Tabel IV.10.	Mata Pelatihan Orientasi kurikulum Pendidikan Antikorupsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau	239



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

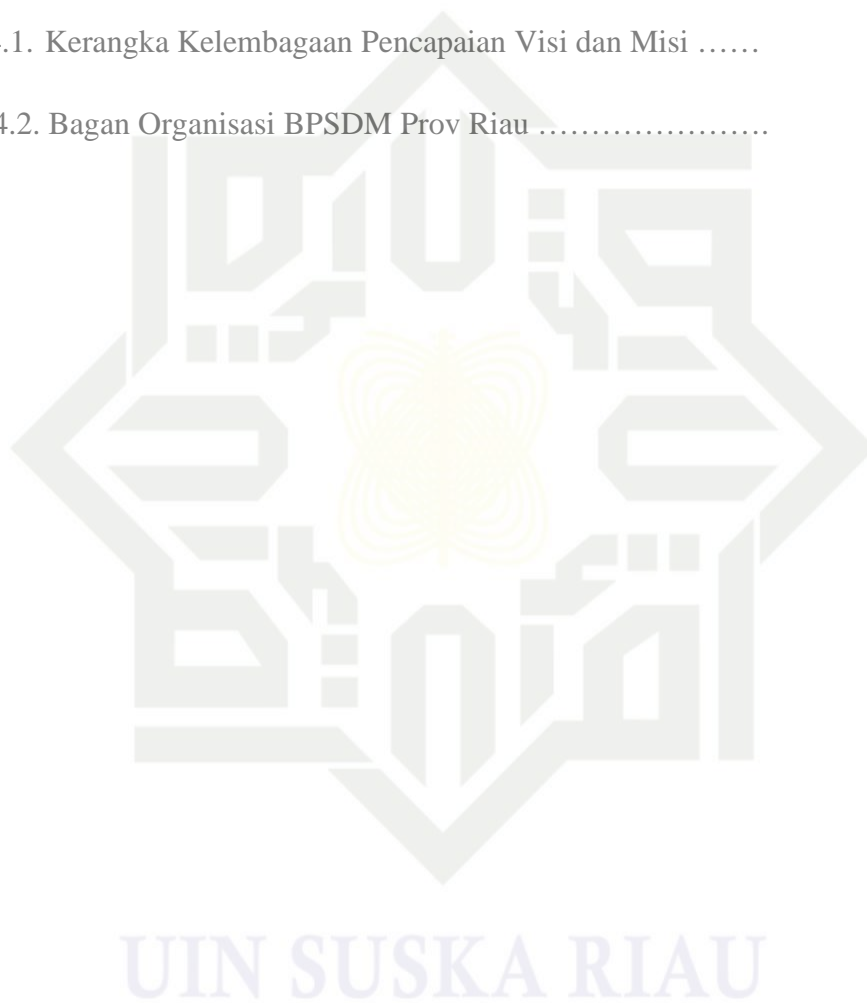
Tabel IV.11. Desain Pengembangan Model Awal Pendidikan Antikorupsi (Prototype awal) yang digunakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau	245
Tabel IV.12. Pengembangan Model Tahap ke 2 Disain Kurikulum Pendidikan Antikorupsi (prototype Lanjutan) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.....	255
Tabel IV.13. Pengembangan Model Tahap ke 3 Disain Kurikulum Pendidikan Antikorupsi (Prototype Tahap 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.	266
Tabel IV.14. Finalisasi Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi (Prototype 4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.	281

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Prosedur Penelitian	179
Gambar 4.1. Kerangka Kelembagaan Pencapaian Visi dan Misi	191
Gambar 4.2. Bagan Organisasi BPSDM Prov Riau	203





ABSTRAK

Amat Budiman (2020) : Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

Saat ini kehidupan berbangsa seringkali dihadapkan dengan berbagai problematika, antara lain yang sangat krusial tindak pidana korupsi. Beberapa hasil survey lembaga transparansi mengindikasikan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, diantara negara-negara lainnya, berada di posisi keenam terkorup di dunia menurut survey Transparency International (TI) pada tahun 2016 Dengan IPK 2,4 Indonesia berada pada ranking 15 dari 88 negara. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah praktek korupsi, salah satu strategi yang dilakukan adalah dirancangnya kurikulum pendidikan antikorupsi dengan melakukan berbagai penyempurnaan, baik isi maupun tujuan. Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis merasa perlu untuk mengembangkan suatu model pengembangan kurikulum Pendidikan antikorupsi khususnya pada BPSDM Provinsi Riau, dengan judul desertasi, yaitu: *"Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau"*. Adapun rumusan masalah adalah: Bagaimana bentuk kurikulum Pendidikan antikorupsi yang digunakan selama ini dan bagaimana pengembangan Model Kurikulum Pendidikan antikorupsi pada BPSDM Provinsi Riau. Adapun Tujuan Penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) adalah untuk mengetahui kurikulum Pendidikan antikorupsi yang digunakan selama ini dan untuk mengembangkan Model Kurikulum Pendidikan antikorupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau. Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas pengembangan model kurikulum Pendidikan antikorupsi ini adalah penelitian *Research and Development* yang mengadopsi, pendapat Borg & Gall, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Langkah, yaitu : (1) Penelitian dan pengumpulan informasi, (*Research and information collecting*), (2) Perencanaan, (Planning), (3) Mengembangkan desain model awal (*Develop preliminary form of product*), (4) Uji coba awal (*Preliminary field testing*), (5) Revisi terhadap model awal , (*Main product revision*), (6) Uji coba kedua (*Main field testing*), (7) Revisi model tahap ke 2 (*Operational product revision*), (8). Uji coba tahap ke 3 (*Operational field testing*), (9) Penyempurnaan model akhir (*Final product revision*), dan (10) Desimilasi dan implementasi (*Dissemination and implementation*). Berdasarkan proses hasil penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Adapun hasil atau temuan penelitian ini adalah dirancangnya suatu Model kurikulum Pendidikan antikorupsi melalui langkah-langkah penelitian dan pengembangan (*Research and Development*), berdasarkan dengan landasan nilai-nilai religiusitas (agama) dan nilai-nilai budaya melayu Riau.

Kata Kunci : Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Amat Budiman (2021): Development of Anticorruption Education Curriculum Model at The Human Resources Development Agency (BPSDM) Riau Province.

Nowadays, people's lives are often faced with various problems, including the crucial crime of corruption. Several transparency agency surveys indicate the high level of corruption in Indonesia, among other countries, is ranked sixth most corrupt in the world according to transparency international (IT) survey in 2016 with GPA 2.4 Indonesia ranked 15th out of 88 countries. Various efforts have been made to prevent the practice of corruption, one of the strategies carried out is the design of an anticorruption education curriculum by carrying out various enhancements, both content and objectives. Departing from the above problems, the author felt the need to develop a model of development of the anti-corruption education curriculum, especially in BPSDM Riau province, with the title Desertation, namely: *"Development of Anticorruption Education Curriculum Model at Human Resources Development Agency (BPSDM) Riau Province"*. The formulation of the problem is: How is the form of anticorruption education curriculum used during this time and how to develop the Anticorruption Education Curriculum Model in BPSDM Riau Province. The purpose of research and development is to know the anticorruption education curriculum used during this time and to develop the Anticorruption Education Curriculum Model at the Human Resources Development Agency (BPSDM) Riau Province. This type of research used in discussing the development of the anticorruption education curriculum model is research Research and development adopted, Borg & Gall opinion, consisting of 10 (ten) Steps, namely: (1) Research and information collecting, (2) Planning, (Planning), (3) Develop preliminary form of product, (4) Preliminary field testing, (5) Revision of the initial model , (Main product revision), (6) The second test (Main field testing), (7) Revision of the 2nd stage model (Operational product revision), (8). Operational field testing, (9) Final product revision, and (10) Dissemination and implementation. Based on the process of research and development results. The results or findings of this study are the design of an anticorruption Education curriculum model through research and development measures, based on the foundation of the values of religiosity (religion) and the cultural values of Riau Malay.

Keywords: Development of Anticorruption Education Curriculum Model



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أمات بوديمان (2021): تطوير نموذج منهج تعليمي لمكافحة الفساد في وكالة تنمية الموارد البشرية (وكالة تنمية الموارد البشرية) في مقاطعة رياو.

في الوقت الحالي ، غالبًا ما تواجه حياة الأمة مشاكل مختلفة ، بما في ذلك جريمة الفساد البالغة الخطورة. تشير نتائج العديد من الاستطلاعات التي أجرتها وكالات الشفافية إلى أن المستوى المرتفع للفساد في إندونيسيا ، من بين دول أخرى ، هو في المرتبة السادسة بين الدول فسادًا في العالم وفقًا لاستطلاع منظمة الشفافية الدولية في عام 2016 . 2.4 . تحتل إندونيسيا المرتبة 15 من بين 88 دولة. بُذلت جهود مختلفة لمنع الممارسات الفاسدة ، ومن الاستراتيجيات المنفذة تصميم منهج تعليمي لمكافحة الفساد من تحسينات مختلفة ، في المحتوى والغرض. بعيدًا عن المشاكل المذكورة أعلاه ، يشعر المؤلفون بالحاجة إلى تطوير نموذج لتطوير منهج تعليمي لمكافحة الفساد ، لا سيما في وكالة تنمية الموارد البشرية في مقاطعة رياو ، بعنوان الرسالة ، وهو: "تطوير نموذج منهج تعليمي لمكافحة الفساد في وكالة تنمية الموارد البشرية في مقاطعة رياو". صياغة المشكلة هي: ما هو شكل المناهج التعليمية لمكافحة الفساد التي تم استخدامها حتى الآن وكيف يتم تطوير نموذج المناهج التعليمية لمكافحة الفساد في وكالة تنمية الموارد البشرية في مقاطعة رياو. تتمثل أهداف البحث والتطوير (البحث والتطوير) في تحديد منهج تعليم مكافحة الفساد المستخدم حتى الآن وتطوير نموذج منهج تعليمي لمكافحة الفساد في وكالة تنمية الموارد البشرية في مقاطعة رياو. البحث المستخدم في مناقشة تطوير نموذج المناهج التعليمية لمكافحة الفساد هو بحث البحث والتطوير الذي يتبنى رأي برود ويتكون من 10 (عشر) خطوات وهي: (1) (2) التخطيط ، (التخطيط) ، (3) تطوير التصميم الأولي (تطوير الشكل الأولي للمنتج) ، (4) الاختبار الميداني الأولي (5) مراجعة النموذج الأولي ، (مراجعة المنتج الرئيسي) ، (6) التجربة الثانية (الاختبار الميداني الرئيسي) ، (7) مراجعة نموذج المرحلة الثانية (مراجعة المنتج التشغيلي) ، (8) 3 (الاختبار الميداني التشغيلي) ، (9) مراجعة المنتج النهائي ، و (10) النشر والتنفيذ. بناء على عملية البحث ونتائج التطوير (البحث والتطوير). أما بالنسبة لنتائج أو نتائج هذا البحث فهو تصميم نموذج منهج تعليمي لمكافحة الفساد من خلال خطوات البحث والتطوير (البحث والتطوير) ، بناءً على أساس القيم الدينية (الدين) والقيم الثقافية لرياو الملايو.

الكلمات المفتاحية: تطوير نموذج منهج تعليمي لمكافحة



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah persepsi kurikulum.¹ Ada tiga persepsi tentang kurikulum, kurikulum sebagai substansi², sebagai sistem³, dan sebagai bidang studi⁴.

Bertolak dari persepsi tersebut di atas, maka kurikulum lembaga pendidikan di Indonesia seyogyanya menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan yang sedang dihadapi masyarakat. Kondisi saat ini kehidupan berbangsa seringkali berhadapan dengan berbagai problematika yang tidak ringan. Permasalahan yang dimaksud yaitu; *Pertama*, Permasalahan sosial-kultural masyarakat yang berkembang akhir-akhir

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 27

² Persepsi pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara. Lihat, Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*

³ Persepsi kedua, adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.

⁴ Persepsi ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum, mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini semakin menghawatirkan. Berbagai peristiwa yang merendahkan harkat dan martabat manusia berkembang secara luas dalam masyarakat, seperti hancurnya nilai-nilai moral, ketidakadilan yang merajalela, solidaritas yang berkurang, meningkatnya kenakalan remaja, tindak pidana melaju pesat, dan berbagai masalah yang merusak moral bangsa lainnya. *Kedua*, permasalahan krisis multi-dimensional yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi dengan praktek korupsi yang semakin canggih yang tak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi⁵ di Indonesia sudah menjadi budaya dan epidemi bahkan virus yang harus segera diperangi bersama. Korupsi merupakan salah satu problem besar bangsa Indonesia saat ini.⁶ Ia telah merusak sendi-sendi perekonomian bangsa yang terlihat dalam kenyataan bahwa setelah berselang beberapa tahun sejak krisis moneter di ujung abad yang lalu, kondisi perekonomian bangsa masih belum pulih.⁷

⁵ Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan dorongan orang untuk melakukan korupsi. Jur. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.

⁶ Korupsi merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa penyakit korupsi di Indonesia telah melebar ke segala lapisan dalam struktur pemerintah. Korupsi telah menjadi isu sentral, bahkan sangat populer melebihi isu apa pun yang muncul di Indonesia. *Trend* perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Korupsi menjadi suatu yang biasa dan seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2006), 25.

⁷ Walhasil, bangsa Indonesia memang sedang menghadapi krisis multidimensional. Dari hasil kajian pelbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau moral. Krisis ini, secara langsung atau tidak, berhubungan dengan persoalan pendidikan. Kontribusi pendidikan dalam konteks ini adalah pada pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya. Ironisnya, krisis tersebut menurut sementara pihak-pihaknya disebabkan karena kegagalan pendidikan agama, termasuk di dalamnya pendidikan agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korupsi merupakan penyakit sosial yang kerap terjadi dan seringkali menjadi awal runtuhnya peradaban yang maju.⁸ Tindak pidana korupsi juga terkait dengan aspek karakter atau mental manusia. Oleh sebab itu salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Lembaga Pendidikan, termasuk Lembaga Pendidikan dan pelatihan di Indonesia terutama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan antikorupsi yang sejalan dengan perkembangan kekinian.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana, tujuan, materi, metode, sarana/ prasarana dan evaluasi pembelajaran serta evaluasi yang diberikan kepada peserta diklat dalam rangka membentuk spiritual dan berkarakter yang baik serta mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan demikian setelah peserta diklat mengikuti dan mempelajari materi pembelajaran berdasarkan kurikulum pendidikan anti korupsi, diharapkan mereka memiliki karakter dan mental yang baik sekaligus diharapkan terhindar dari tindakan pidana korupsi.

Secara sosiologis, khususnya dalam sejarah Islam di periode Madinah yang merupakan masyarakat yang terorganisir dalam sebuah negara kota dengan sebuah konstitusi yang disepakati, telah mengenal beberapa istilah yang terkait erat dengan korupsi, seperti *gulf* (penggelapan), *suht* atau *risywah* (penyuapan), dan pemberian yang tidak

Islam. Lihat, Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 17-18.

⁸ Syamsul Anwar dkk. *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. (Jakarta: PSAP, 2006), h. 69



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah kepada para pejabat (*hadaya al-'ummal*).⁹ Praktik korupsi juga dapat kita temui di era reformasi ini, bahkan menjadi isu sentral media baik elektronik maupun cetak.

Data menunjukkan berdasarkan Indeks Persepsi Korups (CPI) yang diukur oleh Transparency International (TI), CPI Indonesia tahun 2019 berada pada skor 40/100, dan menempati peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei indonesia masih berada pada posisi 100 besar terkorup di dunia.¹⁰ Data lain terungkap kasus-kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdikan untuk kemajuan bangsa ini. Tindakan korupsi sudah menjadi hal biasa yang dilakukan masyarakat indonesia, mulai dari kalangan pejabat sampai masyarakat biasa. Tingginya tindakan korupsi yang ada di Indonesia dibuktikan dari hasil survei Political Economic Rist Consultant (PERC), yang menyatakan Indonesia menduduki peringkat tertinggi di Asia.¹¹

Beberapa contoh kasus korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan Bulog senilai Rp.62,9 miliar. Korupsi mafia anggaran DPR di 60-an proyek APBN sebesar 6.1 Triliun, rugikan negara sebesar 2.5 Triliun. Kasus korupsi terupdate di Indonesia yang lain yaitu berkaitan dengan korupsi bus transjakarta. Ketiga kasus korupsi tersebut merupakan

⁹ Ibid, h. 72

¹⁰ Rosida Tiurma Manurung: Pendidikan anti Korupsi Sebgsi satuan Pembelajaran berkarakter dn humanistic, Jurnal Sositknologi Edisi 27 thn 2020

¹¹ Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia.¹² Banyaknya korupsi yang dilakukan para pegawai negara menunjukkan indikasi masih rendahnya pendidikan moral yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal itu membuktikan para pegawai negara belum semua mempunyai kecerdasan *religious*, meskipun secara kecerdasan *intellectual* banyak pegawai negara yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata.

Sesungguhnya kasus korupsi yang terungkap di media massa ini seakan belum berhenti, dari satu kasus ke kasus lain. Jumlah kasus korupsi yang terungkap sungguh melewati batas kewajaran, karena data kasus korupsi hanyalah bagian kecil dari *grand* kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sangat wajar jika masyarakat merasa heran melihat fenomena korupsi yang sangat kompleks yang disebut Syamsul Anwar¹³ dalam bukunya *Fikih Antikorupsi* sebagai *hyper corruptus*, yaitu suatu keadaan dimana korupsi sebagai bentuk penyimpangan telah melewati batas-batas nalar kemanusiaan. Korupsi telah menenggelamkan kredibilitas bumi pertiwi sebagai bangsa yang terkenal beradab, bangsa dengan lima sila agung yang seharusnya selalu menyelaraskan kehendak berketuhanan sekaligus berkemanusiaan.

Realitasnya di atas menunjukan bangsa Indonesia masih sedang mengalami suasana keprihatinan yang bertubi-tubi.¹⁴ Masyarakat pun

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 83

¹³ Syamsul, Anwar dkk. *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. (Jakarta: PSAP, 2006), hlm. 1

¹⁴ Hasil survei menunjukkan bahwa negeri kita masih bertengger dalam jajaran negara yang paling korup di dunia, KKN melanda di berbagai institusi, disiplin makin longgar semakin meningkatnya tindak kriminal, tindak kekerasan, *anarchisme*, *premanisme*, konsumsi minum keras dan narkoba sudah melanda di kalangan pelajar dan mahasiswa. Masyarakat kita juga cenderung mengarah pada masyarakat kepentingan/patembayan (*gesellschaft*), nilai-nilai masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenal praktik korupsi yang telah disamakan dengan banyak istilah. Misalnya, uang administrasi, uang tip, angpao, uang diam, uang bensin, uang pelicin, uang ketok, uang kopi, uang makan, uang pangkal, uang rokok, uang damai, uang di bawah meja, tahu sama tahu, uang semir, uang lelah, uang pelancar atau pelumas, dan uang salam tempel. Beberapa istilah ini dapat dijumpai, terutama ketika ada orang yang berperkara. Bahkan ketika seseorang mengurus keperluan di RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, beberapa istilah tersebut sering kali digunakan. Karena itu tidak berlebihan jika Mochtar Lubis mengatakan bahwa korupsi memang berwajah banyak. Praktik korupsi dilakukan sepanjang hayat, sejak masa kelahiran (ketika orang mengurus akte) hingga kematian (ketika orang mengurus pemakaman).¹⁵ Sehingga, tipe pelaku utamanya yang terbesar adalah para pejabat pemerintah kemudian masyarakat umum dan biasanya perilaku masyarakat yang mendukung tumbuh suburnya korupsi.¹⁶

Maraknya tindakan korupsi tersebut di negeri ini merupakan sebuah ironi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tindakan memperkaya diri sendiri maupun kelompok dengan cara yang tidak benar, jelas-jeles dilarang. Agama Islam, melalui al-Qur'an¹⁷ serta tafsirannya¹⁸

beguyuban (*gemeinschaft*) sudah ditinggal, yang tampak di permukaan adalah timbulnya konflik kepentingan-kepentingan, baik kepentingan individu, kelompok, agama, etnis, politik, maupun kepentingan lainnya. Lihat Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹⁵ Biyanto, *Pemberantasan dan Perwujudan Integritas Publik Pengamalan Muhammadiyah dan NU*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian Kerjasama IAIN Sunan Ampel dan Tiri Making Integrity Work. Surabaya, 12 Oktober 2010.

¹⁶ Sargoni, www.cetak.bangkapos.com/opini/read/335.html-Tembolok-mirip.

¹⁷ QS. Ali-'Imran [3] ayat 161. **وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نَفْسٌ كُلٌّ نَفْسٌ مَّا كَذَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ** [161/ "Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Hadits¹⁹, dan ulama' dalam tafsir²⁰ mereka secara tegas melarang segala bentuk perolehan dan menjadi gejala disetiap lapisan masyarakat.

Terlepas dari itu semua tampaknya korupsi tidak akan berhenti dan habis walaupun para pemburu koruptor selalu berhasil menangkap pelaku koruptor. Tetap saja tidak ada kata jera alias tobat, malah seolah-olah mumpung ada kesempatan mereka bereaksi sehingga ada istilah 4 H; yaitu halal, haram, hantam, habis.

Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (QS. Ali-'Imran [3] : 161)

¹⁸ Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya dengan mengemukakan beberapa hadits tentang ancaman neraka. *« قَالَ « أَكْثَرُ الْعُلُولِ عَدَاةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَرَاغٍ مِنَ الْأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّحْلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ لَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْطَعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا اقْتَطَعَتْ طَوْفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».*

Dari Abi Malik Al-Asyja'i dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Ghulul (pengkhianatan/korupsi) yang paling besar di sisi Allah adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepalanya dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat. (HR Ahmad, dan dalam Shahihut Targhiib wt Tarhiib II/ 380 nomor 1869)

¹⁹ Hadits-hadits lain yang berhubungan dengan korupsi sangat jelas:

« حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ لُقَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّفَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ »

Diriwayatkan dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu 'anhun, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara dhalim, maka Allah akan mengalungkan di lehernya pada Hari Kiamat nanti dengan setebal tujuh lapis bumi. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah saw pernah bersabda:

((مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكُنْمَا مَخْطِئًا فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

Barangsiapa di antaramu kami minta mengerjakan sesuatu untuk kami, kemudian ia menyembunyikan satu alat jahit (jarum) atau lebih dari itu, maka perbuatan itu ghulul (korupsi) harus dipertanggung jawabkan nanti pada Hari Kiamat. (HR. Muslim)

²⁰ Lafal korupsi ternyata ada di buku-buku tafsir Al-Qur'an susunan Ulama di Indonesia. Bahkan Prof Dr Hamka memberikan judul "Korupsi" dalam menafsiri ayat 161 Surat Ali 'Imran. Di antaranya setelah meriwayatkan betapa kejujuran telah ditegakkan di dalam pemerintahan Islam, kemudian Hamka berkomentar: "Melihat dan menilik pelaksanaan Umar bin Khathab dan Umar bin Abdul Aziz ini (yakni hadiah pun harus dikembalikan, pen), nyatalah bahwa komisi yang diterima oleh seorang menteri, karena menandatangani suatu kontrak dengan satu penguasa luar negeri dalam pembelian barang-barang keperluan menurut rasa halus iman dan Islam adalah **korupsi** juga namanya. Kita katakan menurut rasa halus iman dan Islam adalah guna jadi pedoman bagi pejabat-pejabat tinggi suatu Negara, bahwa lebih baik bersih dari kecurigaan ummat." (Prof Dr Hamka, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Panjimas, Jakarta, cetakan IV, 1985, juzu' IV, halaman 143). Ulama Indonesia lainnya yang menulis Tafsir Qur'an Karim (ringkas), Prof Dr H Mahmud Yunus juga menggunakan lafal korupsi untuk menjelaskan ayat 161 Surat Ali 'Imran. Dia menulis: "Nabi itu bukanlah berlaku curang atau khianat dalam membagi harta rampasan, melainkan berlaku jujur, lurus dan adil dengan tiada memandang famili dan yang bukan famili, karena Nabi yakin dan percaya, bahwa orang yang berlaku curang akan memikul dosanya dan tanggung jawabnya pada hari kiamat di sisi Allah, meskipun ia akan terlepas dari hukuman di atas dunia. Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggung jawab harta benda Negara, supaya memeliharanya dan membaginya dengan jujur, lurus dan adil menurut mestinya dan sekali-kali jangan berlaku curang (korupsi), karena meskipun ia akan terlepas dari hukuman dunia, ia tiada akan terlepas dari hukuman di akhirat. Inilah perbedaannya orang yang beriman kepada Allah dari orang yang kafir. Orang kafir hanya takut kepada hukuman dunia semata-mata, sebab itu ia tiada takut berlaku curang dengan bersembunyi-sembunyi." (Prof Dr H Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an Karim, Hidakarya Agung, Jakarta, cetakan ke-27, tahun 1409H/ 1988M, halaman 95-96).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka yang terlanjur melakukan tindak korupsi dan terbiasa melakukan praktek korupsi, tampaknya Pendidikan tidak akan berdampak apa pun²¹. Bukankah mereka sejak awal sudah tahu bahwa tindakan itu dilarang? Mereka juga tahu bahwa ajaran agama manapun mengajarkan bahwa korupsi itu jahat. Tetapi mereka tetap korupsi juga. Untuk mereka ini, kiranya pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan jika hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara sangat tegas.²² Karena tindakan korupsi di negeri ini seringkali dilakukan tidak secara personal, tetapi dilakukan secara kolektif, struktural, dan sistematis. Sehingga secara tidak langsung korupsi lambat laun menjadi sebuah budaya²³.

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwasanya tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bertitik tolak dari dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut menjadi jelas bahwa manusia Indonesia yang hendak dibentuk melalui proses pendidikan bukan sekedar

²¹ Melihat kondisi darurat seperti itu, di dunia pendidikan masih belum memasukkan pembelajaran khusus materi antikorupsi padahal dunia pendidikan juga bertanggung jawab akan pentingnya penanaman kesadaran melawan perilaku korupsi melalui institusi resmi sekolah yaitu Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan Antikorupsi adalah tanggung jawab dunia pendidikan secara keseluruhan sehingga hendaknya ide pendidikan antikorupsi tidak hanya ada pada kurikulum pendidikan nasional di bawa kementerian pendidikan nasional namun juga dunia pendidikan di bawa kementerian departemen agama termasuk pendidikan tinggi didalamnya. Lihat Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

²² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi*, 124.

²³ Hasil survei yang dilakukan *Kompas* pada tahun 2011 mengungkap bentuk- bentuk korupsi yang ada di masyarakat. Jumlah kasus Korupsi yang diajukan Masyarakat ke KPK sebagai berikut, pengadaan barang dan jasa (328 kasus); gratifikasi (146); pemerasan (379); penggelapan dalam jabatan (393); penyuapan (552); perbuatan curang (5.596); penyalahgunaan wewenang (150); tindak pidana lain terkait korupsi (729); lainnya (5); belum diklasifikasi (13.932). Modus korupsi di atas sering terjadi dan pada faktanya melibatkan para pejabat di negara religius Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang berilmu pengetahuan semata tetapi membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian dan berakhlak.²⁴

Berdasarkan tujuan di atas, maka pemerintah memasukkan kurikulum pendidikan karakter di Lembaga Pendidikan dan kediklatan untuk mencegah korupsi yang merajalela di negeri ini, menurut Azyumardi Azra, bisa dilakukan setidaknya melalui pendekatan, sebagai berikut: *pertama*, menerapkan pendekatan *odeling* atau *exemplary* atau *uswah hasanah*, yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan kediklatan untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan.

Kedua, menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta diklat secara terus-menerus memberikan pemahaman berbagai nilai yang baik dan nilai-nilai buruk. Usaha ini bisa dibarengi pula dengan langkah-langkah; memberi penghargaan (*prizing*) dan menumbuh suburkan (*cherising*) nilai-nilai yang baik, dan sebaliknya mengecam dan mencegah (*discouraging*) berlakunya nilai-nilai yang buruk; menegaskan nilai-nilai yang baik dan buruk secara terbuka dan kontinyu; memberikan kesempatan kepada peserta diklat untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan berdasarkan nilai; melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam-dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan

²⁴ Tim Redaksi Sinar, *UU Sistem Pendidikan Nasional* (UU RI Nomor 20 Tahun 2003) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan; membiasakan bersikap dan bertindak dengan pola-pola yang baik yang diungguli secara terus-menerus dan konsisten.

Ketiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*character-based education*).²⁵ Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan *character-based approach* ke dalam setiap mata pelajaran yang ada, terutama dengan memberi penguatan terhadap mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter; seperti pelajaran agama, sejarah pancasila, dan sebagainya. Memandang kritik terhadap mata pelajaran terakhir ini, maka perlu dilakukan reorientasi baik dari segi isi/muatan dan pendekatan hafalan, tetapi betul-betul berhasil membantu pembentukan karakter.²⁶

Penanaman nilai-nilai antikorupsi; Jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli pada peserta Pendidikan dan pelatihan merupakan penekanan utama pada saat mulai peltihan, pada saat habituasi sehingga dalam tugas dan kehidupan sehari-hari mereka betul-betul dapat menjauhi korupsi itu sendiri.

Data statistic nasional merilis pengaruh penerapan nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan dapat terlihat pada indek prilaku antikorupsi (IPAK) masyarakat indonesia tahun 2019 sebesar 3,70 pada skala 0 sampai

²⁵ Sebagai contoh tentang rendahnya pengaruh kontrol eksternal dalam membentuk karakter seseorang siswa adalah tentang kebiasaan mencontek di dalam kelas. Perilaku curang ini memang bisa dikurangi dengan memberikan sanksi yang lebih keras, pengaturan tempat duduk, dan kontrol ketat dari guru. Seperti halnya korupsi di Negara-negara yang sistem hukumnya berjalan dengan baik dan dilakukan secara konsisten, adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan Negara yang sistem hukumnya lemah seperti di Indonesia. Namun masih saja perilaku kecurangan terjadi, misalnya di AS dengan kasus manipulasi keuangan di Enron, dan banyak perusahaan lain, yang membuktikan bahwa kontrol eksternal tidak dapat membuat manusia berkarakter. Karena ketidak inginan mereka melakukan korupsi disebabkan oleh rasa takut pada sanksi hukum yang berat, bukan karena mereka memang jujur. Kontrol eksternal adalah penting dan perlu, untuk memberikan lingkungan yang kondusif untuk membiasakan masyarakat berperilaku baik. Lihat bukunya Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. (Jakarta: IHF, 2009), hlm. 111

²⁶ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002), 176-177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 angka ini lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 sebesar 3,66. Hal ini menunjukkan semakin mendekati 5 bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, Pada tahun 2019 nilai indeks persepsi naik sebesar 3,70 naik 0,06 poin dibanding tahun 2018. Kenaikan indeks persepsi antikorupsi tersebut berada pada masyarakat perkotaan dibanding pada pedesaan. Data yang ada menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi hal tersebut terlihat masyarakat yang berpendidikan sekolah lanjutan pertama (SLTP) kebawah Indeks Persepsi Antikorupsi 3,57; Sekolah lanjutan atas (SLTA) sebesar 3,94 dan diatas SLTA 4,05. Berdasarkan usia 40-50 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok usi lain, Tahun 2019 Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) masyarakat berusia 40 tahun kebawah sebesar 3,66; usia 40-59 tahun sebesar 3,73 dan usia 60 tahun atau lebih 3,66.²⁷

Berdasarkan data tersebut, pendidikan dan pelatihan masih dapat diharapkan apabila tertanamnya nilai-nilai antikorupsi kepada para peserta diklat, sehingga sejak awal mulai dari mereka jadi pegawai negeri sipil semakin menjauhkan dan memahami bahwa perbuatan yang tidak baik atau korupsi itu bertentangan dengan norma hukum dan norma agama dan norma budaya.²⁸

Orientasi visi dan misi Pendidikan dan pelatihan secara global telah tercemin pada gambaran karakter yang baik tetapi terkesan tidak

²⁷ Badan Pusat Statistik : Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2019 No 75/09/thn XXII.16 September 2019

²⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi*, 124-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah, maka diperlukan rekayasa ulang dalam kurikulum, tujuan kediklatan, mekanisme pengajar, tenaga pendidik, dan sarana. Rekayasa ulang ini harus berjalan secara integratif dan terpadu.²⁹

Kurikulum yang ideal seharusnya mampu mengembangkan potensi peserta diklat sesuai dari makna kediklatan itu sendiri yang artinya penumbuhkan potensi. Untuk itu perlu suatu bangunan kurikulum yang memiliki karakteristik sesuai dengan potensi dasar (fitrah)³⁰ manusia.

Dengan demikian, menurut penulis strategi untuk memerangi korupsi adalah dirancangnya kurikulum antikorupsi pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dengan memasukkan pada Tujuan, materi dan pada evaluasi kurikulum lebih menekankan pada sikap moral akhlak dan nilai-nilai budaya yang dilakukan setiap hari. Kalau kita perhatikan kurikulum yang diterapkan selama ini mata diklat anti korupsi hanya bagian kecil di dalam kurikulum kediklatan, hanya menempel pada beberapa mata pelatihan saja, sehingga hasilnya tidak maksimal. Dikhawatirkan masih belum dipahami secara utuh oleh peserta diklat sedang mereka akan menjadi pemimpin yang akan datang.

Fenomena ini seolah mempertanyakan kembali peranan kediklatan khususnya Pendidikan dan pelatihan di Indonesia dalam menumbuhkan karakter antikorupsi untuk mengembalikan dan

²⁹ Syafrudin, *Muslim Visioner: Hidup dengan Al-Faatihah*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 170

³⁰ Fitrah di sini dimaksudkan sebagai potensi dasar manusia yang dibawa sejak lahir, di antaranya adalah agama, intelek, sosial, susila, seni, ekonomi, kawin, kemajuan, persamaan, keadilan, kemerdekaan, politik, ingin dihargai, dihormati dan lain sebagainya. Lihat Nur Ahid, "Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga", (Tesis, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1993), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun etika serta moral masyarakat.³¹ Kalau melihat kurikulum yang digunakan masih terdapat beberapa kelemahan seperti kurikulum yang dipakai secara struktur masih terpisah antara mata diklat pembentukan karakter dengan mata pelatihan orientasi, metode pembelajaran harus berkembang sesuai dengan kondisi sekarang. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktek korupsi di Negara yang berbudaya dan berasaskan pancasila. Salah satu strategi yang dilakukan untuk memerangi korupsi adalah dirancangnya kurikulum pendidikan antikorupsi secara utuh oleh beberapa lembaga pendidikan. Lembaga Adminisi Nerara (LAN) yang dibina, karena LAN merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan kurikulum, dalam kurun waktu tahun 2014-2020 telah melakukan beberapa penyempurnaan dan pengembangan kurikulum hal tersebut dimaksudkan agar kurikulum tersebut sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada di lapangan. Pada tahun 2014 Misalnya kurikulum Korupsi diberi nama kurikulum percepatan pemberantasan korupsi disempurnakan dengan nama kurikulum Antikorupsi yang struktur kurikulumnya hanya sebatas klasikal yang disebut kurikulum antikorupsi tahun 2016, kurikulum tersebut disempurnakan menjadi kurikulum Antikorupisi yang dikembangkan dengan memasukkan mata diklat aktualisasi nilai-nilai.

Kurikulum tahun 2016 disempurnakan kembali oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Calon

³¹ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2003), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai Negeri Sipil nomor 12 tahun 2018, dengan pengembangan seluruh materi pembelajaran ditambah dengan materi aktualisasi ditempat tugas masing-masing selama 60 hari kerja di kantor masing-masing mereka bertugas.

Pengembangan di atas dilakukan dengan pengembangan kurikulum didasarkan atas kelemahan hasil evaluasi psca diklat, maka dilakukan pengembangan kurikulum, secara akademisi belum dilakuaka sekaligus dengan pendekatan agama dan budaya. Untuk penelitian dan Pengembangan disertasi ini untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ada dengan tujuan untuk membrantas korupsi melalui Pengembangan kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai religiusitas (agama) dan nilai-nilai budaya melayu Riau sebagai landasan kurikulum pendidikan antikorupsi tersebut secara tersurat, yang digunakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis merasa perlu untuk mengembangkan suatu model pengembangan kurikulum Pendidikan antikorupsi khususnya pada Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Provinsi Riau, dengan judul disertasi, yaitu: **“Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Perlunya pengkajian ulang terhadap kurikulum Pendidikan antikorupsi yang digunakan saat sekarang Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.
 - b. Pentingnya merumuskan Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan antikorupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.
 - c. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan anti korupsi sebuah usaha yang perlu dilakukan, lebih lagi melalui internalisasi dasar nilai-nilai Agama (religiusitas), nilai-nilai budaya (kearifan local) daerah masing.
2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dibatasi masalahnya pada:

- a. Perlunya pengkajian ulang terhadap kurikulum pendidikan antikorupsi yang digunakan Pada Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Suber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau
- b. Pentingnya merumuskan model pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi pada Pendidikan dan pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Menemukan bentuk kurikulum pendidikan antikorupsi yang digunakan selama ini Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.
- b. Bagaimana pengembangan model kurikulum pendidikan antikorupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.
- c. Bagaimana keefektifan model kurikulum antikorupsi yang telah dikembangkan pada badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menemukan bentuk kurikulum pendidikan antikorupsi yang digunakan selama ini Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.
- b. Mengembangkan model kurikulum pendidikan antikorupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.
- c. Mengungkap keefektifan model kurikulum antikorupsi yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara penelitian teoritis adalah:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi barometer untuk memberikan inspirasi kepada peneliti lainnya sehingga menjadi kajian-kajian selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan anti korupsi.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka peningkatan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi widyaiswara, stakeholder, peserta diklat dan akademisi, dalam melaksanakan kurikulum pendidikan antikorupsi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau
- b. Bermanfaat bagi pemerintah dalam rangka upaya pencegahan tindak korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara.
- c. Menambah khasanah keilmuan tentang pengembangan kurikulum antikorupsi sehingga dapat menerapkan nilai-nilai

antikorupsi oleh ASN di lingkungan pemerintah Povinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Pengembangan Kurikulum Anti Korupsi

a. Kurikulum

1) Pengertian

Arti *Curriculum* dalam Bahasa Yunani kuno berasal dari kata 'Curir' yang artinya pelari; dan 'Curere' yang artinya tempat berpacu. *Curriculum* diartikan jarak yang harus di tempuh oleh pelari.³⁷ Dalam Bahasa Indonesia *kurikulum* berarti, "Perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan; perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus."³⁸ Dalam Bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan *manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan.³⁹

Pengertian kurikulum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah "Seperangkat rencana dan

³⁷ Kompasiana, 134 Pengertian Kurikulum (Lengkap), [Online], Tersedia di, <http://www.kompasiana.com/ikpj/134-pengertian-kurikulumlengkap-54ff406ba33311c84c50f853>, [Akses], 15 Oktober 2016.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), cet. 1, ed. 4, hlm. 762.

³⁹ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), cet. 3, hlm. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan”. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (*goals*) dan tujuan (*objectives*) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sedangkan menurut Harsono⁴⁰, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti *Track* atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan.

Kurikulum menurut istilah, sebagaimana pendapat para ahli dan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Menurut Rusman, “Kurikulum lebih luas dari sekadar rencana pelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman atau proses belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan dibawah bimbingan lembaga pendidikan.”⁴¹

⁴⁰ *Ibid.hal. 7*

⁴¹ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), cet. 2, hlm. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Dakir, Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan.⁴²
- c. Sedangkan menurut UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 9 kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sangatlah berarti karena merupakan operasionalisasi dari tujuan yang dicita-citakan, dalam arti tujuan pendidikan tidak akan berhasil dicapai tanpa keberadaan kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan merupakan salah satu dari komponen pokok pendidikan, dan kurikulum itu sendiri juga merupakan sistem yang mempunyai komponen-komponen tertentu.

Berangkat dari pengertian kurikulum yang diungkap oleh UU No. 20 tahun 2003 di atas, dapat ditafsirkan bahwa komponen kurikulum meliputi: *pertama*, tujuan dan sasaran, karena tidak akan bisa menyusun bahan dan isi pelajaran serta metode yang efektif

⁴²Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), cet. 1, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa mengacu pada pencapaian suatu tujuan; *kedua*, isi dan bahan pelajaran; *ketiga*, metode atau kegiatan belajar mengajar dan yang *keempat*, adalah evaluasi, yakni upaya penilaian terhadap relevansi antar komponen efektifitas belajar mengajar⁴³, dapat diartikan bahwa kurikulum merupakan suatu rancangan pembelajaran sebagai pedoman terwujudnya tujuan pendidikan. Dalam istilah kekinian kurikulum dapat dimaknai dengan dua paradigma yaitu *paradigma lama* dan *paradigma baru*.

Menurut Oemar Hamalik, "Pandangan lama atau yang disebut pandangan tradisional, merumuskan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah."⁴⁴ Sedangkan paradigma baru tentang kurikulum, sebagaimana dikemukakan Romine dalam Oemar Hamalik, "*Curriculum is interpreted to mean all of the rganized courses, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not.*"⁴⁵

Berdasarkan teori di atas dan kesesuaiannya dengan judul penelitian ini maka menurut penulis tentang kurikulum disini adalah sejumlah mata pelajaran yang terorganisir oleh pemerintah dalam

⁴³ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003, Pasal 1 ayat, 19, hlm. 1. [Online]. Tersedia di, www.hukumonline.com, [Akses,12 Oktober 2016].

⁴⁴ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), cet. 5, hlm. 3

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 4., Maksud dari Romine adalah, Kurikulum diartikan semua program yang terorganisir, kegiatan, dan pengalaman siswa diikuti di bawah pengelolaan sekolah, apakah di dalam kelas atau tidak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur kurikulum nasional kemudian di implementasikan lembaga pendidikan.

R.W. Tyler mengajukan empat pertanyaan pokok yang harus dijawab dan dikemas dalam penyusunan kurikulum. (1). Tujuan apa yang harus dicapai sekolah; (2). Bagaimana memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan itu; (3). Bagaimana bahan disajikan agar efektif diajarkan, dan (4). Bagaimana efektifitas belajar dapat dinilai. Berdasarkan pertanyaan di atas dapat diperoleh keempat komponen kurikulum, yakni: tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi.⁴⁶

Ahmad Tafsir mengidentifikasikan “Proses belajar mengajar” dengan “metode”,⁴⁷ sementara Sukmadinata menafsirkan dengan sistem penyampaian (metode) dan penggunaan media (alat pengajaran). Dengan menjadikan sistem penyampaian dan media dalam satu sub komponen kurikulum oleh Sukmadinata,⁴⁸ menunjukkan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Penggunaan metode tertentu secara implisit mengindikasikan pada penggunaan media/alat pengajaran tertentu.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa komponen kurikulum ada empat, yaitu : tujuan, bahan ajar, proses belajar

⁴⁶ Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 7.

⁴⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 54

⁴⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengantar Kurikulum, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 1997, hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajar (metode) dan evaluasi. Keempat komponen itu saling berhubungan. Setiap komponen bertalian erat dengan ketiga komponen lainnya. Ringkasnya konsep kurikulum menurut Burhan Nugiantoro⁴⁹ adalah “kurikulum sebagai sistem, artinya kurikulum dipandang sebagai rencana dan pengaturan program pendidikan yang didalamnya terdapat beberapa komponen atau bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan mendukung serta membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan.

2) Tujuan dan Fungsi Kurikulum

Tujuan kurikulum yaitu agar peserta didik mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad, supaya mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi pendahulunya. Dengan jalan ini, mereka akan lebih mudah dan cepat membekali diri untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya.

Fungsi kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkatan tujuan pendidikan yang ada dibawahnya. Kurikulum sebagai alat dapat diwujudkan dalam bentuk program,

⁴⁹ Burhan Nugiantoro; Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Sebuah Pengantar Teoritis dan pelaksanaan, Yogyakarta 1980; BPFE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu kegiatan dan pengalaman belajar yang harus dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran⁵⁰.

3) Organisasi Kurikulum .

Muhaimin dkk.⁵¹ menyatakan bahwa yang dimaksud dengan organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pendidikan atau pengajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pengajaran yang ditetapkan.⁵² Secara lebih sederhana, Nasution merumuskan bahwa organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid.⁵³

Berdasarkan pada apa yang menjadi “Fokus Pengajaran”, sekurang-kurangnya dikenal tiga pola desain kurikulum, yaitu :

- 1) *Subject Centered Design*, suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar.
- 2) *Learner Centered Design*, suatu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa (minat dan kebutuhan siswa).

⁵⁰ Zainal Arifin, op.cit hlm 13 .

⁵¹ Muhaimin dkk.Monajemen Pendidikan, Prenada Media Group cet 2

⁵² Muhaimin, *op. cit.*, hlm. 41.

⁵³ Nasution, *op. cit.*, hlm. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Problem Centered Design*, desain kurikulum yang berpusat pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat.⁵⁴

Kurikulum yang berorientasi pada bahan ajar, merefleksikan bentuk kurikulum yang tersusun atas sejumlah mata pelajaran, dan diajarkan secara terpisah-pisah. Karena terpisah-pisahnya itu maka kurikulum ini disebut dengan *saparated subject curriculum*. Penyajian mata pelajaran secara terpisah dianggap sebagai salah satu kelemahan bentuk kurikulum ini,⁵⁵ karena bertentangan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut diupayakan adanya penggabungan antara dua mata pelajaran atau lebih atau disebut dengan *corelated curriculum*. Dan kurikulum ini pun esensinya masih kurikulum *subject centered* dan tidak menggunakan bahan langsung berhubungan dengan kebutuhan dan minat anak serta masalah-masalah yang hangat yang dihadapi murid dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶ Maka timbullah *learner centered design* dan *problem centered design* yang merefleksikan bentuk *integrated curriculum*.

Tiga jenis kurikulum, *separated subject curriculum*, *corelated curriculum* dan *integrated curriculum*. ketiga kategori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Separated subject curriculum

⁵⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *op. cit.*, hlm. 113.

⁵⁵ Nasution, *op. cit.*, hlm. 185.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurikulum yang disusun dalam bentuk penyajian bahan pelajaran dalam bentuk subject-subject atau mata-mata pelajaran tertentu yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Tujuan pelajaran adalah menguasai bahan dari tiap-tiap mata pelajaran yang ditentukan. Mata pelajaran itu pada hakekatnya hasil pengalaman umat manusia yang disusun oleh para ahli secara logis dan sistimatis.

Subject Curriculum mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya antara lain: bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistimatis dan berkesinambungan, organisasi kurikulum sangat sederhana, mudah direncanakan dan mudah diadakan perubahan jika diperlukan; kurikulum ini mudah dinilai untuk dilakukan perubahan seperlunya; dan bentuk kurikulum ini memudahkan pelaksana kurikulum (guru) karena disamping bahan pelajaran memang sudah disusun secara terurai dan sistimatis juga mereka pada umumnya dididik dan dipersiapkan untuk melaksanakan kurikulum yang demikian.⁵⁷

Adapun kelemahan dari *sapareted subject curriculum* adalah mata pelajaran diberikan secara terpisah-pisah dan tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan perolehan pengetahuan secara lepas-lepas dan parsial, kurikulum ini kurang memperhatikan masalah-masalah kehidupan faktual

⁵⁷*Ibid*, hlm. 114-115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi peserta didik; kurikulum tersebut cenderung statis dan ketinggalan zaman dan kurikulum bentuk ini sangat terbatas, karena hanya menekankan pada perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan perkembangan lainnya seperti emosional dan sosial.⁵⁸

b. *Corelated Subject Curriculum*

Corelated Subject Curriculum ini merupakan modifikasi dari *Saparated Subject Curriculum* yang terpisah-pisah dan berusaha mengadakan hubungan dalam pengetahuan peserta didik serta mencegah penguasaan bahan yang banyak tetapi dangkal dan lepas-lepas, sehingga mudah dilupakan dan tidak fungsional.⁵⁹

Tampilnya dapat bervariasi, bisa dengan menghubungkan antara dua mata pelajaran atau lebih secara insidental, bisa dengan menghubungkan secara lebih erat, yakni jika terdapat suatu pokok bahasan atau masalah tertentu yang dibicarakan dalam berbagai mata pelajaran, artinya sengaja direncanakan dan tidak hanya bersifat insidental, dan bisa juga dengan menghubungkan beberapa mata pelajaran dengan menghilangkan batas-batas yang ada, atau dengan istilah lain disebut dengan *broad fields*.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi kurikulum yang kedua ini juga mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya antara lain: ada korelasi antara dua atau lebih mata pelajaran, sehingga dapat menopang kebulatan pengetahuan dan pengalaman; peserta didik dapat mempelajari suatu masalah yang disorotinya dari berbagai sudut yang saling berhubungan, yaitu melalui beberapa mata pelajaran, dan memungkinkan peserta didik untuk menetapkan pengetahuan dan pengalamannya secara fungsional.⁶⁰

Sedangkan kelemahannya antara lain: kurikulum bentuk ini pada hakikatnya masih bersifat *subject centered* dan belum memilih bahan yang langsung berkaitan dengan minat dan kebutuhan peserta didik serta masalah kehidupan sehari-hari, tidak memberikan pengetahuan yang mendalam tentang mata-mata pelajaran; dan sering menjadi terlampau abstrak, karena membicarakan prinsip-prinsip, tema-tema atau masalah - masalah.⁶¹

c. *Integrated curriculum*

Integrasi berasal dari kata “*integer*” yang berarti unit. Dengan integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan dan keseluruhan.⁶² Kurikulum integratif adalah bentuk organisasi kurikulum yang benar-benar menghilangkan batas-

⁶⁰*Ibid*, hlm. 118.

⁶¹ Muhaimin, *op.cit.* hlm. 45.

⁶² Nasution, *op. cit.*, hlm. 195-196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas antara berbagai mata pelajaran. Mata pelajaran-mata pelajaran tersebut dilebur menjadi satu keseluruhan dan disajikan dalam bentuk unit. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran diharapkan dapat terbentuk kebulatan kepribadian anak sesuai dengan lingkungan masyarakatnya.⁶³

Kurikulum bentuk unit ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Unit merupakan satu kesatuan bulat dari seluruh bahan pelajaran. Faktor yang menyatukan adalah masalah-masalah yang diselidiki atau dipecahkan murid.
2. Unit didasarkan pada kebutuhan anak, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, baik yang menyangkut kejasmanian maupun kerohanian.
3. Dalam unit, anak dihadapkan pada berbagai situasi yang mengandung permasalahan yang biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari (*life centered*) yang dikaitkan dengan pelajaran di sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan anak.
4. Unit mempergunakan dorongan-dorongan sewajarnya pada diri anak dengan melandaskan pada teori-teori belajar.

⁶³ Burhan Nurgiantoro, *op. cit.*, hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan unit sering memerlukan waktu yang relatif lebih lama dari pada pelajaran biasa di kelas⁶⁴.

Kurikulum bagaimanapun bentuknya tetap mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum integratif ini antara lain: segala sesuatu yang dipelajari bertalian erat sehingga fungsional; sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar, yakni mendasarkan berbagai kegiatan dengan minat, kesanggupan dan kematangan murid; memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat; serta sesuai dengan faham demokrasi, karena setiap peserta didik dirangsang untuk berfikir sendiri, bekerja sendiri, memikul tanggung jawab dan bekerja sama dengan kelompok.⁶⁵

Kekurangan atau keberatannya adalah kurikulum ini sulit dilakukan oleh guru, karena mereka tidak mendapatkan persiapan untuk menjalankan kurikulum unit; tidak memungkinkan peserta didik untuk ujian umum (tradisional), karena permasalahan yang dihadapi setiap sekolah tidak sama dan selalu berubah-ubah; memerlukan banyak fasilitas yang tidak dimiliki oleh sekolah, dan tidak memberikan pengetahuan yang logis sistimatis.⁶⁶

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Nasution, *op. cit.*, hlm. 205-206.

⁶⁶ Muhaimin, *op. cit.*, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Zainal Arifin⁶⁷, pengembangan kurikulum mempunyai fungsi yaitu:

1. Fungsi prefentif, yaitu mencegah kesalahan para pengembang kurikulum terutama dalam melakukan hal yang tidak sesuai dengan rencana pengembangan kurikulum.
2. Fungsi korektif, yaitu mengoreksi dan membetulkan kurikulum dalam melaksanakan kurikulum.
3. Fungsi Konstruktif yaitu, memberikan arah yang jelas bagi para pelaksana dan pengembang kurikulum untuk membangun kurikulum yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.
4. Landasan Penyusunan Kurikulum

Nana Syaodih Sukmadinata,⁶⁸ mengemukakan bahwa secara komulatif landasan penyusunan kurikulum adalah : (1) landasan filosofis, (2) landasan psikologis, (3) landasan sosiologis, (4) landasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (5) landasan organisatoris.

1. Landasan Filosofis

Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang

⁶⁷ Zainal Arifin, Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum.(Bandung:Pt. Remaja Rosdakarya. Hlm 12 .

⁶⁸ Nana Syaodih Sukmadinata⁶⁸ ; Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Cetaan ke 12 (Bandung: PT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinteraksikan serta proses bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan terdidik, apa isi pendidikan dan bagaimana proses pendidikannya, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban mendasar dan esensial yaitu jawaban filosofis.

Secara harfiah filosofis (*filsafat*) berarti cinta akan kebijakan-kebijakan (*love of wisdom*). Orang-orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan berbuat bijak, untuk dapat mengerti kebijakan dan berbuat secara baik, ia harus tahu atau berpengetahuan.⁶⁹

Dalam kajian filsafat terdapat banyak aliran. Usaha-usaha pengembangan kurikulum tidak dapat terlepas dari pengaruh aliran filsafat yang dianutnya. Aliran-aliran filsafat pendidikan yang mendasari pendidikan termasuk dalam penyusunan kurikulum menurut Brameld, dapat diklasifikasikan menjadi empat aliran, yaitu: *progresifisme*, *esensialisme*, *perennialisme* dan *rekonstruksionisme*.⁷⁰

Progresifisme berpendirian bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 224



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekan atau mengancam keberadaan manusia dalam usahanya untuk mengalami kemajuan atau progres.⁷¹ Karena itu ilmu pengetahuan yang dapat menumbuhkan kemajuan atau progres adalah bagian yang utama dari kebudayaan.

Pengetahuan adalah pengalaman-pengalaman yang telah dipolakan, diatur dan diorganisasikan sedemikian rupa.⁷² Pengetahuan bersifat rasional, empirik dan dapat ditingkatkan menjadi kebenaran. Dengan demikian kurikulum pendidikan menurut progresifisme bersifat eksperimental, mempertinggi kecerdasan, dan memandang peserta didik sebagai kesatuan jasmani, rohani serta manifestasinya sebagai tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalaman.⁷³ Metode ini bukan suatu keharusan mutlak, yang jelas metode harus fleksibel dan menimbulkan inisiatif kepada para siswa.⁷⁴

Esensialisme berpendirian bahwa pendidikan berfungsi sebagai pemelihara kebudayaan, karena itu pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai esensial kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Kebudayaan itu bersumber dari ajaran para filosof, ahli ilmu pengetahuan yang memiliki nilai-

⁷¹ Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, (Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta, 1982), hlm.

⁷² *Ibid*, hlm. 30.

⁷³ *Ibid*, hlm. 35.

⁷⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *op. cit.*, hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai yang bersifat kekal dan monumental yang telah teruji oleh sejarah.⁷⁵

Manusia dalam pandangan esensialisme adalah makhluk yang padanya berlaku hukum mekanistik evolusionistik di samping merupakan refleksi dari Tuhan.⁷⁶ Oleh karenanya perbuatan manusia dapat dipahami sebagai konvergensi antara pembawa-pembawa sosiologis dan pengaruhnya dari lingkungan.⁷⁷

Sedangkan perenialisme muncul sebagai reaksi terhadap kebudayaan manusia yang sedang krisis. Aliran ini memberikan pemecahan dengan jalan kembali kepada prinsip umum yang telah menjadi dasar tingkah laku dan perbuatan zaman kuno dan abad pertengahan. Dalam arti kepercayaan-kepercayaan aksiomatis mengenai pengetahuan, realitas dan nilai dari zaman tersebut.⁷⁸ Sikap ini bukan nostalgia, melainkan berkeyakinan bahwa nilai-nilai asasi tersebut mempunyai kedudukan vital bagi pembangunan kebudayaan abad sekarang.

Pengetahuan menurut perenialisme adalah hasil persatuan dunia luar dengan indera yang telah diolah oleh budi manusia. Budi adalah kemampuan manusia yang tinggi yang mempunyai cita-cita untuk menuju kepada kebenaran sejati yang

⁷⁵ Imam Barnadib, *op. cit.*, hlm. 48.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber pada Tuhan.⁷⁹ Sesuatu dikatakan memiliki kebenaran sejati manakala menunjukkan adanya persesuaian antara pikir dengan benda-benda dalam arti esensi. Metode efektif untuk menuntun orang sampai pada kebenaran hakiki adalah penalaran,⁸⁰ baik itu bersifat induktif, deduktif maupun perpaduan dari keduanya.

2. Landasan Psikologis

Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Yang dimaksud kondisi psikologis adalah karakteristik fisik-fisik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya.⁸¹ Merujuk pada taksonomi jiwa yang dikonsepsi oleh Blomm, perilaku dapat diidentifikasi menjadi tiga, yakni perilaku kognitif, perilaku efektif dan perilaku psikomotorik. Kondisi psikologis setiap individu berbeda karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial budaya juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari lahir.

Perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dialami anak sebagian besar karena usaha belajar, baik melalui proses imitasi, pengingatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan maupun pemecahan masalah. Cara belajar mengajar mana yang dapat

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 64.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 68.

⁸¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *op. cit.*, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan hasil secara optimal serta bagaimana proses pelaksanaannya membutuhkan studi yang sistematik dan mendalam. Studi yang demikian merupakan bidang pengkajian dari psikologi belajar.⁸²

Jadi minimal ada dua bidang psikologis yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Keduanya sangat diperlukan baik di dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran serta teknik-teknik penilaian.

Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan sperma dengan sel telur sampai dengan dewasa.⁸³ Dalam pembahasan ini dapat ditemukan prinsip-prinsip perkembangan anak, pola perkembangan anak serta karakteristik individu pada tahap perkembangan tertentu.

Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menetapkan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasaan dan kedalaman bahan pelajaran sesuai dengan taraf perkembangan anak. Adanya jenjang atau tingkat pendidikan dalam sistem persekolahan merupakan satu bukti bahwa psikologi

⁸²*Ibid*, hlm. 46.

⁸³*Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan menjadi landasan dalam pendidikan, khususnya kurikulum. Psikologi perkembangan bermanfaat bagi penyesuaian isi kurikulum agar sesuai dengan taraf perkembangan anak.

3. Landasan Sosiologis

Kita tahu bahwa pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan dalam masyarakat pula. Oleh karena itu kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya harus menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi penyusunan kurikulum sebagai rancangan pendidikan. Artinya tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan sistem sosial budaya, lingkungan alam, serta sarana dan prasarana yang ada.

4. Landasan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung menuntut perkembangan pendidikan. Pengaruh langsung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memberikan isi atau materi yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan dalam pendidikan dan mempengaruhi proses pendidikan. Pengaruh tak langsung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menyebabkan perkembangan masyarakat, dan perkembangan masyarakat menimbulkan problem-problem baru yang menuntut pemecahan dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan baru yang dikembangkan dalam pendidikan⁸⁴. Untuk penyusunan kurikulum, Hilda Taba⁸⁵ menegaskan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ilmu pengetahuan, yaitu *the nature of knowledge* dan *the content of dicipline*.

Landasan ini berkenaan dengan teknologi/media yang digunakan, antara lain bagaimana bahan pelajaran akan disajikan apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, atau diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, atau diusahakan adanya hubungan secara lebih mendalam dengan menghapus segala batas-batas mata pelajaran, jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu.

2. Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Pengembangan kurikulum penting untuk meningkatkan keberhasilan sistem pendidikan secara menyeluruh. Sekolah yang tidak kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kurikulum akan

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 78.

⁸⁵ Hilda Taba: Curriculum Development Theory and Practice; Penerbit New York : Hoarcourt Brace Jovanovich 1962.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin tertinggal dan ditinggal oleh peserta didik dan masyarakat dunia kerja. Begitu juga kurikulum dalam dunia pendidikan dan pelatihan aparatur, harus terus berkembang agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan kompetensi kerja pegawai, perkembangan teknologi dan informasi, serta perkembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundangan.

Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Untuk itu, kurikulum perlu di-*manage*, dirancang, dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, sehingga bangsa Indonesia memiliki daya saing dengan negara lain dalam berbagai bidang. Untuk bidang pemberdayaan aparatur negara, kurikulum menempati peran penting dalam membentuk sumber daya manusia aparatur yang berkualitas.

Menurut Tyler,⁸⁶ ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum: Pertama, berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai; kedua, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan; ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar; dan keempat berhubungan dengan evaluasi. Model ini menekankan pada empat pertanyaan, yaitu:

⁸⁶Tyler, Ralph W. 1978. *Basic Principles of Curriculum and Instructions*. Chicago–London. The University of Chicago Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *What educational purposes should the school seek to attain? (objectives).*
2. *What educational experiences are likely to attain these objectives? (instructional strategic and content).*
3. *How can these educational experiences be organized effectively? (organizing learning experiences).*
4. *How can we determine whether these purposes are being attain? (assessment and evaluation).*

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan.⁸⁷ Perencanaan kurikulum⁸⁸ adalah langkah awal membangun kurikulum ketika penyusun kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh para pendidik dan peserta didik (termasuk Widyaiswara dan peserta diklat). Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam Tindakan operasional.

Evaluasi kurikulum merupakan tahap berikutnya dari pengembangan kurikulum, untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Terakhir adalah

⁸⁷ *Ibid*, hal 8

⁸⁸ *Ibid*, hal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan berkelanjutan pengembangan kurikulum itu sendiri sebagai tindak lanjut hasil evaluasi.

Sebagai suatu dokumen tertulis, kurikulum tidak bersifat menetap atau abadi. Sebagaimana layaknya suatu dokumen yang berisi rancangan tindakan, maka rancangan-rancangan itu sendiri perlu selalu disesuaikan dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang terkait dengan peserta didik dan pendidik termasuk peserta diklat, Widyaiswara, teknologi pembelajaran, tuntutan masyarakat dan keilmuan serta peraturan perundangan.

Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan dan pelatihan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang, seperti politikus, pengusaha, pengguna lulusan diklat, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur.

Pengembangan kurikulum merupakan proses perbaikan, peningkatan, penyesuaian, pembaharuan tujuan, dan bahan pembelajaran yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan peserta didik. Agar pengembangan kurikulum dapat terarah sesuai dengan rencana pengembangan sumber daya manusia, maka perlu dikelola dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ferry firdaus⁸⁹, menguraikan berbagai model pengembangan kurikulum yang dikenal selama ini, khususnya pada Lembaga Pendidikan dan pelatihan, yaitu: *Model Administratif*, *Model Grass Roots*, *Model Demonstrasi*, *Model Beauchamp*, *Model Inverted*; *Model Tyler*, dan *Model Interpersonal Relation*, seperti yang diuraikan dalam lingkup pendidikan dan pelatihan aparatur di bawah ini:

1) *Model Administratif Smith, Stanley, Shores*

Model Administratif Smith, Stanley, Shores, merupakan pengembangan kurikulum yang menggunakan atas bawah, lini staf (*top-down, line-staff procedure*). Inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas (*superintendent*). Pejabat tersebut membuat keputusan tentang kebutuhan suatu program pengembangan kurikulum dan implementasinya, lalu mengadakan pertemuan dengan staf lini (bawahannya) dan meminta dukungan dari instansi pembina diklat (kepemimpinan, teknis, dan fungsional). Langkah berikutnya adalah membentuk suatu panitia pengarah yang terdiri dari pejabat administratif tingkat atas, seperti pimpinan lembaga diklat, pejabat struktural, dan Widyaiswara tertentu. Panitia pengarah merumuskan rencana umum, mengembangkan panduan kerja, dan menyiapkan rumusan filsafat dan tujuan diklat di lembaga diklatnya masing masing. Disamping itu, panitia pengarah dapat

⁸⁹ Ferry Firdaus; Pengembangan Kurikulum Kediklatan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikutsertakan organisasi diluar lembaga diklat/ pengguna lulusan diklat sebagai panitia penasihat yang bekerja bersama dengan lembaga diklat dalam rangka merumuskan berbagai rencana, petunjuk dan tujuan diklat yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan kurikulum.

Setelah kebijakan kurikulum dikembangkan, maka panitia pengarah memilih dan menugaskan Widyaiswara tertentu sebagai panitia pelaksana (panitia kerja) yang bertanggung jawab mengkonstruksikan kurikulum. Panitia ini merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus kurikulum, isi (materi), kegiatan-kegiatan pembelajaran dan sebagainya sesuai dengan pedoman/acuan kebijakan yang telah ditentukan oleh panitia pengarah. Panitia mengerjakan tugasnya diluar jam kerja biasa dan tidak mendapat kompensasi. Kondisi ini diterapkan karena berkaitan dengan tanggung jawab Widyaiswara untuk memahami dengan benar kurikulum dan meningkatkan mutu kurikulum itu sendiri.

Setelah panitia kerja (Widyaiswara) melaksanakan penyusunan kurikulum melalui proses tertentu, selanjutnya kurikulum yang dihasilkan tersebut direvisi oleh panitia pengarah atau panitia tingkat atas lainnya sesuai dengan maksud diadakannya reviu tersebut. Panitia ini melaksanakan berbagai fungsi-fungsi, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberi koherensi pada ruang lingkup dan urutan dalam program bidang studi dengan koordinasi bersama Widyaiswara masing- masing program diklat;
- b. Memeriksa kesesuaiannya dengan kebijakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh panitia pengarah;
- c. Menyiapkan gaya dan bentuk susunan material yang siap untuk dipublikasikan.

Rencana kurikulum yang telah direvisi dan final tersebut selanjutnya ditugaskan kepada suatu panitia yang terdiri dari para pejabat struktural dan Widyaiswara lain untuk melaksanakannya dalam rangka uji coba. Para pelaksana kegiatan ini adalah tenaga profesional yang tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum (mencakup filsafat rasional, tujuan dan metodologinya). Uji coba dilaksanakan dalam kondisi pengajaran senyatanya dan keefektifannya dimonitor dengan cara kunjungan kelas, diskusi, evaluasi peserta diklat dan alat-alat lainnya. Berdasarkan hasil uji coba dilakukan modifikasi, dan selanjutnya kurikulum baru tersebut diresmikan pelaksanaannya secara nyata dalam lembaga diklat. Kelemahan model ini terdapat pada tiga hal, yakni:

- a. Pada prinsipnya pengembangan kurikulum dengan model ini bersifat tidak demokratis, karena prakarsa, inisiatif dan arahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui garis staf hirarkis dari atas ke bawah, bukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari bawah ke atas.

- b. Pengalaman menunjukkan bahwa model ini bukan alat yang efektif dalam perubahan kurikulum secara signifikan, karena perubahan kurikulum tidak mengacu pada perubahan kebutuhan peserta diklat, melainkan semata-mata melalui manipulasi organisasi dengan pembentukan macam-macam kepanitiaan.
- c. Kelemahan lain dari model administratif ini adalah diterapkannya konsep dua fase, yaitu konsep yang mengubah kurikulum lama menjadi kurikulum baru melalui lembaga diklat dalam dua fase: fase penyiapan dokumen kurikulum baru oleh kepanitiaan inti; dan fase pelaksanaan dokumen kurikulum tersebut oleh kepanitiaan lainnya. Panitia inti biasanya lebih dominan dalam menentukan bentuk akhir dari kurikulum tersebut.

2) Model *Grass Roots* Smith, Stanley, Shores

Model *Grass Roots* (akar rumput) atau arus bawah, berbeda dengan rekayasa model administratif dalam beberapa hal yang berarti. Misalnya Model *Grass Roots* diawali oleh para Widyaisara dan staf pelaksana kegiatan diklat dengan menggunakan metode pembuatan keputusan kelompok secara demokratis dan dimulai dari bagian-bagian yang lemah (rusak) kemudian diarahkan untuk memperbaiki kurikulum tertentu (spesifik) atau mata diklat tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orientasi yang demokratis dari rekayasa Model *Grass Roots* dilandasi dengan dua aksioma pengembangan sebuah kurikulum:

- a. Bahwa sebuah kurikulum hanya dapat diterapkan secara berhasil apabila Widyaiswara dilibatkan secara intim dengan proses pembuatan (konstruksi) dan pengembangannya.
- b. Bukan hanya para pejabat struktural tetapi peserta diklat atau alumninya, pengguna lulusan diklat, staf pelaksana diklat lain juga harus dimasukkan dalam proses pengembangan kurikulum agar hasilnya bisa efektif.

Masalah validitas kedua klaim tersebut tidaklah perlu ditanyakan, yang diperlukan adalah definisi yang lebih tepat mengenai peran para pejabat struktural, Widyaiswara, peserta/alumni diklat dan staf pelaksana diklat lainnya dalam memerankan perannya di dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip Model *Grass Roots*

Widyaiswara adalah sebagai kunci dalam pengembangan kurikulum yang efektif, digambarkan pada 4 (empat) prinsip yang menjadi dasar Model *Grass Roots*, yaitu:

- a. Kurikulum akan baik apabila kemampuan profesional Widyaiswara baik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kompetensi Widyaiswara akan membaik apabila Widyaiswara terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perbaikan (revisi) kurikulum;
- c. Jika Widyaiswara urun rembuk dalam membentuk tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam memilih, mendefinisikan, memecahkan masalah yang akan dihadapi, mempertimbangkan dan menilai hasil maka keterlibatannya dalam proses pengembangan akan terjamin.
- d. Karena banyak pihak yang dilibatkan dalam Model *Grass Root*, mereka akan dapat memahami satu sama lain lebih baik dan untuk mencapai suatu konsensus berdasarkan prinsip-prinsip dasar, tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang lebih operasional dan lebih mudah diterapkan.

Prinsip ini jadi bersifat operasional, karena Widyaiswara didorong untuk bekerja secara kooperatif dalam merencanakan kurikulum baru. Dorongan terjadi bila pejabat struktural menyediakan kepemimpinan, waktu bebas, material dan rangsangan lain yang bersifat kondusif terhadap perencanaan kurikulum. Penyelenggaraan sebuah lokakarya oleh lembaga diklat akan memberikan kesempatan bagi pejabat struktural, Widyaiswara, peserta/alumni diklat, pengguna lulusan diklat dan pelaksana diklat untuk dapat mengembangkan kurikulum secara lebih efektif dan demokratis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Idealnya lokakarya itu mengidentifikasi berbagai persoalan para pejabat struktural, para Widyaiswara, peserta diklat, pengguna lulusan diklat dan pelaksana diklat dalam pelaksanaan kurikulum lama sehingga dapat melakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan untuk mengembangkan kurikulum baru. Para peserta lokakarya bekerja atas dasar masalah-masalah tersebut secara demokratis mencapai konsensus. Disini jelas sekali, karena Widyaiswara-Widyaiswara terlibat secara mendalam dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan, pengetahuan dan kesepakatan mereka merupakan suatu kebutuhan bagi prosedur implementasi khusus yang dinyatakan oleh model administratif. Perlu diingat disini para Widyaiswara terlibat dengan intim pada perencanaan dan pembuatan keputusan, pengetahuan, dan komitmennya dijadikan awal yang baik untuk memenuhi kebutuhan penerapan kurikulum baru tersebut.

Kelemahan rekayasa kurikulum Model *Grass Roots* ini adalah model ini menerapkan metode partisipasi yang demokratis dalam proses yang khusus, bersifat teknis yang kompleks. Biasanya proses ini memakan waktu yang cukup lama dalam mencapai konsensus. Ini tidak berarti bahwa konsesus sulit dan tidak perlu diperhatikan atau para Widyaiswara tidak boleh diberikan peran besar dalam pengembangan kurikulum. Ini hanya untuk menyatakan bahwa peran konsensus belum tentu menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam menjawab semua permasalahan yang dihadapi masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak dalam penerapannya nanti. Untuk itu kehati-hatian dalam proses pembentukan konsensus sangat diperlukan.

3) *Model Demonstrasi Smith, Stanley, Shores*

Menurut Smith, Stanley dan Shores, model demonstrasi dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Bentuk pertama, Widyaiswara-Widyaiswara ditugaskan dalam kelompok untuk melaksanakan suatu proyek pengembangan eksperimental kurikulum. Kelompok ini kemudian melakukan pengembangan dan riset internal lembaga diklat, dengan tujuan untuk menghasilkan pengembangan kurikulum terbaru, lalu didemonstrasikan kepada lembaga diklat dengan harapan dapat diserap oleh lembaga diklat secara keseluruhan. Jadi model ini dimulai dan diorganisasi oleh pimpinan lembaga diklat serta menyajikan suatu variasi model administratif pengembangan kurikulum seperti yang dibahas di model pertama.
- b. Bentuk kedua, model demonstrasi disusun kurang formal dibandingkan dengan model pertama. Beberapa orang Widyaiswara yang tidak puas terhadap kurikulum yang ada kemudian melakukan eksperimen dalam area tertentu dalam kurikulum dengan maksud menemukan alternatif pelaksanaan kurikulum. Berdasarkan eksperimen ini diciptakan unit-unit kurikulum yang dinilai berhasil oleh kelompok Widyaiswara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dan dikembangkan secara informal untuk kemudian didemonstrasikan untuk diterapkan oleh lembaga diklat. Jadi bentuk model demonstrasi ini mewakili pendekatan *Grass Roots* untuk merekayasa kurikulum. Kesimpulan model ini antara lain:

- a. Kurikulum yang dihasilkan melalui proses ini telah diuji dalam situasi-situasi eksperimental, dan oleh karenanya menyediakan alternatif kurikulum yang dapat dilaksanakan dalam praktik dalam lembaga diklat
- b. Perubahan dalam bentuk yang spesifik yakni segmen-segmen kurikulum yang dapat dilaksanakan memudahkan untuk menghadapi hambatan yang sering terjadi bila hendak melakukan revisi secara menyeluruh (kurikulum secara kesatuan)
- c. Hakikat model demonstrasi berskala kecil memudahkan pendekatan *front* terhadap inovasi kurikulum untuk menghindari kesenjangan antara dokumen dan pelaksanaannya yang ada pada model administratif
- d. Model demonstrasi khususnya dalam bentuk *Grass Roots* memanfaatkan inisiatif dan kreatifitas Widyaiswara dan memberdayakan sumber-sumber administratif untuk memenuhi kebutuhan dan minat Widyaiswara dalam upaya mengembangkan program-program baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerugian utama model demonstrasi ialah karena model ini menciptakan pertentangan-pertentangan di kalangan Widyaiswara. Widyaiswara yang tidak ikut serta dalam proses pengembangan kurikulum cenderung meragukan hasil yang dibuat oleh Widyaiswara yang melakukan eksperimen. Mereka menganggap kehandalan hasil eksperimen patut dipertanyakan. Perasaan dan sikap demikian pada gilirannya menghambat penerapan terhadap berbagai inovasi dalam kurikulum baru.

Karena itu suatu komponen yang penting pada model demonstrasi adalah perlu diadakannya komunikasi terbuka antara Widyaiswara yang melakukan eksperimen dengan komunitas Widyaiswara yang lebih besar lagi seperti organisasi profesi Widyaiswara, yang bertujuan untuk mencegah rasa keraguan/rasa tidak diikuti sertakan. Sebaiknya kelompok eksperimen melakukan serangkaian demonstrasi hasil-hasil pekerjaan mereka untuk memuaskan berbagai pihak, misalnya organisasi profesi Widyaiswara dan para peserta/alumni diklat sehingga inovasi kurikulum yang telah mereka lakukan bukan hanya eksperimental saja melainkan dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam lingkungan lembaga diklat.

4) Model Beauchamp

Model pengembangan kurikulum ini sesuai dengan nama orang yang menciptakannya yaitu seorang ahli kurikulum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernama Beauchamp. Menurut Beauchamp untuk merancang sebuah kurikulum harus ditempuh 5 (lima) langkah berikut:

a. Langkah Pertama

Pejabat yang berwenang dalam pengembangan kurikulum harus menentukan lebih dahulu lokasi atau wilayah yang akan dijadikan *pilot project* untuk pengembangan kurikulum. Pemilahan lokasi atau wilayah yang ditentukan sesuai dengan skala pengembangan kurikulum yang telah direncanakan. Bila kurikulum yang ingin dikembangkan berskala makro atau nasional, maka wilayah atau lokasi yang akan dijadikan *pilot project* adalah provinsi, seandainya bersifat daerah atau berskala mikro maka Kabupaten/Kota dapat dijadikan lokasi *pilot project*.

b. Langkah Kedua

Setelah wilayah atau lokasi yang akan menjadi *pilot project* sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menentukan personalia yang akan ikut terlibat di dalam pengembangan kurikulum. *Beauchamp* melibatkan orang-orang dari staf ahli kurikulum, pakar kurikulum dan Widyaiswara yang telah dipilih, pakar pendidikan, masyarakat yang dihimpun dari berbagai kalangan yaitu dari pengarang atau penulis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerbit, politikus, pejabat pemerintah, pengusaha dan industriawan.

c. Langkah Ketiga

Bila semua sumber daya manusia sudah disusun dengan baik maka langkah berikutnya adalah pengorganisasian orang-orang tersebut dalam 5 (lima) tim yang terdiri dari:

- 1) Tim pengembang kurikulum;
- 2) Tim peneliti kurikulum yang sedang dipakai atau sedang dipergunakan;
- 3) Tim untuk mempelajari kemungkinan penyusunan kurikulum baru;
- 4) Tim perumus untuk kriteria-kriteria kurikulum yang akan disusun;
- 5) Tim penyusun dan penulis kurikulum baru.

Sedangkan prosedur kerja yang akan dilalui adalah sebagai berikut:

- (a) Merumuskan tujuan baik tujuan umum maupun tujuan khusus;
- (b) Memilih atau menseleksi materi;
- (a) Menentukan pengalaman belajar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(b) Menentukan kegiatan dan evaluasi;

(c) Menentukan desain.

d. Langkah Keempat

Pada langkah ini ditentukan implementasi kurikulum.

Pelaksanaan kurikulum merupakan pekerjaan yang cukup rumit karena membutuhkan kesiapan dalam banyak hal, seperti Widyaiswara sebagai pelaksana kurikulum dikelas, fasilitas, peserta diklat, dana, manajerial pimpinan sekolah atau pejabat struktural sekolah.

e. Langkah Kelima

Setelah semua kebutuhan untuk kepentingan pelaksanaan atau implementasi terpenuhi dan sudah dapat dilaksanakan, maka langkah berikutnya yang merupakan langkah terakhir dari pengembangan kurikulum model *Beauchamp* adalah mengevaluasi kurikulum. *Beauchamp* mengemukakan hal-hal yang harus dievaluasi, yaitu:

- 1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh Widyaiswara;
- 2) Evaluasi terhadap desain kurikulum;
- 3) Evaluasi terhadap hasil belajar siswa (peserta diklat);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Evaluasi terhadap sistem dalam kurikulum;

Hasil dari kegiatan evaluasi ini akan dijadikan untuk penyempurnaan desain sistem serta prinsip-prinsip pelaksanaannya. Suatu hal yang perlu diingat bahwa pada tahap atau langkah kedua berupa organisasi dan prosedur, *Beauchamp* tampaknya menerangkan keterlibatan kelompok-kelompok profesi tersebut di atas, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Haruskah kelompok ahli, pejabat, profesi yang telah disebutkan di atas dilibatkan dalam pengembangan kurikulum.? Apabila jawaban dari pertanyaan tersebut ya, maka apa saja peranan mereka itu.? Apakah mungkin didapatkan alat dan teknik yang paling efektif untuk melakukan peran tersebut.? Dengan demikian tergambar bahwa sebaiknya wilayah atau lokasi *pilot project* diambil dari wilayah kecil saja atau sebaliknya, dan semakin kecil wilayah maka keterlibatan dan peranan Widyaiswara akan semakin besar. Widyaiswara harus berperan secara ikhlas dengan menunjukkan sikap dan rasa saling menghormati dalam melakukan kegiatan di luar jam pembelajaran.

5) *Taba's Inverted Model*

Model Pengembangan Kurikulum yang berikutnya adalah menggunakan model *Taba's Inverted Model*. Perekrayaan kurikulum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

model ini secara tradisional dilakukan oleh suatu tim yang dipilih. Tim ini bertugas:

- a. Mempelajari kebutuhan diklat dan mengembangkan rumusan tujuan pengembangan diklat;
- b. Merumuskan desain kurikulum secara menyeluruh berdasarkan tujuan diklat yang telah dirumuskan;
- c. Mengkonstruksi unit-unit kurikulum sesuai dengan desain kurikulum;
- d. Melaksanakan penerapan kurikulum diklat.

Taba mengajukan pandangan yang berlawanan dengan urutan tradisional dengan mengembangkan *inverted model*, yakni langkah awal dimulai dari perencanaan unit-unit mengajar-belajar yang spesifik oleh para Widyaaiswara, bukan diawali dengan desain kerangka (*framework*) yang umum. Unit-unit tersebut diuji/dilaksanakan dalam kelas, yang ada pada gilirannya digunakan sebagai dasar empirik untuk menentukan desain yang menyeluruh (*overall design*). Keuntungan digunakannya *inverted sequence* ini ialah:

- a. Membantu untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik karena produksi unit-unit tadi mengkombinasikan kemampuan teoritik dan pengalaman praktis.
- b. Kurikulum yang terdiri dari unit-unit mengajar-belajar yang disiapkan oleh Widyaaiswara lebih mudah diterapkan di lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diklat, berarti lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan kurikulum yang umum dan abstrak yang dihasilkan oleh urutan pengembangan kurikulum tradisional.

- c. Kurikulum yang terdiri dari kerangka umum dan unit-unit belajar-mengajar lebih berpengaruh terhadap praktik kelas dibandingkan dengan kurikulum yang ada.

Langkah-langkah pengembangan kurikulum Hilda Taba⁹⁰. mengemukakan perekayasaan kurikulum terdiri atas 5 (lima) langkah berurutan, yaitu:

- a. Langkah Pertama, *Experimental Production of Pilot Units*
Kelompok Widyaiswara membuat unit eksperimen sebagai ajang untuk melakukan studi tentang hubungan teori dan praktik. Untuk itu diperlukan: (1) Perencanaan yang didasarkan atas teori yang kuat; (2) Eksperimen di dalam kelas yang dapat menghasilkan data empiris untuk menguji landasan teori yang digunakan. Hasil dari langkah ini berupa unit belajar dan pembelajaran yang masih bersifat *draft* yang siap diuji pada langkah berikutnya. Unit eksperimen ini dirancang melalui 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Diagnosing needs*

⁹⁰ Taba, Hilda. 1962. *Curriculum Development; Theory and Practice*. New York. Harcourt Brace & World, Inc.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widyaiswara mengidentifikasi masalah-masalah, kondisi, kesulitan serta kebutuhan-kebutuhan peserta diklat dalam suatu proses pengajaran. Lingkup diagnosis tergantung pada latar belakang program yang akan direvisi, termasuk di dalamnya tujuan konteks dimana program tersebut diterapkan.

2) *Formulating Specific Objectives*

Formulasi tujuan-tujuan khusus, sebagai penjabaran dari tujuan umum yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi yang menjadi titik berat pada unit pembelajaran.

3) *Selecting Content*

Pemilihan isi (mata diklat) berdasarkan kesepadanan dengan tujuan khusus, dan harus mempertimbangkan tingkat validitas dan signifikansinya. Karena itu perlu dilakukan seleksi terhadap tingkatan isi (materi) yang meliputi pemilihan topik utama, pemilihan ide-ide dasar dan pemilihan materi khusus.

4) *Organizing Content*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengorganisasian materi pembelajaran pada setiap mata diklat dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan awal peserta diklat. Pengorganisasian isi disusun dari konkret ke abstrak dan dari mudah ke sulit.

5) *Selecting Learning Experiences (Activities)*

Pengalaman belajar disusun dengan maksud terjadi interaksi antara peserta diklat dan materi pembelajaran. Karena setiap materi memiliki beberapa fungsi tertentu, maka perlu dilakukan penyeleksian pengalaman belajar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Apakah kegiatan sesuai untuk mempelajari ide-ide utama.
- b) Apakah kegiatan dapat mencapai tujuan pembelajaran tiap unit.
- c) Apakah kegiatan efisien untuk melayani lebih dari satu tujuan.
- d) Apakah kegiatan dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran.
- e) Apakah kegiatan dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan peserta diklat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) *Organizing Learning Experiences Activities*

Pengalaman belajar peserta diklat disusun dan diorganisasikan dengan sekuensi dan materi organisasi (*content*). Kegiatan pembelajaran peserta diklat diarahkan dari induktif ke generalisasi dan abstraksi serta difokuskan pada pengembangan ide-ide utama, langkah-langkah perolehan konsep dan perilaku yang baik.

7. Evaluating

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta diklat. Hasil evaluasi berguna untuk menentukan tujuan, diagnosis kesulitan belajar, serta penilaian dalam rangka pengembangan berkelanjutan dan revisi kurikulum.

8) *Checking for Balance and Sequence*

Setelah garis besar program pembelajaran dirancang lengkap, selanjutnya perlu dicek konsistensi antara semua bagian yang berkenaan dengan keseimbangan dan urutan topik-topik yang telah tersusun atau unsur-unsur dalam unit pembelajaran tersebut.

b. Langkah Kedua, *Testing of Experimental Units*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teaching-learning units yang dihasilkan pada langkah pertama perlu diujicobakan di kelas-kelas eksperimen pada berbagai situasi dan kondisi belajar. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan keyakinan terap bagi Widyaiswara yang berbeda-beda gaya mengajar dan kemampuan melaksanakan pengajaran unit. Hasil uji coba menjadi masukan bagi penyempurnaan *draft* kurikulum.

c. Langkah Ketiga, *Revising and Consolidating*

Revisi dan penyempurnaan *draft* kurikulum dilakukan berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selama langkah pengujian. Pada langkah ini dilakukan pula penarikan kesimpulan (konsolidasi) tentang konsistensi teori yang digunakan. Langkah ini dilakukan bersama oleh koordinator kurikulum dan ahli kurikulum. Produk langkah ini berupa materi materi pembelajaran yang telah teruji di lapangan. Bila hasilnya sudah memadai, maka materi materi tersebut dapat disebarakan dalam lingkup yang lebih luas.

d. Langkah Keempat, *Developing a Framework*

Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum dilakukan guna menjamin:

- 1) Apakah ide-ide dan konsep-konsep dasar yang digunakan telah terakomodasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apakah lingkup isi telah memadai;
- 3) Apakah isi telah tersusun berurutan secara logis;
- 4) Apakah aktivitas pembelajarannya memberikan peluang untuk pengembangan keterampilan intelektual dan pemahaman emosi secara kumulatif.

Pengembangan ini dilakukan oleh ahli kurikulum dan para profesional kurikulum lainnya. Produk dari langkah-langkah ini adalah dokumen kurikulum yang siap untuk diimplementasikan dan diidentifikasi.

d. Langkah Kelima, Penerapan dan Diseminasi Kurikulum Baru

Penerapan dan desiminasi adalah peresmian dan penyebarluasan kurikulum hasil pengembangan, sebagai sub sistem pada sistem pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh. Tanggung jawab tahap ini dibebankan pada pejabat struktural lembaga diklat. Penerapan kurikulum merupakan tahap yang ditempuh dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Pada tahap ini harus diperhatikan berbagai masalah, seperti: kesiapan tenaga pengajar untuk melaksanakan kurikulum di kelasnya, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, alat atau bahan yang diperlukan dan biaya yang tersedia. Semuanya perlu mendapat perhatian dalam penerapan kurikulum agar tercapai hasil optimal.

6) Model Tyler

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Basic Principles of Curriculum*, Tyler merumuskan empat pertanyaan sentral yang meminta jawaban secara rasional bagi perencanaan kurikulum yaitu:

- a. Apa tujuan yang harus dicapai oleh diklat.
- b. Apa pengalaman-pengalaman pembelajaran yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- b. Bagaimana mengorganisasikan pengalaman-pengalaman tersebut.
- c. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan, bahwa perencanaan kurikulum dapat menjadi suatu proses yang dikontrol dan logis, dimana langkah pertama adalah yang paling penting. Dengan kerangka kerja ini, publik dapat menilai lembaga diklat dengan membandingkan antara tujuan-tujuan dengan hasil yang dicapai.

Pengembangan kurikulum model *Tyler* ini mungkin yang terbaik, dengan penekanan khusus pada fase perencanaan. Walaupun Tyler mengajukan model pengembangan kurikulum secara komprehensif tetapi bagian pertama dari modelnya (seleksi tujuan) menerima sambutan yang hangat dari para *educator*.

Langkah-langkah pengembangan kurikulum:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Langkah 1: Tyler merekomendasikan, bahwa perencana kurikulum agar mengidentifikasi tujuan umum (*tentative general objectives*) dengan mengumpulkan data dari tiga sumber, yaitu: kebutuhan peserta diklat, masyarakat (keahlian yang diperlukan) dan substansi bidang.
- b. Langkah 2: Setelah mengidentifikasi beberapa tujuan umum, perencana memantapkannya dengan cara menyaring melalui dua saringan, yaitu filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Hasilnya akan menjadi tujuan pembelajaran khusus dan menyebutkannya juga pendidikan sekolah dan filosofi masyarakat sebagai saringan pertama untuk tujuan ini. Selanjutnya perlu disusun garis-garis besar nilai-nilai yang di dapat dan mengilustrasikannya dengan memberi tekanan pada empat tujuan demokratis.

Untuk melaksanakan penyaringan, para pendidik harus menjelaskan prinsip-prinsip belajar yang baik, dan psikologi belajar memberikan ide mengenai jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan waktu untuk melaksanakan kegiatan secara efisien. Tyler pun menyarankan agar Widyaaiswara memberi perhatian kepada cara belajar yang dapat:

- a. Mengembangkan kemampuan berpikir;
- b. Menolong dalam memperoleh informasi;
- c. Mengembangkan sikap masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengembangkan minat;
 - e. Mengembangkan sikap kemasyarakatan.
- c. Langkah 3: Menyeleksi pengalaman belajar yang menunjang pencapaian tujuan. Penentuan pengalaman belajar harus mempertimbangkan persepsi dan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik.
- d. Langkah 4: Mengorganisasikan pengalaman ke dalam unit-unit pembelajaran dan menggambarkan berbagai prosedur evaluasi.
- e. Langkah 5 : Mengarahkan dan memfasilitasikan pengalaman - pengalaman belajar dan mengaitkannya dengan evaluasi terhadap keefektifan perencanaan dan pelaksanaan.
- f. Langkah 6: Evaluasi pengalaman belajar. Evaluasi merupakan komponen penting dalam pengembangan kurikulum.

Sehubungan dengan hal tersebut Tyler memperingatkan agar dibedakan antara konten (isi) pelajaran atau kegiatan-kegiatan belajar dengan pengalaman-pengalaman belajar, karena pengalaman belajar merupakan pengalaman yang diperoleh dan dialami peserta diklat sebagai hasil belajar dan interaksi mereka dengan konten (isi) dan kegiatan belajar. Untuk mengembangkan pengalaman belajar yang mereka peroleh harus bermuara pada pemberian pengalaman untuk para peserta diklat yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan benar. Dari beberapa konsepsi kurikulum di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas terlihat bahwa kurikulum dapat dilihat dari segi yang sempit atau dari segi yang luas (sebagai pengalaman yang diperoleh di sekolah atau diluar sekolah).

7) *Rogers Model of Interpersonal Relation*

Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang memiliki ide-ide yang penting perannya dalam teori dan praktik para spesialis kurikulum. Dia sangat terkenal dengan pendekatan "*non-directive*" dan "*humanistic*" dalam pengajaran dan perencanaan kurikulum.

Rogers memperluas tentang konsepsi terapi sebagai suatu model belajar untuk pendidikan. Ia percaya bahwa hubungan antar insani yang positif memungkinkan orang tumbuh dan oleh karenanya pengajaran harus berdasarkan konsep *human relation* bukan pada mata pelajaran. Widyaiswara dalam konteks ini lebih berperan sebagai fasilitator yang memiliki *personal relationship* dengan peserta diklat dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan mereka⁹¹.

Selajalan dengan pendapat Rogerts tersebut, Muriel Crosby⁹² dalam bukunya yang berjudul "*Who Changes the Curriculum*" dan diterbitkan oleh Allyn & Bacon Publishers pada tahun 1970 mengungkapkan: "perubahan kurikulum adalah perubahan manusia" (*Curriculum change is people change*) sangat berkaitan erat dengan konsep yang dikemukakan Carl Rogers melalui model

⁹¹ Bruce Joyce; 1970. *Who Changes the Curriculum*. London. Alice and Bacon

⁹² Murriel, Crosby. 1970. *Who Changes the Curriculum*. London. Alice and Bacon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan kurikulum yang berpusat pada perubahan manusia (*people change*).

Menurut Carl Rogers ⁹³, bahwa manusia berada dalam proses perubahan (*becoming, developing, changing*) dan sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi berhubung ada hambatan-hambatan, maka ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Salah satu cara untuk proses itu adalah melalui proses pendidikan, sebab pendidikan merupakan upaya untuk memperlancar dan mempercepat perubahan pada diri manusia, Widyaiswara serta unsur-unsur pendidik lainnya bukan sebagai pemberi informasi atau penentu perkembangan peserta didik, tetapi mereka hanya pendorong dan yang memperlancar perkembangan individu yang belajar. Dengan model pengembangan kurikulum *interpersonal relation* ini, Carl Rogers berpendapat, bahwa kurikulum diperlakukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luwes dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum tersebut hanya dapat disusun dan diterapkan oleh unsur-unsur pendidikan serta yang lainnya yang terbuka, luwes dan berorientasi pada proses. Untuk itu diperlukan pengalaman kelompok dalam latihan sensitif (*sensitivity*

⁹³ Menurut Carl Rogers: 1957. *Fundamental of Curriculum Development*. New York; Harcourt, Brace, and World.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

training). Ada empat tahap dalam pengembangan kurikulum model *Rogers Interpersonal Relation*, yaitu:

a. Pemilihan suatu target sistem pendidikan

Penentuan target ini berdasarkan kriteria yang menjadi pegangan yakni adanya kesediaan dari pejabat struktural/pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok secara intensif. Selama satu minggu para pejabat struktural/pejabat pendidikan melakukan kegiatan kelompok dalam suasana yang rileks/tidak formal, untuk itu diperlukan suatu tempat khusus yang agak terpisah jauh dari kehidupan kerja.

Melalui kegiatan kelompok itu, mereka akan mengalami perubahan- perubahan sebagai berikut:

- 1) Tidak terlalu mempertahankan pendiriannya, sehingga dapat menerima saran orang lain;
- 2) Lebih mudah untuk menerima ide-ide pembaharuan;
- 3) Mampu mengurangi kekuasaan birokratis;
- 4) Komunikasinya lebih jelas serta realistis terhadap atasan, teman sebaya dan bawahan;
- 5) Lebih berorientasi pada sifat kemanusiaan dan demokratis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Lebih terbuka untuk menyelesaikan perselisihan antar sesama anggota kelompok;
- 7) Lebih mampu untuk menerima saran dan kritik demi perbaikan.

b. Pengalaman kelompok yang intensif bagi Widyaiswara.

Pertemuan selama seminggu atau pertemuan yang diadakan dalam minggu akhir yang panjang perlu diadakan untuk saling mengenal antar sesama peserta. Dalam pertemuan tersebut diharapkan terjadi pertukaran informasi. Demikian pula Widyaiswara yang skeptis dan menentang mungkin akan melihat pembaharuan dari sisi lain, sehingga kemungkinan besar terjadi perubahan sikap menerima.

Keikutsertaan Widyaiswara dalam kelompok sebaiknya bersifat sukarela. Efek yang akan diterima Widyaiswara sama dengan para pejabat struktural pendidikan, dengan beberapa tambahan sebagai berikut:

- 1) Lebih mampu untuk mendengarkan keluhan peserta diklat;
- 2) Mau menerima pembaharuan melalui kegiatan- kegiatan yang dilakukan bersama peserta diklat dalam kelas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sangat perhatian terhadap hubungannya dengan peserta diklat, begitu juga yang dilakukannya terhadap isi mata pelajaran;
- 4) Masalah yang timbul dipecahkan bersama dengan peserta diklat dan tidak melalui tindakan hukuman;
- 5) Mampu mengembangkan suasana kesamaan hak dan kewajiban sehingga timbul suasana demokratis di dalam kelas.

c. Pengembangan pengalaman kelompok yang intensif bagi kelas.

Caranya mengikutsertakan satu unit kelas dalam pertemuan lima hari. Selama lima hari penuh peserta diklat ikut serta dalam kelompok secara aktif, dengan fasilitator, para Widyaiswara, pejabat struktural pendidikan, dan pejabat struktural dari luar (atasan peserta). Dengan kegiatan itu diharapkan menumbuhkan suasana hubungan yang baik antara setiap individu yang satu dengan yang lain, perubahan yang terjadi pada diri peserta diklat adalah :

- 1) Merasa bebas mengemukakan pendapatnya di dalam kelas;
- 2) Semangat untuk belajar bertambah, karenanya timbul persaingan yang sehat untuk menjadi lebih kompeten;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memiliki tenggang rasa dalam hubungan antar peserta diklat di dalam pergaulan sehari-hari;
 - 4) Tidak mempunyai rasa tertekan karena tidak mengenal istilah hukuman yang bersifat fisik;
 - 5) Rasa hormat dan patuh pada Widyaiswara maupun administrator karena adanya wibawa.
 - 6) Mempunyai anggapan bahwa dengan belajar akan mampu menghadapi tantangan pekerjaan pada masa yang akan datang.
- d. Keterlibatan pimpinan peserta dalam pengalaman kelompok yang intensif.

Kegiatan ini dapat dikoordinasi oleh pimpinan peserta pada masing-masing instansi. Kegiatan kelompok berlangsung selama tiga jam tiap sore selama satu minggu atau dua puluh satu jam selama tiga hari terus menerus. Jika memungkinkan, pertemuan demikian agar berbarengan dengan pertemuan substansi di kelas.

Tujuan utama kegiatan ini adalah supaya orang tua, staf pengajar dan pimpinan sekolah atau pejabat struktural pendidikan lainnya dapat saling mengenal secara pribadi sehingga memudahkan pemecahan-pemecahan persoalan-persoalan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi dunia pendidikan, khususnya di lembaga diklat. Carl Rogers juga menyarankan, jika mungkin ada pengalaman kegiatan kelompok yang bersifat campuran kulminasi dari model interpersonal adalah diselenggarakannya kelompok-kelompok vertikal (*vertical groups*) yang diikuti oleh berbagai macam kepesertaan. Perubahan kurikulum yang berhasil dapat dicapai bila ada hubungan efektif secara horizontal dan *across status-role lines*.

Saran Carl Rogers tersebut adalah perlunya diadakan pertemuan vertikal yang mendobrak hirarki birokrasi dan status sosial. Peserta kegiatan tersebut terdiri dari dua orang pejabat struktural, dua orang pimpinan peserta, dua orang Widyaiswara dan dua orang peserta diklat.

Kebaikan dan Kelemahan Pengembangan Kurikulum Model Rogers *Interpersonal Relation*. Model pengembangan kurikulum ini mengutamakan hubungan antar pribadi yaitu penciptaan suasana akrab antar unsur-unsur pendidikan yang terlibat di dalam pengembangan kurikulum, yaitu: administrator, pimpinan, peserta Widyaiswara-Widyaiswara serta para peserta diklat, dengan harapan antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sedikit kemungkinan terjadinya tekanan kendala yang bersifat menghambat, sehingga diharapkan dapat menerapkan kurikulum yang lebih besar.
- 2) Masing-masing unsur pendidikan khususnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu para Widyaiswara tidak ragu mengemukakan pendapat dan gagasannya dalam pengembangan kurikulum.
- 3) Tidak timbul adanya dominasi kuat dari pihak "pusat/atas" untuk memaksakan kehendak politik di bidang pendidikan khususnya pengembangan kurikulum.

Adapun hal yang dapat dianggap sebagai tanda-tanda kelemahan/kekurangan pada model *Rogers Interpersonal Relation* dalam pengembangan kurikulum antara lain:

- 1) Tampaknya tidak ada batas hubungan antara peserta diklat dengan Widyaiswara atau unsur pendidik lainnya, sehingga dikhawatirkan lunturnya rasa hormat pada diri peserta diklat.
- 2) Memerlukan waktu yang lama dan sulit ditargetkan untuk penyelesaian secara tuntas dalam penyusunan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan kurikulum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Memerlukan biaya yang tidak sedikit, mengingat banyaknya unsur yang terlibat serta jenis kegiatan yang dilakukan.

4) Keterlibatan berbagai unsur pendidikan dalam proses pengembangan kurikulum tersebut, kemungkinan besar mengakibatkan kesulitan dalam pengorganisasiannya.

Ferry Firdaus⁹⁴. menegaskan bahwa dari Dari semua model pengembangan kurikulum di atas, dapat dilihat bahwa sistem diklat yang dianut oleh lembaga diklat selama ini sangat dipengaruhi oleh *Taba's Inverted System* yang mengemukakan pentingnya proses siklus yang dimulai dari penilaian kebutuhan diklat; perumusan tujuan kurikulum; perancangan kurikulum; pelaksanaan kurikulum; dan pengevaluasian kurikulum untuk perbaikan secara berkelanjutan. Model ini dinilai paling tepat untuk memenuhi kebutuhan kompetensi peserta diklat sesuai dengan kebutuhannya; perkembangan peraturan perundangan; serta perkembangan teknologi dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari.

Merujuk pentingnya mendekatkan tujuan kurikulum dan kebutuhan nyata peserta diklat dalam melaksanakan tugasnya sehari hari, pengembangan kurikulum diklat yang menggunakan

⁹⁴ Ferry Firdaus; *Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingat Tinggi, pengembangan Kurikulum Diklat*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip *Taba's inverted system* sangat dianjurkan meskipun model-model lain juga dapat bermanfaat sesuai dengan tuntutan dan kondisi perubahan yang diinginkan. Untuk itu pembahasan lebih lanjut dalam modul ini akan lebih diarahkan pada pemanfaatan *Taba's inverted model*. Harapannya tentu dalam latihan nanti Widyaiswara dapat menggunakan model ini sebagai referensi utama dalam pengembangan kurikulum diklat.

2. Konsep Korupsi

a) Pengertian

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *Corruption* atau *Corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti: kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.⁹⁵

Menurut Faisal Kamal.⁹⁶ definisi korupsi di atas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husain Alatas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private*

⁹⁵ Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11

⁹⁶ Faisal Kamal ; *Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Al-Quran*; Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8 No. 12017 P. ISSN : 20869118, E-ISSN 2528-247. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gain”, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Sementara Urwatul Wutsaqoh.⁹⁷ menegaskan bahwa: Mengacu kepada *New World Dictionary of The American Language*, sejak abad pertengahan inggris dan Prancis suda menggunakan kata *Corruption* yang mengandung arti sebagai berikut:

- a) Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Perbuatan ini kemudian melahirkan sebuah anomaly bagi kehidupan sekitar.
- b) Perbuatan jahat dan tercela.
- c) Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidak jujuran.
- d) Kebusukan atau tengik.
- e) Suatu yang korup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.
- f) Pengaruh-pengaruh yang korup.

⁹⁷. Urwatul Wutsqah ; *Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Inovasi Pendidikan MH.Thamrin, Volume 3 nomor 2, Oktober 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak yang mana korupsi sungguh menggambarkan keadaan yang menyeramkan, menyedihkan rakyat, memberikan efek sangat buruk bagi keidupan, membuat kondisi menjadi labil, menciptakan kegaduhan hidup dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Oleh karena itu, korupsi sebuah penyakit yang sangat mematikan bagi kehidupan di republik ini yang ingin menghancurkan perjalanan bangsa kedepan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁹⁸ Korupsi berarti: buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam Islam sesuai dengan pandangan al-Qur'an dan al-Hadits bahwa korupsi adalah tindakan kriminal (jinayah atau jarimah) dimana bagi pelakunya melakukan kecurangan dan menipu,⁹⁹

⁹⁸ Depdikbud: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Dua Tahun 1995.

⁹⁹ Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firman-Nya, "كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَغْلَ وَمَنْ يَغْلَ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَمْ تُولَىٰ عَلَيْهِ نَفْسٌ مَّا كُفِّرَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khianat,¹⁰⁰ *risywah* (suap),¹⁰¹ *saraqah* (pencurian) al *gasysy* (penipuan) dan *khianat* (penghianatan) diancam dengan hukuman *hudud* (had) dan juga hukuman *ta'zir* sesuai hukum Islam yang berlaku¹⁰².

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pasal 2 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 31/1999, Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Definisi diperkuat pada pasal 3 bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah menyalah gunakan kewenangan, jabatan atau amanah(*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau

urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali Imran:161).

¹⁰⁰ ditegaskan Allah SWT dalam Alquran, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (QS. Al-Anfal: 103). "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (QS. Al-Anfal: 27).

¹⁰¹ Perbuatan ini oleh Nabi Muhammad saw. disebut laknat seperti dalam sabdanya, “Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.”(H.R. *Ahmad dan Hambali*). Pada kesempatan lain Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang telah aku pekerjaan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambilnya di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).” (H.R. *Abu Dawud*).

¹⁰² Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh Jinayah. Berikut ini akan dibahas beberapa jenis tindak pidana (korupsi) menurut Fiqh Jinayah (Irfan, 2012). Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terinci, baik yang terdapat dalam Al-quran maupun hadist. Secara terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau selain jiwa. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Alquran maupun hadist, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat yang terdiri dari: agama; jiwa; akal; kehormatan atau nasab; harta kekayaan maupun di luar pancajawa syariat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dan seharusnya Pendidikan Agama Islam mampu menjadi solusi dalam merealisasikan pendidikan antikorupsi tersebut.¹⁰³

Dengan demikian, yang dimaksud kurikulum antikorupsi adalah kurikulum untuk menyiapkan generasi bangsa atau peserta diklat dalam membentuk Pegawai Negeri sipil yang professional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat, memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang atau menolak segala bentuk korupsi.

Penelusuran makna korupsi lebih lanjut kita perhatikan dari uraian Syed Hussein Al Atas,¹⁰⁴ dalam *"The Sociology of Corruption"*. Menurut Syed Hussein Al Atas seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat. Oleh Syed Hussein Al Atas ciri-ciri korupsi diringkaskan sebagai berikut:

1. Suatu penghianatan terhadap kepercayaan;
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya;

¹⁰³ model pendidikan anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan anti korupsi yang dimaksud disini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada disekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pendidikan anti korupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam.

¹⁰⁴ Syed Hussein Al Atas. *Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi*, Terjemahan Nirwono, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). (Jakarta, 1987), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak;
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain;
7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya;
8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum.

b) Klasifikasi

Syed Hussein Al Atas,¹⁰⁵ lebih lanjut menjelaskan segi tipologi, korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis sebagaiberikut:

- a) *Korupsi transaktif (transactive corruption)*, Korupsi transaktif menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
- b) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap

¹⁰⁵Saiyid usayn al-A s; 17 September 1928 – 23 Januari 2007) adalah seorang akademisi, sosiolog, pendiri organisasi pengetahuan sosial, dan politisi Malaysia. Ia adalah Wakil Kanselor Universitas Malaya pada 1980an, dan membentuk Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

- c) Korupsi investif (*investive corruption*). Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
- d) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*). Korupsi perkerabatan atau nepotisme adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e) Korupsi defensif (*defensive corruption*). Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsi ini adalah dalam rangka mempertahankan diri.
- f) Korupsi otogenik (*autogenic corruption*). Korupsi otogenik yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri. Brooks mencetuskan subyek yang disebut "*auto corruption*" adalah suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang saja.
- g) Korupsi dukungan (*supportive corruption*). Korupsi dukungan. Korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

David M. Chalmers¹⁰⁶ dalam bukunya Baharuddin Loppa¹⁰⁷ menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang meliputi:

(a) *Material corruption*

1. *Financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt*
2. *The term is often applied also to misjudgements by officials in the public economic*
3. *Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relative, social influence, or any relationship that sacrifices the public interest and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt.*

(b) *Political corruption, Electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation and interference with freedom of election. Corruption in office involves sale of legislative votes,*

¹⁰⁶ David M. Chalmers pun mengemukakan pengertian korupsi yang merupakan penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan kepentingan umum. Sedangkan berdasarkan UU No. 31/1999 dan UU No.20/2001 pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri/badan orang lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2).

¹⁰⁷ Baharuddin Loppa, *Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Alumni, Bandung, 1990), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrative of judicial decision or governmental appointment.

(c) *Intellectual corruption.*

Intellectual Corruption diterangkan sebagai:

1. Seorang pengajar yang berkewajiban memberikan pelajaran kepada murid namun ia tidak memenuhi kewajibannya secara wajar;
2. Pegawai negeri yang selalu meninggalkan tugasnya tanpa alasan;
3. Manipulasi (membajak) hasil karya orang lain.

Disimpulkan oleh Baharuddin Loppa¹⁰⁸, jenis-jenis korupsi tersebut sebagai berikut:

- 1) Korupsi di bidang materiil suatu tindakan yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.
- 2) Korupsi di bidang politik. Dapat berupa/berwujud memanipulasi pemungutan suara dengan cara pengupaan, intimidasi, paksaan dan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan

¹⁰⁸ Baharuddin Loppa, *Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Alumni, Bandung, 1990), hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan.

c) Dasar Yuridis.

Peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan dalam pemberantasan korupsi sejak zaman reformasi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI NO. VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. UU NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. UU NO.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNO.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. UU NO.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005, tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. KEP. KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan, Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNITED National Convention Againsts Corruption, 2003.
10. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi.
11. UU NO.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2012, tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
13. PERKOM No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
14. PERKOM No. 02 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
15. PERMA NO 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi .
16. KEPMENAKER NO. 13 Tahun 2016 Tentang Penetapan SKKNI Penyuluh Antikorupsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara khusus yang membahas tentang tindak pidana korupsi tertuang dalam undang-undang¹⁰⁹, berdasarkan uraian di atas tentang jenis korupsi yaitu jenis korupsi materiil ialah korupsi yang menyangkut penyyuapan, memanipulasi di bidang keuangan/perekonomian negara, manipulasi yang merugikan kesejahteraan rakyat pada umumnya.¹¹⁰ Hal ini sebagaimana yang telah diatur dan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 a, b, c, d, e dan ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana korupsi materiil yang diuraikan di atas, tercakup dalam perumusan Pasal 1 ayat 1 a, b, c, d dan e dan Pasal ayat 2 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971.

- (a) Pasal 1 ayat 1 a melawan hukum dalam ayat ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan. Perkataan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana

¹⁰⁹ Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut tidak mendefinisikan korupsi secara eksplisit. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 hanya mengubah sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

¹¹⁰ Menurut pandangan NU, terdapat tiga unsur pokok suatu tindakan dapat diisbatkan makna korupsi. *Pertama*, adanya unsur tasharruf, tindakan yang bisa berarti menerima, memberi dan mengambil; *Kedua*, adanya penyalahgunaan terhadap mandat kekuasaan; *ketiga*, adanya unsur kerugian yang ditanggung oleh masyarakat, publik atau negara (Bambang Widjoyanto dkk.[ed.], 2010: 128). Pandangan tersebut selaras dengan unsur-unsur korupsi dalam rumusan Undang- undang No. 1 Tahun 1999, ayat 2 dan 3, yaitu “tindakan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun negara, dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan.”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korupsi.¹¹¹

- (b) Pasal 1 ayat 1 b memuat sebagai tindak pidana unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang ia peroleh karena jabatannya, dan unsur “secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara” serta dengan “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”.
- (c) Pasal 1 ayat 1 c istilah korupsi dalam Undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas, termasuk Pasal-pasal KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (12 Pasal).
- (d) Pasal 1 ayat 1 d mengancam dengan pidana seseorang yang memberikan hadiah kepada pegawai negeri juga mengancam pidana seseorang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri.
- (e) Pasal 1 ayat 1 e ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memidanakan seseorang yang tidak melaporkan pemberian atau janji yang diperolehnya dengan melakukan tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 418, 419, 420 KUHP.

Apabila tidak semua unsur dari tindak pidana¹¹² tersebut dipenuhi

¹¹¹Sejarah telah mencatat jejak-jejak penanganan korupsi. Sejarah Islam menunjukkan bahwa untuk menyiapkan pejabat public agar bersih dan bebas korupsi ada mekanisme khusus dan proses itu sangat ketat. Sabahat nabi yang paling konsisten melalui prosedur ini adalah Umar bin Khattab. “Setiap kali Umar mengangkat wali (pejabat) di suatu wilayah, dia wajibkan yang bersangkutan menghitung kekayaannya sebelum menerima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apa bila kekayaannya melebihi kewajiban (gaji), Umar memerintahkan untuk memasukan dalam kas negara (Bambang Widjoyanto dkk. [ed.], 2010: 21).

¹¹²Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli, menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhannya hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut E. Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pelaporan itu misalnya dilakukan dengan tujuan semata-mata agar supaya diketahui tentang peristiwa penyusunan, maka ada kemungkinan dapat melepaskan dari penuntutan berdasarkan ayat ini. Hal demikian tidak berarti bahwa tiap pelaporan tentang penerimaan pemberian/janji itu membebaskan terdakwa dari kemungkinan penuntutan, apabila semua unsur dari tindak pidana dalam Pasal 418, 419, 420 KUHP terpenuhi. a. Pasal 1 ayat 2 percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan pidana sama dengan ancaman bagi tindak pidana yang telah selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi, yang sangat merugikan keuangan/perekonomian negara, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan, sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

Adapun perumusan Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pada pasal-pasalanya sekaligus dicantumkan ancaman pidananya. Dalam pasal-pasal di bawah ini hanya ditunjuk rumusan tindak pidananya dan dapat disebut tentang jenis korupsinya adalah korupsi materiil¹¹³. Pasal-pasal terkait meliputi:

sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, 2009:26)

¹¹³ Korupsimateriil adalah korupsi yang berhubungan dengan materi atau keuangan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa jenis korupsi materiil ini yang sering dilakukan oleh pejabat administrasi negara dan menjadi penyakit birokrasi yang mengakar dan sulit disembuhkan. Korupsi materiil ini menjadi sumber utama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai buah dari tindakan-tindakan korupsi para pejabat administrasi negara terhadap keuangan negara baik di tingkat pejabat atasan sampai level bawahan. Pejabat atasan melakukan korupsi dengan menggelapkan dana proyek pembangunan, dan pejabat administrasi bawahan melakukan korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, dengan berdalih sebagai uang rokok ataupun uang lelah. Korupsi materiil ini tumbuh subur dan berkembang pesat pada masa orde

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2 ayat 1: “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 2 ayat 2: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara “.

Pasal 5 ayat 1 : Dipidana:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat 2 “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

baru dan bertahan sampai saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa hampir semua pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan diselimiuti oleh tindakan korupsi yang menggerogoti keuangan negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 6 ayat 1 Dipidana setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri suatu pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat 2 sebagai berikut: “Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut: Dipidana

- a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang dimaksud dalam huruf a;
- c) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

- d) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;

Pasal 7 ayat 2 Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8 dipidana Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 dipidana pegawai negeri¹¹⁴ atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

¹¹⁴ Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 10 dipidana Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11 dipidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12 dipidana:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- g. yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- j. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 B ayat 1 sebagai berikut dipidana, Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan ketentuan atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh penerima gratifikasi;

- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12 B ayat 2 sebagai berikut: Dipidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13 sebagai berikut dipidana Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana.

Pasal 14 sebagai berikut dipidana Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15 sebagai berikut dipidana setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16 sebagai berikut dipidana setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 20 ayat 1 sebagai berikut dipidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Pasal 20 ayat 2 sebagai berikut dipidana: Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 20 ayat 3 sebagai berikut: Dalam hal tuntutan pidana terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 20 ayat 4 sebagai berikut: Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

Pasal 20 ayat 5 sebagai berikut:

Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

Pasal 20 ayat 6 sebagai berikut:

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 20 ayat 7 sebagai berikut:

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pembahasan dari undang-undang di atas bahwa dengan mempelajari makna dan jenis korupsi, maka UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama dan UU Nomor 20 Tahun 2001, sama-sama termasuk jenis korupsi materiil yang jenisnya lebih banyak dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Karena dalam UU Nomor 3 Tahun 1971, hanya disebutkan dalam satu pasal saja (19). Sedangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jenisnya sebanyak 19 dengan rincian.

d) Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menangani budaya korupsi¹¹⁵, perlu dilihat faktor-faktor penyebab orang melakukan korupsi. Ada banyak alasan orang melakukan korupsi seperti karena moralitasnya yang rendah, kekurangan harta, ingin menikmati harta dengan jalan pintas, dan sistemnya memungkinkan untuk korupsi.¹¹⁶

Faktor penyebab terjadinya korupsi secara umum menurut Syamsul Anwar,¹¹⁷ dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seorang pemegang amanah yang mendorong melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sedangkan faktor eksternal adalah sistem

¹¹⁵ Korupsi merupakan satu bentuk kejahatan modern. Sebagai kejahatan modern, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak hanya mengancam keseimbangan negara, namun juga menodai prinsip keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, bahkan misi agama. Ketika agama datang mendeklarasikan prinsip keadilan, kejujuran dan penggunaan kewenangan sesuai fungsinya, tindakan korupsi justru melawan semua itu. Ketika Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi (Al-Baqarah [2]: 30), sikap amanah adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar. Korupsi terjadi karena pelakunya mengalami sesat pikir atas prinsip kejujuran dan amanah. Dengan demikian, bukan saja melawan moralitas secara umum, korupsi juga merupakan perlawanan atas agama, yakni perlawanan non-konfrontatif.

¹¹⁶ Pramono, U Tanthowi dkk. *Membasmi Kanker Korupsi*. (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 192.

¹¹⁷ Syamsul, Anwar dkk. *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. (Jakarta: PSAP, 2006), hlm

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan atau kepemimpinan yang tidak seimbang sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pemegang amanah untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal senantiasa berkembang, karena lemahnya pengawasan, lemahnya hukum, tidak adanya akuntabilitas, penegak hukum yang mudah disuap, sanksi hukum yang lebih ringan disbanding dengan hasil korupsi, tidak ada teladan kejujuran dari pemegang kepemimpinan.

Evi Hartanti¹¹⁸ juga menambahkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
2. Kemiskinan, pada kasus korupsi di sekolah para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan;
3. Tidak adanya sanksi yang keras;
4. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi;
5. Perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.

Secara lebih khusus menurut Syamsul Anwar,¹¹⁹ penyebab terjadinya korupsi adalah rendahnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya pendidikan agama yang terlalu menekankan pada aspek kognitif dan melupakan aspek afektif dan psikomotorik, atau pertambahannya ilmu pengetahuan agama tanpa dibarengi dengan peningkatan pengalaman. Ini juga menjadi titik awal perubahan nilai-nilai sosial-budaya di masyarakat yang mengarah pada pola hidup individualistik (mementingkan diri sendiri),

¹¹⁸ Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

¹¹⁹ Syamsul Anwar, dkk, 2006. *Fikih Antikorupsi: Pespektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materialistik (mengejar kehidupan bendawi), serakah, konsumtif (boros), hedonistik (mengejar kepuasan sesaat), permisif (sikap serba boleh, tanpa peduli aturan), dan cenderung bermewah mewah

Modus atau alasan dalam melakukan korupsi memang berbeda-beda motif dari orang-orang yang melakukannya. Beberapa modus yang digunakan biasanya menggunakan pungutan liar yang diabsahkan oleh pihak sekolah kepada masyarakat umum. memalsukan laporan keuangan, dan sebagainya. Selain itu dapat dilihat pola bahwa sektor pendidikan dengan banyaknya pos dana yang disiapkan oleh pemerintah telah menjadi sektor yang sangat diminati para koruptor, karena dapat menghasilkan uang yang banyak, beberapa modus lain yang berhubungan dengan dana pendidikan pemerintah ini adalah membuat *mark-up* proyek pembangunan pendidikan, seperti gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana sekolah.

Amat Budiman¹²⁰. menegaskan bahwa, salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakan tersebut. Salah satu upaya jangka Panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Selain itu, generasi muda juga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya.

¹²⁰ Amat Budiman, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Budaya Melayu*, Jurnal Pendidikan Guru (PIGUR), ISSN :2541-0946 Volume 01 Nomor 02 . Nopember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui penerapan pendidikan anti korupsi diharapkan bisa lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh budaya korupsi dari generasi pendahulunya.

Di dunia pendidikan, sejumlah modus korupsi menurut Syamsul Anwar,¹²¹ dapat dilihat antara dalam hal-hal berikut:

- 1) Pengadaan. Korupsi banyak terjadi ketika pelaku menawarkan suap kepada pegawai atau guru sebagai ganti untuk mengamankan kontrak. Biaya suap biasanya sudah termasuk jumlah anggaran kontrak yang dapat menyebabkan turunnya standar kualitas barang atau pelayanan. Misalnya, kontrak untuk membangun gedung, pengadaan peralatan, buku, seragam, makanan, dan lain sebagainya. Dampak dari peningkatan biaya biasanya akan dibebankan pada siswa.
- 2) Administrasi pendidikan. Korupsi di administrasi sekolah dapat terjadi dalam promosi karir, ujian masuk/akhir, perekrutan guru, penggunaan fasilitas, dan sebagainya. Dari berbagai kasus, lingkup korupsi dapat melibatkan tidak hanya pihak sekolah tetapi juga orang tua, komunitas lokal, kantor pemerintah setempat, kementerian pendidikan, dan lain-lain.
- 3) Korupsi guru kelas. Misalnya, guru mengumpulkan uang tambahan (dana ekstra) dari siswa untuk tutorial di kelas yang terjadwalkan dengan imbalan tertentu. Contoh lain, guru mewajibkan penggunaan buku ajar tertentu setelah ia bekerjasama (berkolusi) dengan pihak penerbit atau

¹²¹ Syamsul, Anwar dkk, *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. (Jakarta: PSAP, 2006), hlm 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasok buku tersebut, korupsi juga terjadi ketika guru memberikan nilai yang tidak fair kepada siswa-siswa tertentu dengan alasan-alasan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan profesionalitas.

- 4) Korupsi siswa di sekolah. Misalnya seorang siswa mengerjakan soal ujian dengan cara menyontek atau meniru hasil kerjaan soal ujian dengan cara tujuan mendapatkan nilai lebih dari kemampuan sesungguhnya. Contoh lain, seorang siswa memberikan sejumlah hadiah tertentu kepada guru tertentu untuk mendapatkan “belas- kasihan” dalam hal nilai. Hal ini adalah gejala awal dari munculnya korupsi yang lebih besar, ketika siswa tersebut kelak tumbuh menjadi pejabat, pegawai atau pengusaha.

Menurut Pramono¹²² tindakan *nyontek*, penipuan di sekolah, penjiplakan (plagiat), korupsi waktu bagi guru dan dosen, korupsi uang bagi pejabat pendidikan, penjualan dan pengatrolan nilai, semua ini perlu diberantas dengan aturan main yang adil dan jelas serta sanksi tegas. Anak sejak di keluarga dan di sekolah dibiasakan puas dan senang dengan usahanya sendiri, dan tidak dipicu mendapatkan hasil akhir tinggi tanpa usaha sehingga menggunakan segala jalan termasuk yang tidak halal seperti menipu, menyuap dan *nyontek*.

Setelah mengetahui faktor penyebab dan bentuk korupsi korupsi di sekolah, dapat diketahui bahwa korupsi mengakibatkan di antaranya kerusakan mental pribadi seseorang. Orang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan rusak. Hal ini mengakibatkan

¹²²Pramono, U. Tanthowi dkk: *Membasmi Kanker Korupsi*. (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahanya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontoh oleh generasi muda Indonesia.¹²³

e) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.

Semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalingkong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.

Melihat dari kasus, faktor dan bentuk korupsi tersebut maka diperlukan beberapa tindakan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan

¹²³ Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Op.cit. hlm. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antisipasi korupsi dalam berbagai modusnya, karena dengan adanya antisipasi maka korupsi akan dapat dicegah, dan minimal dapat dikurangi. Menurut Kristiono,¹²⁴ Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan tindakan preventatif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventatif ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak hal yang dilakukan, misalnya melalui kampanye publik, maupun melalui penanaman nilai-nilai moral dan etika yang dapat dimasukkan dalam pendidikan seperti di SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Dengan upaya ini diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang bersih dan antikorupsi sekaligus menjadi contoh generasi sesudahnya dan sebelumnya. Kesadaran dan kepedulian masyarakat perlu ditumbuhkan melalui berbagai cara, antara lain dengan mencanangkan “gerakan anti korupsi”, yang menandai komitmen berbagai elemen masyarakat dalam memberantas korupsi.

Terkait dengan hal tersebut, Yusrianto Kadir,¹²⁵ menegaskan bahwa upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada

¹²⁴ Kristiono: *Penanaman Nilai Anti Korupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Mata Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi* : Jurnal Ilmiah Pendidikan Volume 9 Nomor 1 Desember 2018, ISSN: 208-9385(print) dan 2528-696X (online).

¹²⁵ Yusrianto Kadir : *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*; Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 1 – No 1 April 2018 P-ISSN: 2614 -5030, E-ISSN : 2416 -5022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya.

Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang nya menjelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah tataran upaya penindakan dan pencegahan, disamping kewenangan-kewenangan lain yang menjadi tugas pokoknya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Adapun dasar dikeluarkannya surat edaran ini merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring dengan pemikiran dan ketentuan yang baru saja diraikan tadi, Amat Budiman¹²⁶ menegaskan: Pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama dan PR (Pekerjaan Rumah) bagi kita semua. Berbagai upaya telah ditempuh untuk melawan tindakan amoral ini. Mulai dengan melakukan pencegahan hukum, mendirikan lembaga pemberantas korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pengadilan khusus tindak pidana korupsi, dan didukung oleh kepolisian dan kejaksaan. Ada pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan yang belakangan mulai populer yaitu OTT (Oprasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK selalu menjadi berita yang menarik untuk memancing ketertarikan masyarakat agar menjadi pengawas hukum yang berjalan. Diluar pemerintahan ada pula ICW (*Indonesia Corruption Watch*) sebagai organisasi yang didalamnya terdapat sekumpulan orang dengan misi mengawasi dan melaporkan kepada publik tentang aksi korupsi yang ada di Indonesia.

Selain memberantas, ada pula tindakan pencegahan terhadap perilaku korupsi yang berpotensi menyerang manusia sedari dini yaitu melalui pendidikan dalam wujud pendidikan anti korupsi. Upaya yang dilakukan melalui pendekatan ini ialah dengan membangun dan memperkuat sikap antikorupsi setiap peserta didik dengan cara dan bentuk yang beragam. Hasil dari upaya ini memang tidak langsung terlihat, hal ini

¹²⁶. Amat Budiman; *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Pendidikan Guru (PIGUR), ISSN: 2541 – 0946 Volume 01 Nomor 01. Januari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena upaya penguatan sikap terkait nilai-nilai antikorupsi tidak dapat menunjukkan hasil yang instan, melainkan baru dapat dilihat di masa yang akan datang.

Keterlibatan pendidikan formal maupun non formal dalam upaya pencegahan tindakan korupsi juga tidak bisa diabaikan. Pendidikan menyediakan lahan yang luas untuk manusia berusaha mencari pengetahuan. Proses mencari tahu yang terus menerus dilakukan manusia merupakan aktifitas pendidikan secara umum. Secara khusus proses pendidikan dijalankan melalui sebuah lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Hadirnya pendidikan anti korupsi dalam pendidikan memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tindakan korupsi sebenarnya bisa diantisipasi sejak dini melalui pendidikan sebagai upaya yang strategis.

Kontribusi pendidikan sebagai proses transformasi nilai adalah pijakan awal dilakukannya upaya ini. Bahwa nilai-nilai yang akan ditransformasikan dalam aktivitas pendidikan diantaranya adalah nilai-nilai religius dan nilai-nilai kebudayaan. Transformasi dalam penjelasan tersebut dapat dipertegas, yaitu memperkuat akar nilai-nilai religius dan nilai-nilai kebudayaan setiap individu dengan posisi sebagai peserta didik di lingkungan lembaga pendidikan formal dan non formal. Nilai-nilai religius dan nilai-nilai kebudayaan ini bersumber dari pendidikan agama Islam yang dapat diartikan secara universal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan konsep tersebut, Rosida Tiurma Manurung,¹²⁷ megaskan bahwa upaya untuk memperkuat identitas dan ketahanan bangsa terhadap kejahatan yang berlabel korupsi, sebaiknya dilakukan upaya preventif sedini mungkin, yaitu sejak masih anak-anak. Anak-anak sudah harus disuguhi bacaan yang mengandung plot dan karakter yang positif, menampilkan nilai luhur moral dan budaya, disertai dengan ilustrasi yang menarik.

Secara lebih rinci, Ginanjar Hambali,¹²⁸ Mengatakan bahwa berbagai upaya dilakukan untuk memberantas korupsi, baik melalui penindakan maupun pencegahan. Salah satu program pencegahan korupsi melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah, yaitu dengan Program Pendidikan Antikorupsi (PAK), yang diluncurkan secara resmi, pada tahun 2018, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagaimana disebutkan Kofi A. Anan mantan Sekjen PBB, 2004, UNCAC, sebagai berikut: “Korupsi ibarat wabah mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat, merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran hak azasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang. Dana bantuan sosial yang

¹²⁷ Rosida Tiurma Manurung: *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*, Jurnal Sosateknologi Edisi 27 Tahun 11.

¹²⁸ Ginanjar Hambali: *Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran* : INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1)15-30 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X, DOI:https://doi.org/10.32697/Integritas.v6i1.375@Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikorupsi semakin menyengsarakan orang miskin, mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dasar, dan membuat pembangunan kurang berarti.”

Pendidikan antikorupsi diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan, diantaranya melalui reformasi sistem (*constitutional reform*) dan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) serta penegakan hukum (*law enforcement*). Sektor pendidikan seperti ditulis Adnan Topan Husodo, dipandang sebagai lini strategis dalam membangun semangat antikorupsi, membentuk cara pandang yang kuat terhadap masalah korupsi beserta dampaknya, serta menciptakan usaha pencegahan korupsi. Peran pendidikan, baik pendidikan sektor formal, informal, non-formal, maupun pendidikan dalam arti luas adalah membangun peradaban baru yang lebih baik bagi masyarakat.

Menumbuhkan budaya antikorupsi melalui lembaga pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan membentuk karakter, sikap, dan watak peserta didik yang bermartabat dan berakhlak mulia. Seperti dijelaskan Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3, yang menyebutkan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan antikorupsi adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat dan sudah ada niat untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi.

Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktek korupsi di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Namun realitasnya, korupsi tetap saja menjamur. Bahkan di era otonomi daerah, juga menyebar di berbagai daerah local begitu pula pada tingkatan birokrat pusat korupsi menyebar begitu luas.

Sementara itu Lukman Hakim¹²⁹ menegaskan salah satu strategi yang dilakukan untuk memerangi korupsi adalah dengan dirancangnya pendidikan antikorupsi oleh beberapa lembaga pendidikan. Gagasan ini lahir dimaksudkan untuk membasmi korupsi melalui persilangan (*intersection*) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Disamping itu, pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk

¹²⁹Lukman Hakim ; *Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam*; Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 10No 2 – 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi¹³⁰.

Secara simplistik memang sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (approach), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. Oleh karenanya, pendidikan Islam perlu mengembangkan nilai antikorupsi. Sebab dalam terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Pertanyaannya adalah: Bagaimana konsep pendidikan antikorupsi.

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia tentunya mempunyai peranan

¹³⁰ Harian Kompas, 21 Februari 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi. Pendidikan Islam bisa dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena manusia-manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan disaat institusi lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, maka institusi pendidikan (Islam) dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Pertanyaannya adalah: Bagaimana konsep pendidikan antikorupsi.?

Hal preventif ini bisa dilakukan sejak sedini mungkin dengan mengajarkan dan menanamkan karakter antikorupsi di sekolah. Hal preventif tersebut apabila diseriuskan dalam bentuk penyampaianya juga akan membangun kesadaran dari para penerimanya, korupsi yang telah menjadi suatu hal yang sistemik dan dapat merusak sendi-sendi pergerakan bangsa memang sudah seharusnya mendapatkan porsi perhatian yang lebih banyak dalam level pencegahannya. Salah satu konsep pencegahan tindakan korupsi adalah memberikan kesadaran agar tercipta karakter antikorupsi dari sejak dini dan dengan upaya terus menerus dan berkesinambungan. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan menanamkan karakter antikorupsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jamal Ma'mur Asmani¹³¹ dalam bukunya *Pendidikan Karakter di Sekolah* menyebutkan bahwa pendidikan karakter meliputi 9 (Sembilan) pilar yang saling terkait. Berikut kesembilan pilar tersebut:

- a. *Responsibility* (tanggung jawab)
- b. *Respect* (rasa hormat)
- c. *Fairness* (keadilan).
- d. *Courage* (keberanian).
- e. *Honesty* (kejujuran).
- f. *Citizenship* (kewarganegaraan).
- g. *Self-discipline* (disiplin diri).
- h. *Caring* (Peduli).
- i. *Perseverance* (ketekunan).

Tim Pengembang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, Zulfikri Anas¹³² menyatakan bahwa dalam Kurikulum Antikorupsi bertujuan untuk membudayakan dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, berani, dan hidup sederhana.¹³³

Jadi karakter antikorupsi yang perlu diterapkan Pendidikan dan Pelatihan adalah:

1) Jujur

Jujur merupakan sebuah karakter yang dianggap dapat membawa

hlm. 49

¹³¹ Jamal Makmur Asmani; *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011),

¹³² Zulfikri Anas : *Buku Pendidikan Anti Korupsi*, 2016

¹³³ www.bangkapos.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa ini menjadi bangsa yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Qur'an dan Hadits banyak menjelaskan tentang jujur¹³⁴. Jujur dalam kamus Bahasa Indonesia dimaknai dengan lurus hati, tidak curang. Dalam pandangan umum, kata jujur sering dimaknai “adanya kesamaan antara realitas (kenyataan dengan ucapan)”, dengan kata lain “apa adanya”.¹³⁵

Jujur adalah tutur kata yang benar sesuai dengan fakta dan realita.¹³⁶ Jujur atau kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Hal ini diwujudkan dalam hal perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun pada pihak lain. Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.¹³⁷

¹³⁴ Firman Allah SWT :

71-70: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَهُؤُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
 Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. [Al-Ahzab : 70 – 71]

3-2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. [Ash-Shaff : 2 – 3]

وَلَقَدْ لَعْنَانَا الشَّيْطَانَ. إِنَّ الشَّيْطَانَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ. 53

Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku : “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan (suka) menimbulkan perselisihan diantara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”. [Al-Israa’ : 53]

Hadits-hadits Nabi SAW :

يَقْرَأُ رِضَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالكُذْبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ. ابن حبان في صحيحه

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda : “Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka”. [HR. Ibnu Hibban di dalam Shahihnya]

ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَهُوَ يَحْزَرُ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالكُذْبَ فَإِنَّ الكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَهُوَ يَحْزَرُ الكُذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا. البخاري و مسلم و ابو داود و الترمذی و صحيحه و اللفظ له

Dari Ibnu Mas'ud RA ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan terus-menerus seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan terus menerus seorang hamba itu berdusta dan memilih yang dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta”. [HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menshahihkannya dan lafadh baginya]

¹³⁵ Kesuma, Dharma dkk. Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 16

¹³⁶ Subainati, Yasiin. 2004. Seni Menanamkan Kejujuran Pada Anak. Jakarta:Mustaqiim, 2004), hlm. 13

¹³⁷ Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif. (Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dharma Kesuma¹³⁸ menyatakan bahwa dalam konteks pembangunan karakter di sekolah, kejujuran menjadi amat penting untuk menjadi karakter anak-anak Indonesia saat ini. Karakter ini dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan di kelas, semisal ketika anak melaksanakan ujian. Perbuatan mencontek merupakan perbuatan yang mencerminkan anak tidak berbuat jujur kepada diri, teman, orang tua dan gurunya. Anak memanipulasi nilai yang didapatnya seolah-olah merupakan kondisi yang sebenarnya dari kemampuan anak, padahal nilai yang didapatnya bukan merupakan kondisi yang sebenarnya.

Menurut Subakdi,¹³⁹ bahwa kejujuran merupakan pengkuan batin seseorang. Setiap tindakan atau perilaku manusia akan mendapatkan tanggapan batinnya. Hendaknya selalu membiasakan diri selalu bersikap jujur. Orang yang tidak biasa berbohong, tidak curang, rela berkorban demi kebenaran, atau berani mengakui kesalahan akan menolak perilaku yang bertentangan dengan batinnya. Karena itu perilaku jujur harus ditumbuhkan kembangkan sehingga menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.

2) Disiplin

Disiplin adalah ketaatan pada aturan dan tata tertib.¹⁴⁰ Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.¹⁴¹

¹³⁸ Kesuma, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 16

¹³⁹ Subakti dkk. *Pendidikan Berbangsa, Berbudi Pekerti dan Antikorupsi*. Sragen: DIKNAS Kab.Sragen, 2009), hlm. 39

¹⁴⁰ Hidayat, Ara dan Imam Marchali. 2010. *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Bandung: Bustaka Educa, 2010), hlm. 132

¹⁴¹ Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif*. Op.cit. hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disiplin menurut Imam Akhmad¹⁴² dalam bukunya berjudul *Membentuk Dan Meningkatkan Disiplin Anak*, dimaknai melatih dan mengembangkan kontrol diri anak. Disiplin akan membantu anak untuk mengembangkan control dirinya, dan membantu anak mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya.

Menurut Jamal Ma'mur Asmani¹⁴³ tidak hanya siswa yang perlu disiplin, tetapi seorang guru juga dituntut untuk disiplin. Disiplin guru akan memberi contoh keteladanan kepada siswanya, diantara disiplin bagi guru adalah:

(a) Disiplin waktu

Disiplin waktu menjadi sorotan utama bagi seorang guru, karena Allah SWT dalam perintah dan syariat-Nya mengajarkan kita terhadap disiplin waktu sebagaimana esensi dari shlat lima waktum puasa bulan Ramadhan, Hajji dan i adah lainnya. Al-Qur'an dan Hadits sudah menjelaskan demikian sebagai bimbingan untuk manusia.¹⁴⁴ Waktu

¹⁴² Imam dkk *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. (Bandung: Bustaka Educa, 2010), hlm. 22

¹⁴³ Ibid., hlm. 94

¹⁴⁴ Baik atau buruk, untung atau rugi hasil suatu pekerjaan, tergantung dari usaha pelakunya. QS al-'Ashr (103): 1-3 jelas-jelas menyatakan hal ini. Allah – di dalamnya – berfirman,

() إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ()

"Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati supaya bersikap sabar." (ayat 1-3).

Nabi s.a.w. yang memeringatkan manusia agar mempergunakan waktu sebaik mungkin. Antara lain sabda Nabi,
 ن مَعْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ صَبَّأَهُ وَالفَرَاغُ

"Dua nikmat yang sering disia-siakan oleh banyak orang, yaitu kesehatan dan waktu luang." (HR al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْرُوفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ هَاجِرٌ سَبِيلُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ وَإِذَا صَبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ مَصِيحِكَ لِمَرْصِكَ وَمِنْ حَبَاتِكَ لِمَوْتِكَ

Dari Ibnu Umar Radhiallahu Anhumaa, ia berkata: “*Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku, lalu bersabda: Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar Radhiallahu Anhumaa berkata: “Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati”*”. (HR. Bukhari, Kitab Ar Riqaq)

Hadits di atas mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus menjadi manusia-manusia yang disiplin. Oleh karenanya kita dapat banyak ayat alquran dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Seperti firman-Nya,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk sekolah biasanya menjadi parameter utama kedisiplinan guru. Kalau guru masuk sebelum bel berbunyi, berarti dia orang disiplin. Kalau siswa masuk setelah bel dibunyikan, maka siswa dinilai tidak disiplin, menyalahi aturan sekolah yang telah ditentukan.

Karena itu, jangan menyepelekan disiplin waktu ini. Usahakan tepat waktu ketika datang pada jam masuk sekolah. Ketika mengajar guru juga harus sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan, agar tidak korupsi waktu.

(b) Disiplin menegakkan aturan

Disiplin menegakkan aturan sangat berpengaruh terhadap kewibawaan guru. Model pemberian sanksi yang deskriminatif harus ditinggalkan. Selain itu, ketika memberi sanksi tidak diperbolehkan pilih kasih. Keadilan harus ditegakkan dalam keadaan apapun, karena keadilan yang akan mengantarkan pada kehidupan ke arah kemajuan, kebahagiaan dan kedamaian.

(c) Disiplin sikap

Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi *Strating Point* untuk menata perilaku orang lain. Disiplin dalam sikap membutuhkan latihan dan perjuangan. Dalam melaksanakan disiplin,

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (يس: 38)

“Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. (Yasin: 38)

Ayat yang mulia ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Radhiallahu

Anhu:

يا أبا ذر أنتري ما مستقرها ؟ فقال أبو ذر : الله ورسوله أعلم . قال ﷺ : مستقرها أنها تسجد تحت عرش ربه عز وجل ذاهبة وأبية بأمره سبحانه

“Wahai Abu Dzar, tahukah engkau apa mustaqarr (tempat peredaran) nya?” Abu Dzar menjawab, “Allah dan RasulNya yang lebih tahu.” Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “tempat peredarannya yaitu bahwasannya matahari bersujud di bawah ‘arsy Rabbnya ‘Azza wa Jalla, pergi dan kembali dengan perintahNya Subhanahu wa Ta’ala. (HR. Bukhari, Muslim dan lainnya)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guru tidak boleh mudah tersinggung dan cepat menghakimi seseorang atau siswa.

(d) Disiplin dalam ibadah

Menjalankan ajaran agama juga menjadi parameter utama dalam kehidupan ini. Seorang guru, menjalankan ibadah adalah hal krusial yang sangat penting. Kalau guru menyepelekan masalah agama, siswa akan meniru, bahkan lebih dari itu, tidak menganggap agama sebagai hal penting. Oleh karena itu, kedisiplinan guru dalam menjalankan agama akan berpengaruh terhadap pemahaman dan pengalaman siswa terhadap agamanya.

(e) Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, sebagaimana yang harusnya ia lakukan diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴⁵ Tanggung jawab adalah mau menanggung resikonya terhadap suatu perbuatan (apabila dituntut, diperkarakan dan sebagainya).¹⁴⁶

Rasa tanggung jawab juga harus masuk ke dunia Pendidikan terutama tanggung jawab yang dicontohkan oleh para pendidik termasuk para guru. Menurut Jamal Ma'mur Asmani¹⁴⁷ Seorang guru harus melandasi fungsi dan tugas mulianya dengan tanggung jawab yang besar dalam dirinya, tanggung jawab yang tidak didasari oleh kebutuhan

¹⁴⁵ Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif*. Op.cit. hlm. 37

¹⁴⁶ Syuaeb, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. (Solo: Sendang Ilmu, 2001), hlm. 426

¹⁴⁷ Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif*. Op.cit. hlm. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

financial saja, tetapi tanggung jawab agama Islam dan peradaban yang besar bagi kemajuan negeri tercinta, Indonesai.¹⁴⁸ Guru harus sadar bahwa kesuksesan menjadi harga mati lahirnya kader-kader bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu guru harus menekuni profesinya dengan penuh kesungguhan dan kerja keras.

Tujuan pendidikan nasional suatu bangsa menggambarkan manusia yang baik menurut pandangan hidup (filsafat dan/atau agama) yang dianut oleh bangsa itu. Tujuan pendidikan Nasional Indonesia menggambarkan kualitas manusia yang baik menurut pandangan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia manusia yang baik ialah manusia pembangunan yang pancasilais, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan bertanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaksud di dalam undang-undang Dasar 1945. Sesungguhnya rumusan ini adalah perincian sifat-sifat manusia yang baik yang telah terdapat serta Inheren di dalam Pancasila

¹⁴⁸Hadits Riwayat Muttafaq Alaih

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ الْإِنْسَانُ أَرْبَعَةً أَلْفَ مَرَّةٍ (ليه)

Artinya : “Tiada lain bagi seorang hamba yang diamanatkan oleh Allah SWT mengurus rakyat yang pada suatu hari ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya atau tidak bertanggung jawab, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya.” (HR. Muttafaq ‘alaih).

Hadits Riwayat Bukhori

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى)

Artinya : “Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya.” (HR. Bukhari)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai filsafat bangsa Indonesia.¹⁴⁹

Menurut Azyumardi Azra¹⁵⁰, krisis yang dihadapi pendidikan Nasional bukan menyangkut kinerja sekolah atau dunia pendidikan pada umumnya dalam hal kualitas akademis lulusannya, tetapi juga dalam hal mentalitas, moral dan karakter.

Semakin disadari pentingnya membentuk karakter sejak usia dini, di dunia internasional sudah ada perubahan paradigma fokus pendidikan, dari apa yang disebut era “Headstart” (lebih mementingkan kecerdasan otak kiri, atau IQ) ke arah era “Heartstart” (mementingkan kecerdasan emosi otak kanan). Era Headstart menekankan “anak harus bisa”, sehingga ada kecenderungan anak dipaksa untuk belajar terlalu dini (*early childhood training*). Akibatnya, banyak terjadi kasus-kasus *antisocial personality disorder*, *learning disability*, dan masalah-masalah lainnya. Indikator yang terlihat adalah kualitas lulusan rendah, tingkat stress remaja tinggi, tawuran, dan sebagainya.¹⁵¹

Thomas Lickona.¹⁵² *These principles, cited below, serve as criteria that schools can use to plan an effective character-education initiative and evaluate various character-education programs, books, and curricula:*

- a. *Promotes core ethical values as the basis of good character,*
- b. *Defines "character" comprehensively to include thinking, feeling, and behavior,*
- c. *Uses a comprehensive, intentional, proactive, and effective approach to*

¹⁴⁹ Ahmad Tafsir, 2002. Metodologi Pengajaran Agama Islam. (Bandung: Remaja, 2002), hlm. 15

¹⁵⁰ Azyumardi, Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti: Membangun Kembali Anak Bangsa. (Jakarta: Universitas Negeri, 2000) hlm. 25

¹⁵¹ Megawangi, 2001. Mengapa Pendidikan Karakter? (Jakarta: IHF, 2001), hlm. 38

¹⁵² Lickona, T. 2003. *Eleven Principles of Effective Character Education*. Washington D.C: Character Education Partnership, 2003), hlm. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

character development,

- d. *Creates a caring school community,*
- e. *Provides students with opportunities for moral action,*
- f. *Includes a meaningful and challenging academic curriculum that respects all learners, develops their character, and helps them to succeed,*
- g. *Strives to foster students' self-motivation,*
- h. *Engages the school staff as a learning and moral community that shares responsibility for character education and attempts to adhere to the same core values that guide the education of students,*
- i. *Fosters shared moral leadership and long-range support of the character education initiative,*
- j. *Engages families and community members as partners in the character-building effort,*
- k. *Evaluates the character of the school, the school staff's functioning as character educators, and the extent to which students manifest good character*

Karakter yang dijelaskan oleh para ahli di atas, merupakan karakter yang diperlukan dalam rangka upaya pencegahan Tindakan korupsi.

f) Peduli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peduli berasal dari tiga suku kata yaitu pe-du-li yang merupakan kat kerja yang berarti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita.¹⁵³

Menurut Bender¹⁵⁴ Peduli adalah menjadikan diri kita terkait dengan orang lain dan apapun yang terjadi terhadap orang tersebut. Orang yang mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain daripada kepentingannya sendiri adalah orang yang peduli. Orang yang peduli tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Mereka selalu berusaha untuk menghargai, berbuat baik, dan membuat yang lain senang. Banyak nilai yang merupakan bagian dari kepedulian, seperti kebaikan, dermawan, perhatian, membantu, dan rasa kasihan. Kepedulian juga bukan merupakan hal yang dilakukan karena mengharapkan sesuatu sebagai imbalan.

Menurut ajaran Islam Islam merupakan agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari sebagian kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya dari sebagian kesusahan

¹⁵³ wikipedia .Com

¹⁵⁴ . Bender; karakterbangkit.co.id.2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari kiamat, dan barangsiapa memberi kelonggaran dari orang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aib dia di dunia dan akhirat, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

Begitu juga Allah menghargai mereka yang melaksanakan amal sosial dalam konteks kepedulian sosial tersebut sebagaimana juga Allah sangat mengecam mereka yang tidak mempunyai rasa kepedulian sosial.

Di saat kondisi seperti sekarang ini, sesungguhnya sebuah ladang jihad amal menanti bagi kaum yang berada. Rasulullah bersabda: “Belum beriman seseorang itu sebelum ia mencitai saudaranya seperti ia mencitai dirinya sendiri”. Bentuk dari kepedulian sosial ada bermacam-macam diantaranya adalah zakat, infaq, dan shodaqoh.

Adapun cara-cara pengembangan sikap kepedulian adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan cara pandang yang lebih berempati, yaitu:
 - a. Bangunlah kepekaan terhadap perasaan orang lain;
 - b. Pertimbangkan apa dampak dari tindakan anda terhadap orang lain;
 - c. Tentukan sikap;
 - d. Hargailah orang lain dalam kehidupan anda;
 - e. Jauhkan rasa egois;
 - f. Berikan perhatian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengembangkan sifat - sifat peduli, yaitu :
 - a. Bersikap sopan;
 - b. Berbagi kasih sayang;
 - c. Dengarkan orang lain;
 - d. Bersikap lebih murah hati;
 - e. Perlakukan orang lain seperti anda ingin diperlakukan;
 - f. Berusahalah untuk berbaik hati kepada orang lain.
- 3) Peduli kepada orang lain, yaitu :
 - a. Bantulah orang-orang yang membutuhkan bantuan;
 - b. Tanyakan kepada orang lain tentang kehidupan mereka;
 - c. Mintalah maaf jika memang harus;
 - d. Lakukan kebaikan untuk orang lain;
 - e. Berbagi;
 - f. Lakukan kontak dengan orang-orang;
 - g. Ingatlah secara detil tentang kehidupan orang lain;
 - h. Jadilah tenaga sukarela.¹⁵⁵

Sifat kepedulian merupakan sifat pemurah, dermawan, setia membela dan membantu orang, tidak serakah dan tamak, tidak mementingkan diri sendiri, penuh tenggang rasa dan kesetiakawanan, ikhlas tolong menolong, rela berkorban, dan kokoh dalam memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam peribahasa adat dikatakan, “mau seaib dan semalu, mau senasib

¹⁵⁵ <http://id.wikihow.com>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepenanggungan, mau ke bukit sama mendaki, mau ke lurah sama menurun, mau ke laut sama basah, mau ke darat sama berkering, mau mendapat sama berlaba, mau hilang sama merugi”.¹⁵⁶

Mandiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.¹⁵⁷

Menurut Brawer dalam Chabib Toha.¹⁵⁸ Adalah suatu kepercayaan diri sendiri dan perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh oleh orang lain.

Menurut Kartini Kartono.¹⁵⁹ Menurutny mandiri atau kemadirian akan terlihat pada waktu seseorang menghadapi masalah, bila masalah itu dapat diselesaikan sendiri tanpa meminta bantuan dari orang tua dan akan bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk mandiri.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mandiri atau kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan

¹⁵⁶ riau-melayu.blogspot.co.id

¹⁵⁷ www.Pengertianmu.Com

¹⁵⁸ <http://id.wikihow.com>.

¹⁵⁹ Kartini Kartono: *Fisikologi Anak*, Jakarta 1985



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dasar dorongan sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa meminta bantuan atau tergantung dari orang lain dan dapat bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai kepentingan.

Mandiri di dalam Islam berarti tidak menggantungkan kepada orang lain, orang bisa dikatakan mandiri jika sudah mampu menghidupi dirinya serta orang dekatnya (Anak dan Istrinya). Jika belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka orang itu disebut dengan miskin, orang miskin perlu mendapatkan perhatian meskipun demikian orang miskin juga tidak boleh menggantungkan kepada orang lain.

Islam sangat menganjurkan pemeluknya agar senantiasa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Orang dituntut bekerja dengan menggunakan segala kemampuannya seperti tenaga intelektual, serta jasanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Rasulullah S.A.W Bersabda : “Niscayalah jikalau seseorang dari engkau semua itu mengambil tali-talinya untuk mengikat lalu ia datang di gunung, kemudian ia datang kembali di negerinya dengan membawa sebongkohan kayu bakar diatas punggungnya lalu menjualnya kemudian dengan cara sedemikian itu Allah menahan wajahnya yakni dicukupi kebutuhannya, maka hal yang semacam itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta sesuatu pada orang-orang, baik mereka itu suka memberinya atau menolaknya “ (Riwayat Bukhari). Kemandirian merupakan salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat para nabi. Hal ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :
“Tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh , Nabi Daud AS itu makan dari hasil keringatnya sendiri “HR Bukhari.”

Lingkungan kehidupan yang dihadapi individu sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, baik segi-segi positif maupun negatif. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup akan membentuk kepribadiannya, dalam hal ini adalah kemandiriannya. Lingkungan social yang mempunyai kebiasaan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan mereka, demikian pula keadaan dalam kehidupan keluarga akan mempengaruhi perkembangan keadaan kemandirian anak. Sikap orang tua yang tidak memanjakan anak akan menyebabkan anak berkembang secara wajar dan menggembirakan. Sebaliknya anak yang dimanjakan akan mengalami kesukaran dalam hal kemandiriannya.

Pola pendidikan yang baik selalu ditegakkan dengan prinsip-prinsip memberi hadiah dan memberi hukuman yang akan menyebabkan anak-anak dalam keluarga memiliki taraf kesadaran dan pengalaman nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang terkesan amburadul, anormatif dan gersang dari keteladanan yang terpuji, menyebabkan anak-anak didik yang tumbuh dalam keluarga tersebut akan menunjukkan keadaan kepribadian yang kurang bahkan tidak menggembirakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Antonius¹⁶⁰ lingkungan sosial ekonomi yang memadai dengan pola pendidikan dan pembiasaan yang baik akan mendukung perkembangan anak-anak menjadi mandiri, demikian pula sebaliknya. Keadaan sosial ekonomi yang belum menguntungkan bahkan paspasan jika ditunjang dengan penanaman taraf kesadaran yang baik terutama dalam hal upaya mencari nafkah dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan, akan menyebabkan anak-anak mempunyai nilai kemandirian yang baik. Sebaliknya jika keadaan sosial ekonomi masih kurang menggembirakan, sedang kedua orang tua tidak menghiraukan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, dan taraf keteladanan pun jauh dari taraf keluhuran, maka bukan tidak mungkin anak-anak berkembang salah dan sangat merugikan masa depannya jika tidak tertolong dengan pendidikan selanjutnya.

Lingkungan keluarga yang mempunyai nilai-nilai yang baik akan memungkinkan anak berkemampuan untuk melakukan pilihan terhadap sesuatu secara baik. Sebaliknya keluarga yang tidak mempunyai nilai-nilai baik akan membiarkan anaknya. Orang tua yang baik tentu akan menuntun anak-anaknya agar selalu memperhatikan teman sepergaulannya. Dianjurkan untuk selalu mencari teman yang baik akhlaknya, bukan sekedar mempunyai teman dalam kehidupan tanpa memperhatikan taraf kebaikan sikap dan tingkah lakunya. Individu yang memiliki konsep diri positif akan menilai dirinya mampu, cenderung memiliki kemandirian dan sebaliknya individu

¹⁶⁰ Antonius, Atosökhi Gea (2011); *Enculturation Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Perilaku Budaya Individu*. Jurnal Humaniora, 02 (01). ISSN 2087-1236

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki konsep diri negatif akan menilai dirinya sendiri kurang atau cenderung menggantungkan dirinya pada orang lain.

h) Kerja Keras

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kerja artinya kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat) sedangkan Keras Artinya gigih; sungguh-sungguh hati. Secara bahasa kerja keras artinya melakukan sesuatu dengan sungguh sunnggu atau pantang menyerah. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. kerja keras dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapainya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal.

Menurut Arif F. Hadipranata¹⁶¹. Kerja Keras adalah sosok orang yang mengambil keputusan dalam sebuah pekerja kelasan yang akan memberikan dampak keuntungan banyak orang dan sosok itu menjadi sebuah inti dari kerja keras yang terlibat dalam sebuah pekerja kelasan.

¹⁶¹ Arif F. Hadipranata : *Implementasi Pendidikan Karakter Kerja Keras Dan Kerja Sama*. Jurnal Pendidikan Karakter by Institute of Research and Community Service 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan itu Robbin dan Coulter,¹⁶²¹⁶³ menegaskan adalah sebuah proses dimana seseorang atau kelompok individu yang membuat sebuah kerja keras yang menjadi peluang agar menjadi sebuah kerja keras yang menggunakan sumber daya apapun dan disepakati siapapun yang terlibat. Kerja keras diartikan dengan cara yang inovatif yang akan memberikan banyak keuntungan bagi banyak orang dan tentunya untuk orang yang menjalankan kerja keras.

Sedangkan kerja keras menurut ajaran Islam adalah Kerja keras sangat banyak memiliki keutamaan dalam syariat agama Islam Bekerja keras sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Di antara alasan pentingnya bekerja keras adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Menunjukkan telah mengoptimalkan potensi dirinya. Manusia telah dikaruniai akal, rasa, dan karsa sehingga wajib menjaga harkat dan martabat dirinya.
- b. Seseorang dapat mengubah nasib dirinya agar menjadi lebih baik. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah tak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang mengubahnya.
- c. Menunjukkan sikap tanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.
- d. Dapat hidup mandiri sehingga tidak menjadi beban orang lain.
- e. Turut serta dalam memajukan lingkungan sekitar dan negara.

¹⁶² *Ibid*, hal. 6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menunjukkan persiapan agar dapat menggapai kesuksesan pada hari esok. Pekerja keras selalu melaksanakan perencanaan dan usaha keras dalam hidupnya. Meskipun hasilnya tidak dapat dia petik langsung, tetap dapat dimanfaatkan untuk generasi sesudahnya.

Sederhana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sederhana/bersahaja/tidak berlebih-ebihan: *hidupnya selalu* sedang, Kesederhanaan memiliki 2 arti. Kesederhanaan berasal dari kata dasar sederhana. Kesederhanaan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kesederhanaan memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik. Kesederhanaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kesederhanaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Kesederhanaan adalah properti, kondisi, atau kualitas ketika segalanya dapat dipertimbangkan untuk dimiliki. Kesederhanaan biasanya berhubungan dengan beban yang diletakkan sesuatu pada seseorang yang mencoba untuk menjelaskan atau memahaminya. Sesuatu yang mudah dipahami atau dijelaskan adalah sederhana, berlawanan dari sesuatu yang rumit. Dalam beberapa hal, kesederhanaan dapat digunakan untuk mengartikan kecantikan, kemurnian atau kejelasan. Kesederhanaan juga dapat digunakan sebagai konotasi negatif untuk menandakan defisit atau ketidakcukupan nuansa atau kerumitan suatu benda, relatif terhadap sesuatu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dianggap perlu.

Menurut Razor Occam¹⁶⁴, semua hal setara, teori tersederhana adalah yang paling benar. Dalam konteks gaya hidup manusia, kesederhanaan dapat menandakan kebebasan dari kerja keras, usaha atau kepanikan. Secara spesifik, kata ini dapat merujuk pada gaya hidup sederhana. Kesederhanaan adalah kriteria meta-ilmiah yang bertujuan untuk mengevaluasi suatu teori (lihat pula razor Occam dan referensinya). Konsep sejenis tentang Parsimoni juga digunakan dalam filosofi ilmu pengetahuan yang merupakan penjelasan atas suatu fenomena yang kurang penting dianggap memiliki nilai yang lebih superior dibanding fenomena yang lebih penting.

Rikyu¹⁶⁵, mengatakan bahwa suatu realitas adalah sederhana apabila ia tidak mempunyai bagian-bagian yang sungguh berbeda. Bagian-bagian itu dapat disebut kesederhanaan essensial atau integral. Yaitu kesederhanaan yang dimiliki Jiwa. Kesederhanaan essensial dapat dimengerti dengan mudah oleh jiwa. Karena bagian essensial adalah bagian-bagian yang merupakan esensi suatu hal yang ada.

Seperti yang dikatakan Plato¹⁶⁶ “ menegaskan kodrat jiwa adalah sederhana dan mirip dengan ide-ide. Maka ide-ide itu tidak bisa dihancurkan. (inilah bukti yang didasarkan atas spiritualitas jiwa, sedang spiritualitas itu sendiri akhirnya dibuktikan melalui kegiatan intelektual).

¹⁶⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesederhanaan>

¹⁶⁵ Menurut Rikyu; *Kesederhanaan & Kesuksesan Menciptakan hidup yang anda dambakan*, /Bruce Elkin/Pustaka Pelajar 1987.

¹⁶⁶ Ibid hal 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesederhanaan digambarkan melalui suatu konsep yaitu kesederhanaan dikarakteristikkan dengan ketulusan hati, ketenangan, kealamiaan, ketidaksempurnaan terlihat dalam materi-materi. Keindahan dari Kesederhanaan Nabi adalah dengan menghubungkan hati dari ketidaksempurnaan pada kesempurnaan, asimetris ke simetris, dari cabang ke buah; dari tak seimbang menjadi seimbang, buruk dan cantik, kemiskinan dan kesederhanaan dari ketidaksempurnaan adalah kemiskinan yang mulia dan sumber kekayaan hati.

Kesederhanaan menurut ajaran Agama Islam menganjurkan agar umatnya sentiasa hidup sederhana dalam semua tindakan, sikap dan amal. Islam adalah agama yang berteraskan nilai kesederhanaan yang tinggi. Kesederhanaan adalah satu ciri yang umum bagi Islam dan salah satu perwatakan utama yang membedakan dari umat yang lain. Atas prinsip inilah, maka umat Islam yang sejati merupakan umat yang adil dan sederhana. Merekalah yang akan menjadi saksi di dunia dan di akhirat di atas setiap penyelewengan, penindasan serta penyimpangan ke kanan maupun ke kiri dari jalan pertengahan yang lurus.

Rasulullah Saw. telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi: yang artinya :“ Sebaik-baik perkara ialah yang paling sederhana” Kesederhanaan adalah budaya yang telah diterapkan oleh Rasulullah Saw. budaya sederhana dan sentiasa mendaulkan prinsip keadilan serta kemanusiaan inilah yang membentuk generasi Islam yang begitu mantap dan berkualitas. Generasi yang dididik oleh Nabi Muhammad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saw. dengan ciri kesederhanaan dan penghayatan memahami Islam yang sejati berlandaskan cahaya al-Quran itulah yang akhirnya berhasil mengangkat panji-panji Islam ke seluruh dunia.

Rasulullah Saw. dan Nabi-nabi yang lain menyukai hidup sederhana dan wajar. Beliau menikmati ketenangan hidup secara sederhana bukan berlebih-lebihan dan berfoya-foya. Beliau hidup sederhana di segala urusannya sehari-hari baik itu dari segi makanan, berpakaian dan juga apa yang ada padanya. Beliau mencontohkan hidup yang baik pada umatnya dan bahkan penasehat mereka untuk hidup sederhana dan menahan diri dari hidup yang berpoya-poya. Dalam hadis-Nya Rasulullah mengajarkan pada umat-Nya untuk hidup sederhana. “Orang yang mencapai kejayaannya ialah orang yang bertindak di atas prinsip Islam dan hidup secara sederhana”. “Barang yang sedikit tetapi cukup (untuk memenuhi kebutuhan hidup) adalah lebih baik daripada banyak (tetapi menjadikan mereka lupa diri) dan menyesatkannya (dari jalan hidup yang sederhana”.

Al-Quran mengajak untuk hidup sederhana, menurut Al-Quran jalan yang terbaik adalah jalan tengah, sebagaimana firman Allah swt: Surat Al-Furqoan: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berani.

Keberanian berasal dari bahasa latin yaitu Cor yang berarti "jantung", dan bahasa Perancis yaitu pada Abad Pertengahan Lama, Corage yang berarti "hati dan jiwa" atau cuer, yang berarti "hati." yaitu Untuk memiliki keberanian adalah harus memiliki hati untuk menghadapi ketakutan, bahaya atau sakit yang diperlukan dalam membela kebenaran,, kehidupan rumah, mata pencaharian, budaya keluarga, maupun keyakinan.¹⁶⁷

Keberanian (atau Tekad) itu adalah sebuah keputusan yang sumbernya datang dari diri kita sendiri, yang bisa kita salurkan untuk menggapai panggilan, mimpi, harapan, dan tujuan hidup kita. Keberanian (atau Tekad) bukanlah sekadar lawan kata dari “ketakutan/ rasa takut”, tetapi keberanian (atau Tekad) memiliki arti yang jauh lebih dalam dari itu. Keberanian (atau Tekad) bisa dipilih oleh kita di dalam segala bentuk situasi hidup yang kita alami.

Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu merisaukan kemungkinan-kemungkinan buruk. Aristoteles mengatakan bahwa, “The conquering of fear is the beginning of wisdom. Kemampuan menahklukkan rasa takut merupakan awal dari kebijaksanaan.” Artinya, orang yang mempunyai keberanian akan mampu bertindak bijaksana tanpa dibayangi ketakutan-ketakutan yang sebenarnya merupakan halusinasi belaka. Orang-orang yang mempunyai keberanian akan sanggup menghidupkan mimpi-mimpi dan mengubah kehidupan pribadi sekaligus orang-orang di

¹⁶⁷ <https://kbbi.web.id/berani>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitarnya.¹⁶⁸

k) Adil

Adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Keadilan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Frans Magnis Suseno¹⁶⁹ yang mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Notonegoro¹⁷⁰ yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Thomas Hubbes¹⁷¹ yang

¹⁶⁸ Ibid. hla 5

¹⁶⁹ Frans Magnis Suseno: (<https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>) (Buku LKS SMP)(<http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html#ixzz4pcFstXWo>)

¹⁷⁰ Ibid hal 8

¹⁷¹ Ibid hal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

The Liang Gie ¹⁷² yang mengatakan suatu gejala atau tindakan tertentu dapat disebut adil karena dilandaskan pada teori keadilan. Jadi adil tidaknya suatu tindakan tidak terlepas dari teori keadilan. Misalnya seorang manajer perusahaan digaji lebih tinggi dibanding Office Boy (OB). Tindakan tersebut dapat dikatakan adil berdasarkan teori keadilan tertentu.

Dalam Konferensi tahunan tentang kajian Islam (*Annual Conference on Islamic Studies-ACIS*) ke-11 Tahun 2011 di Pangkal Pinang Bangka Belitung Menteri Agama Suryadharma Ali menyampaikan bahwa ada dua factor penting yang berpengaruh terhadap karakter, yakni *factor endegonus* (faktor hereditas) dan *factor eksogenus* (pengaruh lingkungan, khususnya pendidikan). Namun, para ahli memandang bahwa faktor pendidikan dalam pengertian umum, baik pendidikan dalam keluarga, masyarakat maupun sekolah, memberi sumbangan/kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan karakter. Hal ini berarti nilai-nilai luhur yang diperkenalkan dan dicontohkan melalui kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat serta melalui pendidikan di sekolah dapat mewarnai karakter seseorang, yang pada gilirannya dapat juga mewarnai karakter masyarakat bahkan karakter bangsa. Sedangkan nilai-nilai luhur bangsa ini dapat bersumber dari ajaran-ajaran agama serta kearifan lokal dan nasional.

Nilai-nilai luhur seperti gotong-royong, tolong-menolong,

¹⁷² Ibid hal 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat, malu melakukan perbuatan asusila dan kesalahan, tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, menghargai orang tua dan guru serta orang yang lebih tua, sopan dalam bertutur kata, santun dalam bertindak, dan semacamnya perlu digali kembali.¹⁷³

Sekolah adalah tempat yang sangat strategis untuk mendidik karakter, karena anak-anak dari semua lapisan akan mengenyam pendidikan di Sekolah. Selain itu anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di Sekolah, sehingga apa yang didapatkannya di sekolah akan mempengaruhi pembentukan karakternya.¹⁷⁴

Di setiap komunitas pasti terdapat masjid, atau gereja, atau institusi agama lainnya yang juga berfungsi membina agama masyarakat setempat. Pendidikan agama di tempat-tempat ibadah dapat menjadi wahana yang efektif untuk membina karakter anak-anak sekelilingnya. Peran masjid misalnya selain mengajarkan mangaji dan syariat kepada anak-anak, sebaiknya juga lebih banyak difokuskan pada pembinaan akhlak mulia, baik secara konsep maupun dengan praktek-praktek konkrit (bagaimana menghormati orang tua, berlaku jujur dan amanah, disiplin dan tanggung jawab, menjaga kebersihan dan sebagainya). Anak-anak dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial (menyantuni fakir miskin, kerja bakti, mengunjungi panti jompo, dan lain-lain). Selain itu, anak-anak perlu diajarkan bagaimana menghormati pemeluk agama-agama lain yang berbeda, karena banyak para

¹⁷³Media Informasi Kemenag *Ikhlās*, edisi Oktober 2011

¹⁷⁴ Megawangi, 2001. *Mengapa Pendidikan Karakter?*. Op. cit. hlm. 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guru agama (baik itu ustadz ataupun pendeta) yang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa agama-agama lainnya adalah tidak bagus, sehingga timbul rasa curiga dan kesombongan dalam beragama.¹⁷⁵

Beban Kurikulum yang semakin berat, lebih parah lagi hampir sepenuhnya diorientasikan pada pengembangan ranah kognitif belaka, dan itu pun disampaikan melalui pola *delivery system*. Sedangkan ranah afeksi dan psikomotorik hampir tidak mendapat perhatian untuk pengembangan sebaik-baiknya. Padahal pengembangan kedua ranah ini sangat penting dalam pembentukan akhlak, moral dan budi pekerti atau singkatnya watak dan karakter yang baik.¹⁷⁶ Indonesia Heritage Foundation (IHF) (2001) telah menyusun serangkaian nilai yang selayaknya diajarkan kepada anak-anak, yang kemudian dirangkum menjadi 9 pilar karakter, yaitu:

- (1) Cinta Tuhan dan Segenap Ciptaannya (*love Allah, trust, reverence, loyalty*)
- (2) Kemandirian dan Tanggung jawab (*Responsibility, excellence, self reliance, discipline, orderliness*)
- (3) Kejujuran/amanah, bijaksana (*trustworthiness, reliability, honesty*)
- (4) Hormat dan Santun (*respect, courtesy, obedience*)
- (5) Demawan, Suka Menolong dan Gotong Royong (*Love, compassion, caring, empathy, generosity, moderation, cooperation*)
- (6) Percaya diri, Kreatif, dan Pekerja Keras (*confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm*)
- (7) Kepemimpinan dan Keadilan (*justice, fairness, mercy, leadership*)

¹⁷⁵ Megawangi, 2001. *Mengapa Pendidikan Karakter?*. Op.cit., hlm. 41

¹⁷⁶ Zuriyah, *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif, Perubahan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (8) Baik dan Rendah Hati (*Kindness, friendliness, humility, modesty*)
- (9) Toleransi dan Kedamaian dan Kesatuan (*tolerance, flexibility, peacefulness, unity*).

4. Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan

a) Pengertian Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses pendidikan karena lembaga berfungsi sebagai mediator dalam mengatur jalannya pendidikan. Pada zaman sekarang ini tampaknya tidaklah disebut pendidikan jika tidak ada lembaganya.

Secara etimologi lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga mengandung dua arti, yaitu: 1) pengertian secara fisik, materil, kongkrit, dan 2) pengertian secara non-fisik, non-materil, dan abstrak.¹⁷⁷

Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut *institute* (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan lembaga dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut *institution*, yaitu suatu sistem norma untuk

¹⁷⁷Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet ke.9, hlm. 277.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian nonfisik disebut dengan pranata.¹⁷⁸

Secara terminologi, lembaga pendidikan dengan orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Rumusan definisi yang dikemukakan ini memberikan penekanan pada sikap tanggung jawab seseorang terhadap peserta didik, sehingga dalam realisasinya merupakan suatu keharusan yang wajar bukan merupakan keterpaksaan. Definisi lain tentang lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.¹⁷⁹

Daud Ali dan Habibah Daud menjelaskan bahwa ada dua unsur yang kontradiktif dalam pengertian lembaga, pertama pengertian secara fisik, materil, kongkrit dan kedua pengertian secara non fisik, non materil dan abstrak. Terdapat dua versi pengertian lembaga dapat dimengerti karena lembaga ditinjau dari segi fisik menampilkan suatu badan dan sarana yang didalamnya ada beberapa orang yang menggerakkannya, dan ditinjau dari aspek

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ *Ibid.* hlm. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

non fisik lembaga merupakan suatu sistem yang berperan membantu mencapai tujuan.¹⁸⁰

Secara garis besar lembaga pendidikan merupakan suatu tempat dimana terjadi transfer nilai-nilai positif dari satu pihak ke pihak lainnya. Ada beberapa pendapat para ahli menyangkut apa itu lembaga pendidikan, yaitu :

- 1) Menurut Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati Lembaga Pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik.
- 2) Menurut Enung K. Rukiyati, Fenti Himawati, Lembaga Pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses kebudayaan.
- 3) Menurut Hasbullah, Lembaga Pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- 4) Menurut Prof. Dr. Umar Tirtarahardja dan Drs. La Sula. Lembaga Pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

¹⁸⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang. Sekolah merupakan bentuk konkrit dari lembaga pendidikan.

Kata lembaga dalam kamus bahasa indonesia modern adalah asal mula, bakal, bentuk asli, badan keilmuan. Dalam bahasa Inggris lembaga dalam pengertian fisik disebut *intitute*, sarana (organisasi) untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak adalah *institution*, suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa dan mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Jadi, yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja diadakan ada yang tidak usaha sadar dari orang dewasa yang normatif disebut pendidikan. Sedang yang lain disebut pengaruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada tiga, yaitu : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini disebut lembaga pendidikan atau satuan pendidikan.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari Lembaga Pendidikan formal, Non-Formal, dan Informal.

1. Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah)

Sekolah dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal karena diadakan di sekolah atau tempat tertentu, teratur / sistematis, mempunyai jenjang dan dalam kurun waktu tertentu, serta berlangsung mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi, berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan.

Pada umumnya lembaga formal adalah tempat yang paling memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk membina generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah karena dalam rangka pengembangan bangsa dibutuhkan pendidikan, maka jalur yang ditempuh untuk mengetahui outputnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktifitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum.

Ciri-ciri lembaga pendidikan formal :

- 1) Diselenggarakan dalam kelas terpisah menurut jenjangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ada persyaratan usia.
- 3) Ada jangka belajar tertentu.
- 4) Ada jadwal waktu belajar.
- 5) Proses belajar diatur secara tertib dan terstruktur.
- 6) Materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum dan dijabarkan dalam silabus tertentu.
- 7) Materi pembelajaran lebih banyak bersifat akademis intelektual dan berkesinambungan.
- 8) Guru mengajarkan menggunakan metode, media, dan urutan pengajaran tertentu.
- 9) Ada sistem rapor, evaluasi belajar, serta ijazah.
- 10) Sekolah punya anggaran pendidikan yang dirancang dalam kurun waktu tertentu.

Fungsi Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah) adalah :

- Membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar, memperbaiki dan memperdalam atau memperluas, tingkah laku anak atau peserta didik yang dibawa dari keluarga serta membantu mengembangkan bakat.
- Mengembangkan kepribadian peserta didik lewat kurikulum agar Peserta didik dapat bersosialisasi dengan guru, karyawan, teman dan masyarakat tertentu. Peserta didik belajar taat kepada peraturan atau mengerti tentang disiplin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mempersiapkan peserta didik terjun di masyarakat berdasarkan norma – norma yang berlaku.

Jenjang lembaga pendidikan formal di bagi menjadi 3 :

- 1) Pendidikan tinggi.
- 2) Pendidikan Menengah yang terdiri dari SMA.
- 3) Pendidikan dasar.

Tujuan Pengadaan lembaga pendidikan formal :

- 1) Tempat sumber ilmu pengetahuan
 - 2) Tempat untuk mengembangkan bangsa
 - 3) Tempat untuk menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu penting guna bekal kehidupan di masyarakat sehingga siap pakai.
2. Lembaga Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Sanggar, dll.

Pendidikan non formal meliputi pendidikan dasar, dan pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar mencakup pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan fungsional, dan keaksaraan lanjutan paling banyak ditemukan dalam pendidikan usia dini (PAUD), Taman Pendidikan Al Quran (TPA),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun Pendidikan Lanjut Usia. Pemberantasan Buta Aksara (PBA) serta program paket A (setara SD), paket B (setara B) adalah merupakan pendidikan dasar. Pendidikan lanjutan meliputi program paket C (setara SLTA), kursus, latihan keterampilan lain baik dilaksanakan secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Pendidikan Non Formal mengenal pula Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai pangkalan program yang dapat berada di dalam satu kawasan setingkat atau lebih kecil dari kelurahan/desa. PKBM dalam istilah yang berlaku umum merupakan padanan dari *Community Learning Center* (CLC) yang menjadi bagian komponen dari *Community Center* ciri-cirinya adalah :

1. Program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Materi yang diberikan bersifat praktis atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan segera dapat dipenuhi melalui pendidikan singkat.
3. Waktu yang diperlukan relatif singkat.
4. Relatif murah.
5. Usia peserta berbeda-beda.
6. Jenjang kelas tidak menunjukkan tingkatan yang jelas.
7. Pelaksanaan kegiatan disusun melalui perencanaan yang baik.
8. Tujuan pendidikan terarah untuk mendapat pekerjaan atau meningkatkan taraf hidup.
9. Waktu dan tempat belajar disesuaikan dengan yang membutuhkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Umumnya berdampingan dengan lembaga formal.

11. Muncul karena ada perubahan cepat dalam masyarakat.

Pendidikan In Formal

Pendidikan in formal ini terutama berlangsung di tengah keluarga, namun mungkin juga berlangsung di lingkungan sekitar keluarga tertentu, perusahaan, pasar, terminal dan lain – lain yang berlangsung setiap hari tanpa ada batas waktu.

Kegiatan pendidikan ini tanpa suatu organisasi yang ketat tanpa adanya program waktu, (tak terbatas), dan tanpa adanya evaluasi. Adapun alasannya di atas pendidikan in formal ini tetap memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan pribadi seseorang atau peserta didik.

Pendidikan in formal ini mempunyai tujuan tertentu, khususnya untuk lingkungan keluarga atau rumah tangga, lingkungan desa, lingkungan adat. Adapun ciri-cirinya adalah:

1. Tidak terikat tempat dan waktu.
2. Tidak terikat jenjang usia.
3. Dapat berlangsung tanpa ada guru dan murid secara khusus.
4. Tidak menggunakan metode tertentu.
5. Tanpa menggunakan rencana pembelajaran (kurikulum).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pengertian Pelatihan

Menurut Robert dan Jackson,¹⁸¹ pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai tujuan organisasi melalui tahap penilaian, implementasi dan evaluasi. Pelatihan menurut Bernadin dan Russel yang dikutip oleh Gomes pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki kinerja pegawai pada suatu perusahaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya.¹⁸²

Sedangkan pelatihan menurut Mathis Robert Wayne Mondy.¹⁸³ adalah aktifitas yang dirancang untuk pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan, yang dibutuhkan untuk pekerjaan saat ini. Berdasarkan pendapat para pakar diatas, maka pengertian pelatihan adalah suatu proses didalam suatu instansi untuk memperbaiki kinerja pegawainya.

Pelatihan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja karna dengan demikian dapat meningkatkan kinerja pegawai Mangkunegara¹⁸⁴. Hal senada juga tertulis dalam peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang diklat jabatan PNS yaitu pendidikan dan pelatihan didefenisikan sebagai proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja PNS.

¹⁸¹ Robert, Jackson John; Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta 2002 : Salemba empat.

¹⁸² Ibid.hlm.6.

¹⁸⁴ Mangkunegara: *Manajemen Suber Daya Manusia* : 2015 Jakarta



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Notoatmodjo, Soekidjo.¹⁸⁵ Pelatihan adalah suatu proses, teknik dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer pengetahuan seseorang kepada orang lain dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan latihan adalah suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja pegawai.

Pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan maksud untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari para pegawai sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Pelatihan berhubungan dengan penambahan pengetahuan umum. Pengertian tentang pelatihan adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan, dan kecakapan seorang karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

Upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam organisasi melalui pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dan mendapat perhatian yang serius dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Simomora,¹⁸⁶ menegaskan tujuan utama pelatihan pada intinya dapat dikelompokkan ke dalam enam bidang yaitu:

¹⁸⁵ Notoatmodjo, Soekidjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta. Sarwono, Jonathan. 2009.

¹⁸⁶ Henry Simamora, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 1. ... Buku 1, Alih Bahasa: Jimmy Sadeli dan Bayu. Prawira Hie, Salemba. Empat. Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memperbaiki kinerja Pegawai-pegawai yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan-keterampilan merupakan calon-calon utama pelatihan. Kendatipun pelatihan tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang tidak efektif, program pelatihan dan pengembangan yang sehat kerap berfaedah dalam meminimalkan masalah-masalah ini. Pada saat jumlah kekosongan melebihi jumlah pelamar, satu-satunya alternative manajemen adalah mengangkat dan mempromosikan pelamar dengan sedikit atau tanpa keahlian-keahlian kerja dan menutupi kepincangan itu dengan pelatihan.
- b. Memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan (*training*) memastikan bahwa pegawai dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Perubahan teknologi, pada gilirannya, berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan sering berubah dan keahlian serta kemampuan pegawai mestilah di mutakhirkan melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi tersebut secara sukses dapat diintegrasikan kedalam organisasi.
- c. Mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan. Sering seorang pegawai baru tidak memiliki keahlian-keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi “*job competent*” yaitu mampu mencapai output dan standar kualitas yang diharapkan, sebab pertama, sistem seleksi yang tidak sempurna, meskipun hasil-hasil tes, wawancara dan data lainnya mungkin menunjukkan probabilitas yang tinggi akan kesuksesan pekerjaan oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelamar pekerjaan. Kedua, manajemen dengan sengaja mengangkat pegawai-pegawai yang membutuhkan pelatihan agar bekerja pada tingkat standar. Ketiga, kerap kali manajemen mengangkat pegawai-pegawai yang memiliki bakat untuk mempelajari berbagai bakat untuk mempelajari berbagai pekerjaan rendah atau semi ahli dibandingkan dengan pegawai ahli dalam suatu bidang pekerjaan. Untuk mempelajari keahlian khusus pegawai tersebut mengikuti pelatihan yang disediakan organisasi.

- d. Membantu memecahkan permasalahan non operasional. Para pemimpin harus mencapai tujuan-tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumberdaya : kelangkaan sumber daya financial dan sumberdaya teknologi manusia (*human, teknologi, resource*), dan kelimpahan finansial, manusia dan teknologi. Serangkaian pelatihan dalam berbagai bidang yang diberikan organisasi maupun konsultan luar membantu kalangan pegawai dalam memecahkan masalah-masalah organisasional dan melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif.
- e. Mempersiapkan pegawai untuk promosi. Salah satu cara yang menarik, menahan dan memotivasi pegawai adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Mengembangkan kemampuan promorsional karyawan adalah konsisten dengan kebijakan dengan personalia untuk promosi dari dalam, pelatihan adalah mengorientasikan pegawai-pegawai baru terhadap organisasi dan pekerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi. Misalnya sebagian besar pemimpin adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan-tantangan baru pada pekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktifitas-aktifitas yang membuahkan efektifitas organisasi yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua pegawai.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa dengan pendidikan dan pelatihan maka pegawai akan lebih memahami maksud, tujuan, serta tugas pokok organisasi. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu pegawai untuk menambah kemampuan dan menimbulkan perubahan dan kebiasaan-kebiasaan pegawai dalam bekerja, misalnya dalam sikapnya terhadap pekerjaan sehari-hari.

Pelatihan akan berhasil jika proses mengisi kebutuhan pelatihan yang benar. Pada dasarnya kebutuhan itu adalah untuk memenuhi kekurangan pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap dengan masing-masing kadar yang bervariasi. Kebutuhan pelatihan dapat digolongkan menjadi:

- a. Kebutuhan memenuhi kebutuhan sekarang, kebutuhan ini biasanya dapat dikenali dari prestasi pegawai yang tidak sesuai standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu.
- b. Memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya, pada tingkat hirarki manapun dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan, ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan untuk mengatasi kejenuhan, ada juga yang menyebutkan untuk membentuk orang generalis.

- c. Untuk memenuhi tuntutan perubahan, perubahan-perubahan baik internal (perubahan system, struktur organisasi) maupun eksternal (perubahan teknologi, perubahan orientasi bisnis perusahaan) sering memerlukan tambahan pengetahuan baru, Veithzal Rivai .¹⁸⁷

c) Pengertian Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan (diklat) adalah suatu kegiatan yang disengaja dan terencana yang diprogramkan dan dikembangkan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman bagi seorang karyawan atau pegawai khususnya pegawai negeri sipil dengan maksud untuk membentuk pribadi yang prestatif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab serta profesional dalam bidang kerja dan jabatan yang dipercayakan padanya Widi Asih Nurhajati dan Bachtiar Siaiful Bachri,¹⁸⁸ Sementara menurut Endang Prabandari¹⁸⁹ Pelatihan diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk memodifikasi sikap, pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman belajar guna mencapai kinerja efektif pada suatu sejumlah aktifitas.

¹⁸⁷ Veithzal Rivai, 2004, “ *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

¹⁸⁸ Widi Asih Nurhajati dan Bachtiar Siaiful Bachri; *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Berbasis Kompetensi Dalam Membangun Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS)* ; Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktek) Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017 e-ISSN 2527-6891.

¹⁸⁹ Endang Prabandari; *Model Desain Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Masalah Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan*, Jurnal Manajerial, ISSN : 1412-6613, E-ISSN : 2527-4570 . a



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Tujuan Pendidikan dan Pelatihan.

Menurut Maria Montessori¹⁹⁰ Pendidikan antikorupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu siswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

Tujuan utama pelatihan yang dijelaskan oleh Simamora,¹⁹¹ pada intinya dapat dikelompokkan ke dalam enam bidang yaitu:

a. Memperbaiki kinerja.

Pegawai-pegawai yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan-keterampilan merupakan calon-calon utama pelatihan. Kendatipun pelatihan tidak dapat memecahkan semua masalah

¹⁹⁰ Maria Montessori ; *Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah*, Jurnal Wacana : Edisi 14 Tahun 2002.

¹⁹¹ Simamora: 1999 : *Sumber Daya Manusia*, Edisi ke-2, Jakarta: Salemba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja yang tidak efektif, program pelatihan dan pengembangan yang sehat kerap berfaedah dalam meminimalkan masalah-masalah ini. Pada saat jumlah kekosongan melebihi jumlah pelamar, satu-satunya alternatif manajemen adalah mengangkat dan mempromosikan pelamar dengan sedikit atau tanpa keahlian-keahlian kerja dan menutupi kepincangan itu dengan pelatihan.

- b. Memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi.

Melalui pelatihan (*training*) memastikan bahwa pegawai dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Perubahan teknologi, pada gilirannya, berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan sering berubah dan keahlian serta kemampuan pegawai mestilah di mutakhirkan melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi tersebut secara sukses dapat diintegrasikan kedalam organisasi.

- c. Mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan.

Sering seorang pegawai baru tidak memiliki keahlian-keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi "*job competent*" yaitu mampu mencapai output dan standar kualitas yang diharapkan, sebab pertama, sistem seleksi yang tidak sempurna, meskipun hasil-hasil tes, wawancara dan data lainnya mungkin menunjukkan probabilitas yang tinggi akan kesuksesan pekerjaan oleh pelamar pekerjaan. Kedua,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegementdengan sengaja mengangkat pegawai-pegawai yang membutuhkan pelatihan agar bekerja pada tingkat standar.Ketiga, kerap kali manajemen mengangkat pegawai-pegawai yang memiliki bakat untuk mempelajari berbagai bakat untuk mempelajari berbagai pekerjaan rendah atau semi ahli dibandingkan dengan pegawai ahli dalam suatu bidang pekerjaan. Untuk mempelajari keahlian khusus pegawai tersebut mengikuti pelatihan yang disediakan organisasi.

- d. Membantu memecahkan permasalahan noperasional Para pemimpin harus mencapai tujuan-tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumberdaya : kelangkaan sumber daya financial dan sumberdaya teknologi manusia (*human, teknologi, resource*), dan kelimpahan finansial, manusia dn tehnologi. Serangkaian pelatihan dalam berbagai bidang yang diberikan organisasi maupun konsultan luar membantu kalangan pegawai dalam memecahkan masalah- masalah organisasional dan melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif.
- e. Mempersiapkan pegawai untuk promosi. Salah satu cara yang menarik, menahan dan memotivasi pegawai adalah melalui program penegembangan karir yang sistematis. Mengembangkan kemampuan promorsional karyawan adalah konsisten dengan kebijakan dengan personalia untuk promosi dari dalam, pelatihan adalah mengorientasikan pegawai-pegawai baru terhadap organisasi dan pekerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi, misalnya sebagian besar pemimpin adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan-tantangan baru pada pekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktifitas-aktifitas yang membuahkan efektifitas organisasi yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua pegawai.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa dengan pendidikan dan pelatihan maka pegawai akan lebih memahami maksud, tujuan, serta tugas pokok organisasi. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu pegawai untuk menambah kemampuan dan menimbulkan perubahan dan kebiasaan-kebiasaan pegawai dalam bekerja, misalnya dalam sikapnya terhadap pekerjaan sehari-hari.

Pendidikan dan Pelatihan akan berhasil jika proses mengisi kebutuhan pelatihan yang benar. Pada dasarnya kebutuhan itu adalah untuk memenuhi kekurangan pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap dengan masing-masing kadar yang bervariasi. Kebutuhan pelatihan dapat digolongkan menjadi:

- a. Kebutuhan memenuhi kebutuhan sekarang, kebutuhan ini biasanya dapat dikenali dari prestasi pegawai yang tidak sesuai standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu.
- b. Memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya, pada tingkat hirarki manapun dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan, ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan untuk mengatasi kejenuhan, ada juga yang menyebutkan untuk membentuk orang generalis.

- c. Untuk memenuhi tuntutan perubahan, perubahan-perubahan baik internal (perubahan system, struktur organisasi) maupun eksternal (perubahan teknologi, perubahan orientasi bisnis perusahaan) sering memerlukan tambahan pengetahuan baru.

Adapun tujuan dari Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Tujuan ini dijabarkan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
- b) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pengembangan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Hal yang penting dari tujuan Pendidikan dan Pelatihan di atas adalah bahwa setelah mengikuti Pendidikan dan pelatihan peserta dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merubah pengetahuan, sikap dan perilakunya. Implikasinya adalah bahwa dengan diklat perubahan ada pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dari peserta diklat yang dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 1. Tujuan Diklat.

Diklat diselenggarakan agar setelah mengikuti diklat peserta yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu; yang sebelumnya kurang responsif dan bertanggung jawab pada pekerjaannya menjadi lebih responsif dan bertanggung jawab, dan mempunyai sikap positif dalam bekerja; yang sebelumnya bermalas-malasan menjadi rajin, kreatif, mau bekerjasama dan inovatif dalam perilaku kerjanya.

Arifin,¹⁹² menjelaskan yang disebut kompetensi pada dasarnya adalah integrasi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, menjabarkan bahwa kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki

¹⁹² Arifin: 2015. *Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran Ppkn Untuk Pencapaian* :Yogyakarta: Power Book.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan, sikap dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Kompetensi juga ditegaskan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat menunjukkan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik- baiknya

Kompetensi dalam PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SPKN) diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

e) Tolak Ukur (indicator) Pendidikan dan Pelatihan.

Pendidikan dan Pelatihan dikatakan berhasil jika sasaran yang diinginkan telah tercapai, yaitu dengan menpelatihan diartikan sebagai ingkatkan kualitas kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugas- tugasnya. Adapun yang menjadi tolak ukur pelatihan menurut Mangkunegara¹⁹³.

- a. Tujuan dan sarana pelatihan
- b. Materi latihan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
- c. Metode latihan harus sesuai dengan tingkat kemampuan pegawai menjadi peserta
- d. Peserta latihan harus memenuhi syarat yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri

¹⁹³ Mangkunegara: *Manajemen Suber Daya Manusia* : 2015 Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Pasal 2 menyebutkan bahwa Diklat bertujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), berdasarkan fungsinya, diklat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

a) Diklat Prajabatan

Diklat prajabatan diperuntukkan bagi pegawai-pegawai baru (calon PNS yang telah dinyatakan lulus dan diterima sebagai pegawai baru) untuk meningkatkan keterampilannya dalam pelaksanaan tugas dikemudian hari. Materi yang diberikan dalam diklat prajabatan adalah hal-hal umum. Hal - hal tersebut adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan, peraturan, dan kebijaksanaan yang berlaku dalam organisasi. Diklat prajabatan terdiri dari :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Diklat prajabatan golongan I untuk diangkat menjadi PNS golongan I;
- b. Diklat prajabatan golongan II untuk diangkat menjadi PNS golongan II;
- c. Diklat prajabatan golongan III untuk diangkat menjadi PNS golongan III.

Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam diklat prajabatan:

1. Calon PNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan.

Diklat prajabatan harus diikuti oleh calon PNS selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatan calon PNS

2. Calon PNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk dapat diangkat menjadi PNS

Secara khusus Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS, Disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya organisasinya, etika organisasi pemerintah dan materi-materi lainnya agar calon PNS mampu melaksanakan tugas dan perannya serta wajib diikuti oleh semua CPNS.

- b) Diklat Dalam Jabatan.

Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, sikap PNS kearah yang lebih baik. Hal tersebut dimaksudkan agar PNS dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diklat dalam jabatan terbagi kepada beberapa jenis:

1) Diklat kepemimpinan

Diklat kepemimpinan atau yang dikenal dengan sebutan Diklat Pim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjangnya.

Peserta Diklat Pim terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan atau telah menduduki jabatan struktural;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengikuti Diklat Pimpinan tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklat Pimpinan tingkat bawahnya.

Diklat Pimpinan terdiri dari beberapa tingkatan/jenjang:

- a. Diklat Pimpinan Tingkat IV adalah Diklat Pimpinan untuk jabatan struktural Eselon IV;
- b. Diklat Pimpinan Tingkat III adalah Diklat Pimpinan untuk jabatan struktural Eselon III;
- c. Diklat Pimpinan Tingkat II adalah Diklat Pimpinan untuk jabatan struktural Eselon II;
- d. Diklat Pimpinan Tingkat adalah Diklat Pimpinan untuk jabatan struktural Eselon I

Penyelenggaraan diklat pimpinan untuk setiap tingkatan jabatan struktural selalu disesuaikan dengan rencana diklat maupun formasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan struktural. Dalam pengisian jabatan struktural pada masing-masing instansi disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

2) Diklat Fungsional

Diklat fungsional adalah diklat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperuntukkan bagi pejabat atau calon pejabat fungsional.

- a. Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- b. Jenis dan jenjang diklat fungsional untuk jabatan fungsional sebagaimana tersebut butir (a) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan. Diklat fungsional diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

3). Diklat Tekhnis.

Diklat tekhnis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi tekhnis yang disyaratkan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diklat tekhnis yang dapat dilaksanakan secara berjenjang. Jenis dan jenjang diklat tekhnis ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Peserta diklat tekhnis adalah pejabat tertentu ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membutuhkan peningkatan kompetensi tekhnis dalam pelaksanaan tugas yang diembannya yang senantiasa dievaluasi secara berkala oleh pejabat pembina kepegawaian dengan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan saran dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta tim seleksi diklat instansi.

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dan karya ilmiah yang terkait pendidikan keluarga yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian di antaranya; karya ilmiah berupa disertasi "Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa (Studi Evaluasi dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bermodal PAKEM di Sekolah Menengah Pertama)" oleh Harmanto/ NIM. 0908423/ Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung-2013. Kesimpulan karya ilmiah ini bahwa Program Pendidikan Antikorupsi di SMP menjadi bagian pendidikan karakter yang disisipkan dan di integrasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mempunyai sepuluh (10) nilai utama dari dua materi tersebut. Sepuluh nilai tersebut terdiri dari: Religius, Jujur, Toleran, Disiplin, Kerja keras, Demokratis, Semangat kebangsaan, Cinta tanah air, Peduli sosial, dan Tanggung jawab. Dalam Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di SMP diterapkan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan dalam proses pembelajaran Kewarganegaraan meliputi nilai religious, kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai keterbukaan, dan nilai tanggung jawab, dan sebagainya. Materi tersebut mencakup sepuluh (10) nilai yang mempunyai dua indikator, yaitu: indikator sekolah, dan indikator kelas yang dilaksanakan melalui program sekolah dan program kelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdapat faktor penunjang dan faktor penghambat. Faktor penunjang diantaranya: kepribadian tiap siswa, dan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang senantiasa membuat situasi penuh dengan kejujuran, sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu: kurangnya kesadaran siswa, masih terdapat siswa yang keluarganya kurang mendukung, lingkungan atau latar belakang siswa, kemampuan pemahaman materi siswa dan kemajuan teknologi, pengaruh negatif dari luar pribadi siswa dan kondisi yang memaksa siswa untuk berbuat tidak jujur, dan terlampaui seringnya tindakan korupsi masih adanya kebiasaan perilaku koruptif.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan Pendidikan antikorupsi di SMP yaitu: menghimbau pada orang tua agar berperan menanamkan nilai-nilai antikorupsi, mengingatkan serta menjadi suri teladan yang baik bagi setiap siswa, memberikan bimbingan melalui aktifitas ibadah, dan selalu menanamkan bahwa segala hal yang dilakukan seseorang akan mendapatkan balasan dari Allah swt. Dalam penelitian hanya fokus pada mata pelajaran PKn saja padahal yang serumpun dengan nilai-nilai yang disebutkan di atas adalah Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan bagian dari struktur kurikulum yang wajib dipelajari.

Tesis “Pembelajaran Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Kurikulum Aqidah Akhlak (Oleh: Gangsar Puji Astuti/S2-Menejemen PAI), karya ilmiah ini menjelaskan proses pembelajaran untuk pendidikan nilai-nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antikorupsi dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak menggunakan dua cara pembelajaran, yaitu dialog dan diskusi. Materi yang berkaitan dengan antikorupsi antara lain dalam pembahasan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Pada pokok bahasan akhlak terpuji terdapat anjuran untuk bersikap zuhud, amanah, tasamuh dan ta'awun. Sedangkan dalam bahasan akhlak tercela yaitu tentang wajibnya menghindari mencuri, berkhianat maupun tindak penggelapan. Di mana dalam materi ini di dalamnya mengandung nilai-nilai antikorupsi. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada Akhlak sehingga masih perlu ada pengembangan lebih luas melalui penelitian lanjutan, sehingga penelitian yang penulis angkat ini bisa merealisasi harapan tersebut.

Karya ilmiah “Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Islam (Tinjauan Normatif Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Antikorupsi). Konsep Pendidikan Antikorupsi yang direlevansikan dengan tinjauan normatif aspek kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam, kemudian mencoba menampilkan model Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Antikorupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program pendidikan antikorupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran antikorupsi, yaitu dengan model Pendidikan Antikorupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan Antikorupsi yang integratif-inklusif pada Pendidikan Agama Islam. Pertama, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Model Pendidikan Anti korupsi yang integratifinklusif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual.

Kajian yang terkait dengan penelitian pengembangan model kurikulum Pendidikan Antikorupsi ini, antara lain di tulis oleh Endang Prabandari.¹⁹⁴ Yang berjudul Model Desain Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Masalah Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan hasil Penelitiannya ditemukan bahwa kurikulum diklat guru SMK bidang Agroindustri, PPPPTK Pertanian dilakukan dengan pendekatan kompetensi, namun hasil diklatnya belum memberikan makna yang optimal bagi sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi belum dapat menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Temuan ini digunakan sebagai

¹⁹⁴Endang Prabandari: *Model Desain Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Masalah Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan*; Jurnal Manajerial, ISSN : 1412-6613, E-ISSN : 2527-4570 . a



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masukkan dalam pengembangan produk penelitian ini, yaitu: desain kurikulum pelatihan berbasis masalah.

Model desain kurikulum berbasis masalah ini dikembangkan dengan mengacu pada hasil *Training Need Analysis (TNA)* yang dilakukan oleh PPPPTK Pertanian. Sehingga secara keseluruhan isi model desain kurikulum diklat hasil penelitian ini telah sesuai dengan kebutuhan peserta diklat.

Pengembangan desain kurikulum pelatihan berbasis masalah ini telah terbukti dikembangkan sesuai dengan karakteristik pendekatan kurikulum berbasis masalah. Hal ini dapat ditunjukkan dari seluruh komponen yang ada di dalam kurikulum telah memenuhi karakteristik pendekatan berbasis masalah, demikian pula proses pengembangannya telah memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis masalah. Dengan demikian, secara hipotetik, model desain kurikulum ini dapat meningkatkan kebermanfaatan hasil diklat, baik untuk peserta diklat maupun untuk sekolah.

Model desain kurikulum berbasis masalah ini dalam implementasinya membutuhkan keterampilan berpikir tinggi, membutuhkan pemahaman pengetahuan secara mendalam, kemampuan mengintegrasikan berbagai pengetahuan, dan kemandirian yang tinggi untuk mengatasi berbagai masalah nyata dalam kehidupan. Atas dasar itu, model ini sangat sesuai untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diklat tingkat tinggi yang selama ini belum pernah dilakukan di PPPPTK Pertanian.

Langkah-langkah pengembangan desain kurikulum diklat berbasis masalah yang dikembangkan atas dasar kajian teori dan kajian empirik telah terbukti dapat untuk menyusun kurikulum berbasis masalah, khususnya untuk bidang Agroindustri. Hal ini tampak dari produk pengembangan yang dihasilkan berdasarkan langkah-langkah tersebut telah teruji memenuhi karakteristik sebagai kurikulum berbasis masalah.

Produk penelitian berupa model desain kurikulum berbasis masalah bagi guru SMK Program Studi Keahlian TPHP telah disusun dengan langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah pengembangan kurikulum berbasis masalah. Produk tersebut juga telah memenuhi karakteristik sebagai kurikulum berbasis masalah sehingga secara hipotetik dapat untuk meningkatkan kebermaknaan proses dan hasil diklat.

Desain kurikulum pelatihan berbasis masalah ini dikembangkan mengacu pada pola diklat yang dikembangkan oleh PPPPTK Pertanian, sehingga secara yuridis tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di PPPPTK Pertanian.

Kajian penelitian ini membahas model desain kurikulum Pendidikan dan pelatihan berbasis masalah bagi guru SMK yang dilakukan dengan pendekatan kompetensi, walaupun hasil Pendidikan dan pelatihannya belum memberikan makna optimal bagi sekolah. Dengan demikian prinsip-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rinsip kurikulum pengembangan kompetensi belum dapat menjawab beberapa persoalan yang dihadapi oleh sekolah. Sementara penelitian pengembangan model kurikulum antikorupsi yang penulis lakukan berorientasi kepada upaya perbaikan dan penyempurnaan materi kurikulum Pendidikan dan pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, yang dilakukan melalui proses penelitian dan pengembangan(Development Recearh).

Kajian Lain yang juga terkait dengan Penelitian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi adalah Penelitian yang dilakukan oleh Dumila Ayuningtyas.¹⁹⁵ dengan Judul Integrasi Kurikulum Antikorupsi Peluang dan Tantangan . Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan sebagai bahwa: a). Pengetahuan mahasiswa tentang pendidikan dan integritas kepemimpinan antikorupsi mayoritas masih rendah (128 orang/64,64%), sedangkan sisanya sebanyak 70 orang (35,35%) memiliki pengetahuan cukup; b). Keseluruhan mahasiswa yang menjadi responden menyetujui pentingnya pendidikan antikorupsi (198 orang/100%), demikian pula secara umum pandangan pakar meski ada yang pula yang menyampaikan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi pada kurikulum mahasiswa S2 sudah tidak efektif; c). Usulan metode kurikulum terbanyak adalah diskusi sebanyak 25 orang (66,7%), studi kasus sebanyak 24 orang (21,3%), kuliah umum sebanyak 19 orang (16,8%), roleplay sebanyak 18 orang (15,9%); d). Masih rendahnya

¹⁹⁵ Dumilah Ayuningtyas; Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang Dan Tantangan, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(10,93-107 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X, DOI:<https://doi.org/10.32697/Integritas.v6i11.375>@Komisi pemberantasan Korupsi .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulan urgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. FKM UI memiliki peluang untuk menerapkan dengan ketersediaan kepakaran dan dukungan sarana prasarana, selain adanya tantangan penyesuaian kurikulum formal.

Penelitian tentang Pendidikan antikorupsi, juga dilakukan oleh Ginanjar Hambali,¹⁹⁶ dengan judul Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum dapat dipraktikan di ruang-ruang kelas yaitu: (1) Program pelatihan dalam meningkatkan pemahaman guru terkait dengan materi antikorupsi serta bagaimana mengintegrasikannya ke dalam materi pelajaran;(2). Meningkatkan kemampuan guru dalam strategi dan/atau metode mengajar, sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik serta nilai- nilai antikorupsi berkembang dalam diri peserta didik, yang tercermin dalam sikap menolak perilaku dan tindakan nilai-nilai korupsi; (3). Program pelatihan harus ditindaklanjuti dengan pendampingan di lapangan, agar proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan; (4) Bagi Daerah yang sudah menyelenggarakan pendidikan antikorupsi, guru harus didorong untuk membuat praktik pembelajaran pendidikan antikorupsi dan memanfaatkan sumber atau bahan pembelajaran antikorupsi, dan KPK mempublikasikan inovasi pembelajaran praktik pendidikan antikorupsi di ruang kelas; (5).

¹⁹⁶. Ginanjar Hambali: Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran : INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,6(1)15-30 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X, DOI:<https://doi.org/10.32697/Integritas.v6i1.375>@Komisi Pemberantasan Korupsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendorong pihak sekolah untuk mengimplementasikan program pendidikan antikorupsi, dan KPK menyosialisasikan contoh sekolah yang berhasil mengimplementasikan program antikorupsi; (6). Di tengah segala keterbatasan KPK dalam implementasi pendidikan antikorupsi, peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan harus ditingkatkan.

Penelitian terkait dengan kajian pengembangan kurikulum Pendidikan antikorupsi, juga dilakukan oleh Praise Junta W.S Siregar, Nikki Tirta¹⁹⁷; judul Implementasi Stimulan Reward Punishment Pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi. Dari kajian penelitiannya dapat diketahui bahwa Pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara mengenai penindakan terhadap pelaku (hilir), melainkan juga perlu adanya upaya pembentukan kultur di masyarakat (*life habits*), yang dimulai pada generasi muda di tingkat pendidikan dasar (hulu). Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu sarana dalam upaya pencegahan. Diperlukan stimulan untuk menciptakan kultur “berani” dan “prestise” ketika peserta didik menjalankan nilai-nilai antikorupsi. Stimulan tersebut berupa pemberian penghargaan (*reward*) kepada peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh hanya satu institusi, seperti KPK. Perlu ada bentuk konkrit dari pemerintah, terutama melalui lembaga yang mengurus soal pendidikan dasar. Misalnya saja pada kurikulum pendidikan dasar sektor formal perlu disertakan

¹⁹⁷ Praise Junta W.S Siregar, Nikki Tirta: Implementasi Stimulan Reward Punishment Pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi : INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,6(1)153-168 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X, DOI:https://doi.org/10.32697/Integritas.v6i1.375@Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur tetap (protap) bagaimana implementasi nilai-nilai antikorupsi dijalankan, dan terutama dihargai. Bentuknya dapat berupa buku pedoman, petunjuk pelaksanaan, kiat-kiat aktivitas belajar-mengajar, dan sebagainya. Diharapkan protap aktivitas penghargaan ini dapat menjadi pemantik bagi sektor pendidikan informal dan nonformal, sehingga tumbuh kultur pendidikan yang memberikan penghargaan kepada semangat antikorupsi dari anak-anak

Pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan rumah kita bersama, sehingga perlu adanya suatu kesadaran dari berbagai pihak bahwa sikap korupsi merupakan sikap yang harus diperangi bersama. Bentuk “memerangi korupsi” dapat kita kerjakan secara bersamaan dalam dua lini. Di satu lini, sanksi wajib diberikan kepada mereka yang berani menjalankan nilai-nilai koruptif. Pada lini yang lain apresiasi (baik ekstrinsik maupun intrinsik) harus diberikan kepada mereka yang berani menjalankan nilai-nilai antikorupsi.

Penelitian yang terkait dengan kajian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi juga dilakukan oleh Sumiarti¹⁹⁸, yang berjudul Pendidikan Anti-Korupsi Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa Pendidikan antikorupsi menjadi sangat penting sebagai upaya sistematis dan massif dalam pemberantasan korupsi. Untuk melakukan hal tersebut, maka pendidikan harus dibenahi dengan cara mengedepankan proses pendidikan yang benar-benar ditujukan kepada pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Sudah saatnya, distorsi dalam

¹⁹⁸ Sumiarti: Pendidikan Anti-Korupsi, Jurnal Pemikiran Alternatif, INSANIA , Vol 12 No 2. Mei – Agustus 2017, 189



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan pengabaian nilai-nilai moral diperbaiki agar melahirkan generasi muda yang tidak mentolerir korupsi.

Kasinyo Harto¹⁹⁹ juga melakukan kajian dengan judul : Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. Berdasarkan kajian tergambar bahwa: Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya mengajarkan berbagai cara berhubungan dengan orang lain dalam memajukan budi pekerti, tindakan untuk menentang korupsi dan bertanggung jawab. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi itu berguna dan dibutuhkan bagi kehidupan bermasyarakat karena perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri (etika, norma), lingkungan dan negara.

Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 memberikan perhatian kepada manusia untuk saling-menjalankan amanat dan berbuat adil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia. Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk berlaku curang, bohong dan khianat. Nilai-nilai ini mengingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Menjalankan amanat dan berbuat adil ditujukan pada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, ras atau keturunan. Di dalam menjalankan amanat harus di serahkan kepada orang yang berhak

¹⁹⁹ Kasinyo Harto: Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama, Kasinyo Harto. Jurnal Raden Fatah , Volume 20 No 1. 2014.

menerimanya. Terlebih pada seorang pejabat negara mereka mendapat amanat dari rakyat untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, adil dan tidak korupsi sehingga rakyat dapat hidup sejahtera dan penuh kedamaian, karena dampak dari korupsi sangatlah menyengsarakan rakyat atau publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas pengembangan model kurikulum Pendidikan antikorupsi pada Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau adalah penelitian *Research and Development* (Penelitian dan Pengembangan) yang mengadopsi pendapat Borg & Gall²⁰⁰; yaitu suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk Pendidikan. Penelitian pengembangan itu sendiri dilakukan berdasarkan suatu model pengembangan industry, yang temuan-temuannya dipakai untuk mendesain produk dan prosedur, yang kemudian secara sistematis dilakukan uji coba lapangan, divalusi disempurnakan untuk memenuhi criteria keefetifan, kualitas, dan standar tertentu²⁰¹

Penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang dikemukakan oleh Borg & Gall ini, terdiri dari 10 (sepuluh) Langkah, yaitu : (1) Melakukan Penelitian Dan Pengumpulan Informasi, (*Research and information collecting*), (2) Melakukan Perencanaan, (Planning), (3) Mengembangkan Bentuk Awal Produk (*Develop preliminary form of product*), (4) Melakukan Uji Lapangan Kelompok

²⁰⁰ W.R Borg dan Gall, M.D Educational Research: An Introduction. (New York: Longman, 1983) hlm.775.

²⁰¹ Punaji, Stryasari, Metode Pendidikan dan pengembangan, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

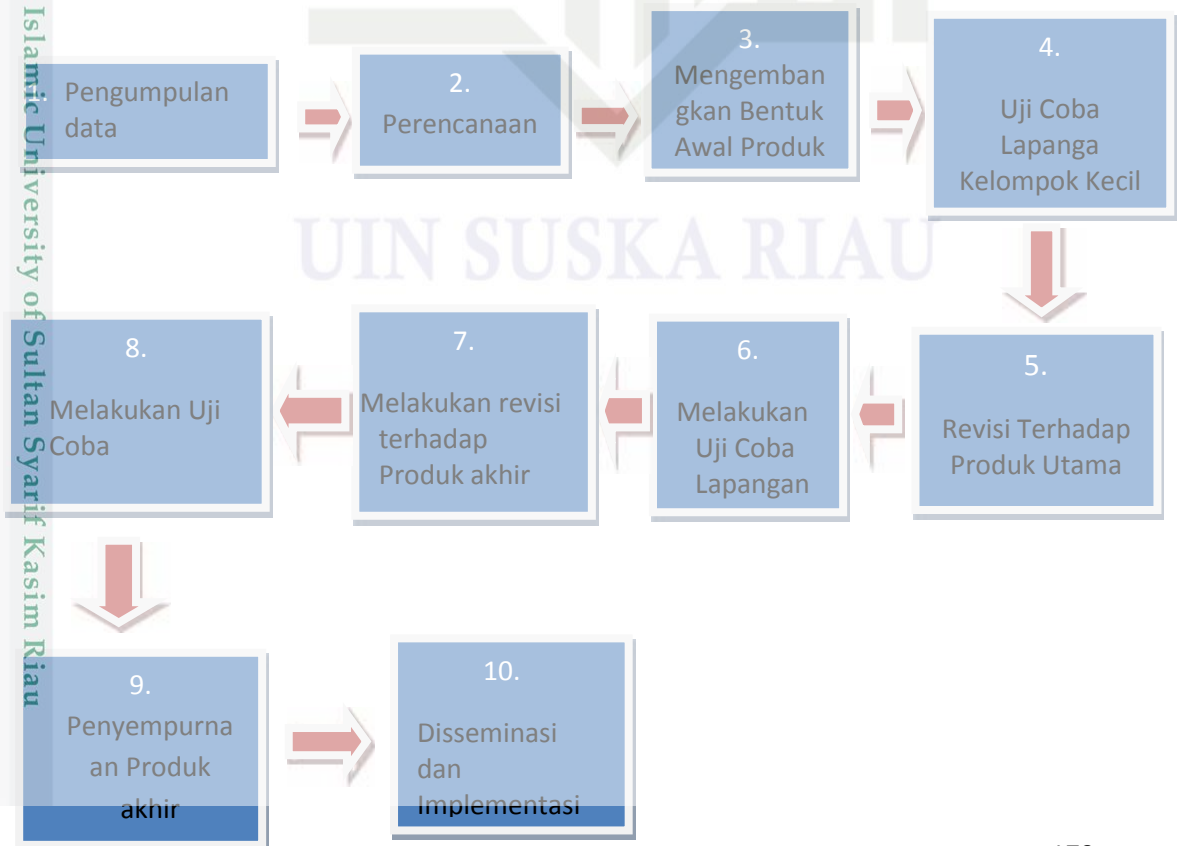
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecil (*Preliminary field testing*), (5) Melakukan Revisi Terhadap Produk Utama, (*Main product revision*), (6) Melakukan Pengujian Lapangan (*Main field testing*), (7) Melakukan Refisi Tahap Produk Akhir (*Operational product revision*), (8). Melakukan Uji Lapangan (*Operational field testing*), (9) Penyempurnaan Produk Akhir (*Final product revision*), dan (10) Desimilasi Dan Implementasi (*Dissemination and implementation*).

B. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Pengembangan.

Prosedur pengembangan model kurikulum Pendidikan anti korupsi pada Pendidikan dan pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

Gambar 2.1 : Prosedur Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan gambar prosedur penelitian di atas dapat diuraikan; sebagai berikut :

1. Penelitian awal dan Pengumpulan informasi (*Research and information collecting*);

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan informasi dan data awal, terkait dengan bentuk kurikulum yang digunakan selama ini pada Pendidikan dan pelatihan (diklat) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

2. Melakukan perencanaan penelitian (*Planning*);

Pada tahap ini penulis menyiapkan perencanaan penelitian terkait dengan, jumlah widyaiswara yang dilibatkan, Jumlah Peserta diklat, Para ahli Pendidikan antikorupsi yang dilibatkan, Penanggung jawab Lembaga Diklat, Kepala Bidang yang membidangi Pelaksanaan Diklat, Bidang yang membidangi mutu keberhasilan diklat, Komite penjamin mutu diklat, Jumlah uji coba yang akan dilakukan serta media dan sarana yang akan digunakan.

3. Desain Pengembangan Model Awal (*Develop preliminary form of product*);

Pada tahap ini penulis merumuskan desain pengembangan model awal terhadap kurikulum pendidikan antikorupsi pada Pendidikan dan pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau. Pengembangan model awal ini, penulis susun dalam rangka menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek-aspek kurikulum Pendidikan antikorupsi yang digunakan selama ini di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

4. Uji Coba Lapangan Terbatas (*Preliminary field testing*);

Pada tahap ini, penulis melakukan uji coba pada kelompok terbatas dengan penerapan kurikulum Pendidikan antikorupsi berdasarkan desain awal yang telah penulis susun sebelumnya.

5. Revisi Terhadap Desain Awal (*Main product revision*);

Pada tahap ini penulis Bersama para ahli kurikulum antikorupsi, para praktisi, widyaiswara Pendidikan dan pelatihan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, 2). 2 (dua) orang Widyaiswara, 2). 4 (empat) orang Kepala Bidang dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, yaitu Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Pengembangan Integritas dan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, 5) Komite penjamin mutu, 6) 2 (dua) orang praktisi Antikorupsi, 7) Peserta Diklat (perwakilan) serta Promoto dan Co-Promotor dalam forum Group Discussion (FGD) merumuskan dan merevisi desain awal pengembangan model kurikulum pendidikan antikorupsi berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemui dari uji coba lapangan terbatas.

6. Melakukan Ujicoba Lebih Luas (*Main field testing*);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap ini hasil revisi kurikulum pendidikan anti korupsi yang dilakukan sebelumnya, diujicobakan kembali pada jumlah peserta didik yang lebih banyak.

7. Melakukan Revisi ke dua (*Operational product revision*);

Pada tahap ini dilakukan kembali revisi dan perbaikan terhadap kurikulum yang telah diuji cobakan pada tahap ke dua, terkait dengan kurang-kekurang yang dialami dengan kembali melibatkan para pakar, praktisi, peserta diklat, promotor dan co-promotor .

8. Melakukan Ujicoba akhir (*Operational field testing*);

Ujicoba akhir ini melibatkan peserta diklat yang lebih banyak dari jumlah uji coba kedua. Ujia coba akhir ini bertujuan untuk menyempurnakan penyerapan kurikulum pendikan antikorupsi yang dilaksanakan di Pendidikan dan pelatihan diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

9. Finalisasi Desain Pengembangan Model (*Final product revision*);

Tahap ini merupakan tahap akhir finalisasi desain pengembangan model kurikulum pengembangan antikorupsi, yaitu disamping mengumpulkan masukan para praktisi, Widyaaiswara, peserta diklat, melainkan juga untuk mendapatkan rekomendasi dan pengakuan dari para pakar, promotor dan co-promotor terhadap pengembangan model Kurikulum Pendidikan Antikorupsi.

10. Disseminasi dan Implementasi (*Dissemination and implementation*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahap ini, setelah mendapat rekomendasi dan pengakuan dari para ahli praktisi, widyaiswara, peserta diklat pimpinan Lembaga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, serta Promotor dan Co-Promotor, maka selanjutnya dilakukan penyebaran (sosialisasi) dan implementasi terkait dengan model kurikulum pendidikan anti korupsi, antara lain melalui publikasi modul baru kurikulum Pendidikan antikorupsi pada Lembaga Pendidikan dan pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

C. Informen Penelitian

Informan dalam penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) model kurikulum Pendidikan antikorupsi pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, berjumlah 20 (dua puluh) Orang terdiri dari 1) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, 2) 3 orang Widyaiswara, 2) 4(empat) orang Kepala Bidang dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, yaitu Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Pengembangan Integritas dan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, 5) Komite penjamin mutu, 6) 2 (dua) orang praktisi Antikorupsi, 7). Peserta Diklat (perwakilan) serta Promoto dan Co- Promotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data Penelitian.

Sumber data penelitian dan pengembangan model kurikulum Pendidikan antikorupsi pada Pendidikan dan pelatihan (diklat) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, terdiri dari :

1. Data Primer: yaitu data utama berupa naskah kurikulum antikorupsi yang digunakan selama ini pada Pendidikan dan pelatihan (diklat) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau yang didasarkan pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor : Nomor 21 dan 22 tahun 2016, Perkalan Nomor 25 Tahun 2017 dan Perkalan Nomor 12 Tahun 2018, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, widyaiswara serta masukan dan pemikiran dari para pakar, praktisi antikoupsi, termasuk serta promotor dan Co-Promotor, terkait dengan kurikulum Pendidikan antikorupsi.
2. Data Skunder : Yaitu data pendukung yang diperoleh dari reteratur atau jurnal yang terkait dengan kurikulum pendidikan antikorupsi.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang disajikan pada hasil penelitian ini, dikumpulkan melalui teknik sebagai berikut :

1. Teknik wawancara

Wawancara bertujuan untuk menyempurnakan naskah kurikulum Pendidikan antikorupsi, berdasarkan masukan dari para ahli (expert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

review), praktisi antikorupsi, widyaiswara, peserta diklat dan kepala badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

2. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh dokumen atau naskah kurikulum Pendidikan anti korupsi yang digunakan selama ini oleh Lembaga Pendidikan dan pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, serta dokumen terkait lainnya seperti visi Pemerintah Daerah dan dokumen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

3. Uji coba lapangan (*experiment*)

Uji coba lapangan atau (*experiment*) dimaksudkan untuk menerapkan kurikulum Pendidikan antikorupsi yang telah direvisi oleh para ahli dan praktisi serta stakeholder lainnya sekaligus untuk menyempurnakan naskah kurikulum tersebut berdasarkan masukan dari para ahli, praktisi, dan stakeholder.

F. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, dilakukan melalui :

1. Uji Validasi Ahli (*exspert review*)

Uji validasi ahli dimaksudkan untuk menilai kelayakan naskah kurikulum Pendidikan antikorupsi sekaligus dilakukan revisi dan penyempurnaan terhadap naskah kurikulum tersebut. Para ahli yang terlibat melakukan validasi terhadap naskah kurikulum ini terdiri dari, ahli antikorupsi, praktisi bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurikulum antikorupsi dan kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

2. Uji Instrumen (Uji coba lapangan)

Uji Instrumen (Uji coba lapangan) dimaksudkan untuk menilai dan merevisi serta menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada penerapan kurikulum Pendidikan antikorupsi dilembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan proses hasil penelitian dan pengembangan (*Research and Development*), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurikulum Pendidikan antikorupsi yang digunakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau selama ini didasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, yang meliputi struktur kurikulum, klasifikasi, deskripsi, mata pelatihan, hasil belajar, indikator hasil keberhasilan dan jam pelajaran. Pada kurikulum ini terdapat 2 format kurikulum Pendidikan anti korupsi yang di dalam naskahnya disusun secara terpisah, yaitu pertama: struktur kurikulum yang terdiri dari Kurikulum Pembentukan karakter PNS dan Kurikulum Penguatan kompetensi teknis bidang tugas, dan kedua: kurikulum mata pelatihan orientasi penguatan bidang tugas
2. Model kurikulum Pendidikan antikorupsi yang penulis kembangkan melalui langkah-langkah penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) memuat di samping komponen-komponen seperti yang disebutkan pada poin 1 (satu) di atas, juga disempurnakan dengan landasan nilai-nilai religiusitas (agama Islam) dan nilai-nilai budaya melayu Riau. Penyempurnaan kurikulum Pendidikan antikorupsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada masukan pemikiran dari para expert, *forum Group Discussion (FGD)* dan persetujuan promotor serta co-promotor.

3. Kurikulum model pendidikan antikorupsi sudah dinyatakan efektif berdasarkan dari pendapat para expert. Adapun alasannya yaitu kurikulum tersebut sudah tersusun berdasarkan 5 (lima) komponen utama kurikulum yaitu, meliputi: (1) tujuan, (2) materi, (3) metode, (4) sarana/ media dan (5) evaluasi. memasukan materi nilai-nilai antikorupsi yang dilandasi secara kongkrit nilai religiusitas dan nilai-nilai budaya melayu Riau.
- b. Saran
 - a. Hasil penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) kurikulum Pendidikan antikorupsi ini direkomendasikan, dapat dijadikan bahan pengayaan dan penyempurnaan terhadap kurikulum yang digunakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau.
 - b. Hasil penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) kurikulum Pendidikan antikorupsi ini, direkomendasikan dapat menjadi bahan kajian dan penelitian lanjutan bagi peneliti lainnya dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya pada bidang tindak pidana korupsi.
 - c. Hasil penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) kurikulum Pendidikan antikorupsi ini, direkomendasikan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Lembaga

negara khususnya Lembaga Inspektorat yang terdapat pada setiap departemen atau kementerian serta inspektorat yang ada pada badan dan struktur pemerintah daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an Terjemahan (2015), Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Ahmad Tafsir. (2005) *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya
- Ahmad. 2009. *Pendidikan Islam Di Era Transformasi Global*. Semarang: Pustaka
- Al-Rasyidin dan Syamsul Nizar. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam : Pendekatan Histories, Teoritis, dan Praktis*, Ciputat : Ciputat Press,
- Arikunto, Suharsini. 1988. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asmani, Jamal Makmur. 2011. *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif dan Inovatif*. Jogjakarta: Diva Press.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti: Membangun Kembali Anak Bangsa*. Jakarta: Universitas Negeri Baharuddin
- Loppa. 1990. *Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Antonius, Atosökhi Gea (2011) *Enculturation Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Perilaku Budaya Individu*. Jurnal Humaniora, 02 (01). ISSN 2087-1236
- Arif F. Hadipranata : *Implementasi Pendidikan Karakter Kerja Keras Dan Kerja Sama* : Jurnal Pendidikan Karakter by Institute of Research and Community Service 2012
- Anwar Prabu Mangkunegara: *Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan*, Bandung: 2002.
- Arifin: 2015. *Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran Ppkn. Untuk Pencapaian* :Yogyakarta: Power Book.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku Terjemah Arba'in Nawawi, sumber dari [http:// www.geocities.com/](http://www.geocities.com/) bahan tarbiyyah dalam program pdf.

Burhan, Bungin. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Fitri Agus Zaenul. (2013). *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, Bandung: Alfabeta.

Frans Magnis Suseno: (<https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>) (*Buku LKS SMP*)(<http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html#ixzz4pcFstXWo>]

Idi, Abdullah. 2011. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Indratno, A. Ferry T. 2007. *Kurikulum yang mencerdaskan, Visi 2030, dan Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Kompas

Hamalik Oemar. (2013). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Rosdakarya.

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Hidayat, Ara dan Imam Marchali. 2010. *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Bandung: Bustaka Educa

Henry Simamora, 2012.. Edisi 1.. Buku 1, Alih Bahasa: Jimmy Sadeli dan Bayu. Prawira Hie, Salemba. Empat. Jakarta. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

[Http://zgml19a.multiply.com/reviews/item/5](http://zgml19a.multiply.com/reviews/item/5) (diakses tanggal 10 Januari 2014).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kesederhanaan>

John, D.McNeil. 2006. *Contemporary Curriculum in Thought And Action*. Hoboken: USA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kesuma, Dharma dkk. 2011. *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- KPK. 2010. *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*. Jakarta: KPK Press.
- Kartono kartini, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Lexy Moleong. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lias Hasibuan. (2010). *Kurikulum & Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Gaung Persada.
- Lickoma, T. 2003. *Eleven Principles of Effective Character Education*.
- Margono,S. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Megawangi, Ratna. 2001. *Mengapa Pendidikan Karakter ?* Jakarta: IHF.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MPR RI. 2010. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Muhaimin dkk. *Manajemen Pendidikan*, Prenada media group cet 2,
- Mathis Robert, Jackson John.. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : 2002.
- Mangkunegara: *Manajemen Suber Daya Manusia* : 2015 Jakarta.
- Media Informasi Kemenag *Ikhlas*, edisi Oktober 2011.
- Nugiyantoro, Burhan. (1980). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Sebuah Pengantar Teoritis Dan Pelaksanaan*, yogyakarta: BPFE,
- Nana Syaodih Sukmadinata ; *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Cetaan ke 12 (Bandung: PT.).2005.
- Nurcholish, Majid. 2008. *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Nurul. 2008. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pramono, U Tanthowi dkk. 2005. *Membasmi Kanker Korupsi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. Presiden dan DPR RI. 2005. *Kumpulan Perundang-undangan Anti KKN*: Pustaka
- Punaji, Stryasari, Metode Pendidikan dan pengembangan, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 194Widyatama.
- Print,M. 1993. *Curriculum Development*. New York: Harcourt Brace Jovanorich
- Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press
- Sa'ud, Udin Saefudin. 2008. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Soedjono D. 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung:Sinar baru.
- Subainati, Yasiin. 2004. *Seni Menanamkan Kejujuran Pada Anak*. Jakarta: Mustaqim
- Subakdi dkk. 2009. *Pendidikan Berbangsa, Berbudi Pekerti dan Antikorupsi*. Sragen: DIKNAS Kab.Sragen
- Suparno, Paul dkk. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti Surat Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius
- Susilo, Muhammad Joko. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Syafrudin, Amang. 2009. *Muslim Visioner: Hidup Dengan Al-Faatihah*. Jakarta: Gema Insani
- Syamsul, Anwar dkk. 2006. *Fikih Antikorupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP
- Syed Hussein Al Atas. 1987. *Korupsi, Sifat Sebab Dan Fungsi*. Terjemahan Nirwono, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syuaeb, Hadi. 2001. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu Taba,
- H. 1962. *Curriculum Development Theory And Practice*. New York: Harcont Drace and World.
- Soekidjo: *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarwono, Jonathan. 2009.
- Simamora: 1999 : *Sumber Daya Manusia*, Edisi ke-2, Jakarta: Salemba.
- Henry Simamora, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 1. Buku 1, Alih Bahasa: Jimmy Sadeli dan Bayu. Prawira Hie, Salemba. Empat. Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tafsir, Ahmad. 2002. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Tantowi
- Rizki Putra Tempo, English Edition. January 16-22, 2012
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet ke.9
- Rikyu: *Kesederhanaan & Kesuksesan Menciptakan hidup yang anda dambakan*, /Bruce Elkin/Pustaka Pelajar 1987.
- R. Wayne Mondy: *Manajemn Simber Daya Manusia*, Jakarta 2008
- Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat.
- Soleha,dkk, (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*, Alfa Beta, Bandung,
- Washington D.C: (2009). *Character Education Partnership Pendidikan Karakter: Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: IHF
- Wardhana, Yana. 2007. *Manajemen Pendidikan untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa*. Bandung: PT.Pribumi Mekar.
- Williams, Russell. 2001. *Kids Of Character Essay*. Passkey-Jefferson Center for Character Education.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Yamin, Moh. 2009. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan: Panduan Menciptakan Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Kurikulum yang Progresif dan Inspiratif*. Jogjakarta: Diva Press
- Yamin, Mohammad. 2009. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Jogjakarta: Diva Press
- Zohar & Marshall. 2000: *Connecting Wiht Spiritual Inteligence*. New York: Bloomsbury Publishing
- Zulkarnain. 2008. *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Manajemen Berorientasi Link and Match)*. Bengkulu: Pustaka Pelajar Zuriyah.
- Zuriyah, 2008 : *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif ,Perubahan*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Veithzal Rivai, 2004: “*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 101 Tahun 2000. Tentang. Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan. Pegawai Negeri ...
- Peraturan Pemerintah Tahun 2004: *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: *tentang Aparatur Sipil Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008: *tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999: *tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Undang-undang Nomor 23: *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016: *Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau*
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

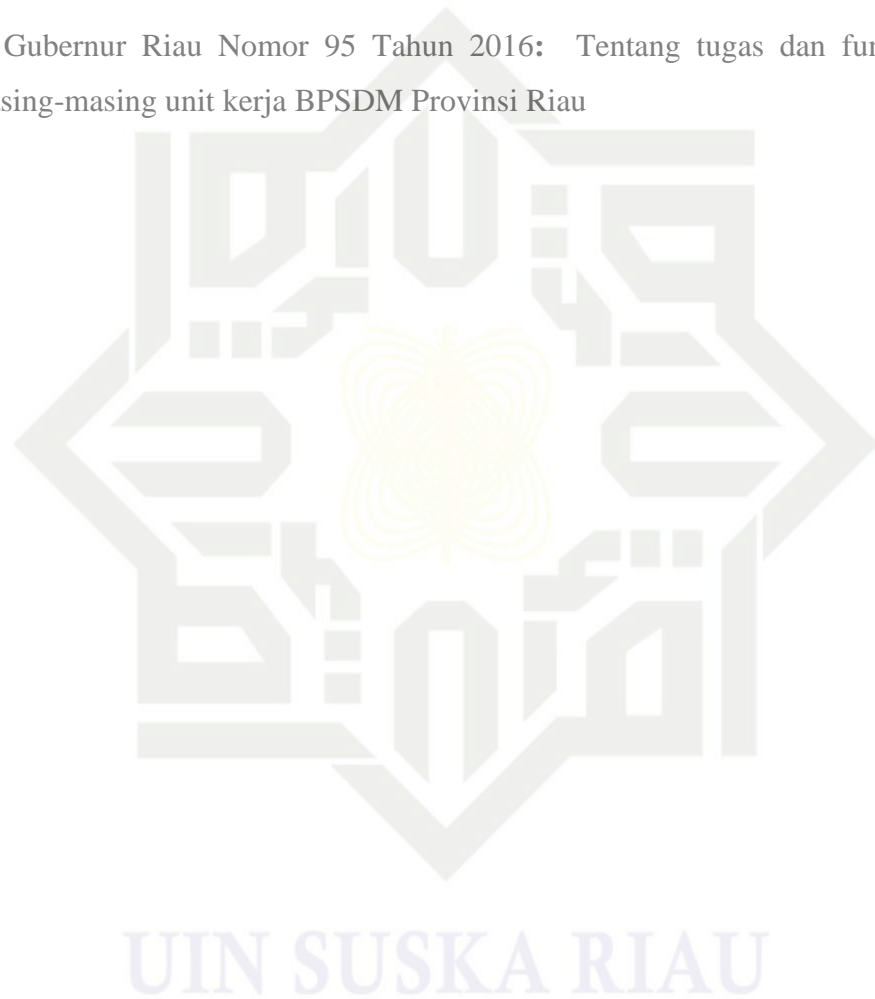
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 11 Tahun 2015: tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019*

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010: tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015*

Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun 2016: Tentang tugas dan fungsi masing-masing unit kerja BPSDM Provinsi Riau





DAFTAR JURNAL

Ade Imelda Frimayanti : *Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama Islam*; Jurnal Al-Tadzkiyyah: Pendidikan Agama Islam, tfolume 8, No12017.

Amat Budiman ; *Aktualisasi Nilai Aneka (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) Prespektif Islam*: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial,9 (SOCIUS) (1) April 2020.

Amat Budiman ; *Implementasi Mata Diklat Anti Korupsi Pada Peserta Diklat Laksar Calon Pegawai Negeri Sipil (Pns)*: Jurnal Karya Aparatur Tahun 2019, ISSN : 2614-106X.

Amat Budiman: *Meghulu Berbudaya Melayu, Menghilir Riau Berintegritas : Nilai Anti Korupsi Pada Mata Diklat Anti Korupsi BPSPDM Prov Riau*: Jurnal Pendidikan (PIGUR), ISSN: 2541-0946, Volume 01 Nomor 01 Maret 2018.

Amat Budiman; *Fitrah dan Potensi Manusia : Tujuan Pendidikan Daam Al-quran dan Pengembangan Pendidikan Islam*; Jurnal Pendidikan (PIGUR), ISSN: 2541-0946, Volume 01 Nomor 01 Maret 2017.

Amat Budiman; *Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Budaya Mekayu* : Jurnal Pendidikan Guru (PIGUR), ISSN: 2541 – 0946 Volume 01 Nomor 02. Nopember 2017.

Amat Budiman; *Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam*. Jurnal Pendidikan Guru (PIGUR), ISSN: 2541 – 0946 Volume 01 Nomor 01. Januari 2017.

Amat Budiman; *Penguatan Sikap Integritas Melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Tunjuk Ajar*: Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan; jta.ejournal.unri.ac.id.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dumilah Ayuningtyas; *Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang Dan Tantangan*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(10,93-107 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X, DOI:https://doi.org/10.32697/Integritas.v6i11.375@Komisi pemberantasan Korupsi .

Edi Subkhan : *Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis*: INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,6(1)15-30 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477- 118X,

Endang Prabandari: *Model Desain Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Masalah Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan*; Jurnal Manajerial, ISSN : 1412-6613, E-ISSN : 2527-4570 . a.

Faisal Kamal ; *Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Al-Quran*; Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8 No. 12017 P. ISSN : 20869118, E-ISSN 2528-247. 83.

Ginanjari Hambali: *Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran* : INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,6(1)15-30 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X,

Jamila Lestyowati : *Metode Storytelling: Peningkatkan Motivasi Perilaku Antikorupsi*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,6(1),125-139 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X, DOI:https://doi.org/10.32697/Integritas.v6i11.375@Komisi Pemberantasan Korupsi .

Kasinyo Harto: *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama*, Kasinyo Harto. Jurnal Raden Fatah , Volume 20 No 1. 2014.

Lukman Hakim : *Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam*; Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 10No 2 – 2012.

Maria Montessori *Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah*, Jurnal Wacana : Edisi 14 Tahun 2002.

Natal Kristiono: *Penanaman Nilai Anti Korupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Mata Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi* : Jurnal Ilmiah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Volume 9 Nomor 1 Desember 2018, ISSN: 208-9385(print) dan 2528-696X (online).

Praise Junta W.S Siregar, Nikki Tirta: *Implementasi Stimulan Reward Punishment Pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi* : INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,6(1)153-168 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X,

Rosida Tiurma Manurung: *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*: , Jurnal Sosateknologi Edisi 27 Tahun 11.

Sumaryati, Siti Murtiningsih,Septiana Dwi Putri Maharani: *Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Esensialisme* : INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,6(1)1-14 e-ISSN/p-ISSN:2615-7977/2477-118X, DOI:<https://doi.org/10.32697/Integritas.v6i1.375>@Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sumiarti; *Pendidikan Anti-Korupsi*, Jurnal Pemikiran Alternatif, INSANIA , Vol 12 No 2. Mei – Agustus 2017, 189.

Urwatul Wutsgah: *Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia*;; Jurnal Inovasi Pendidikan MH.Thamrin, Volume 3 nomor 2, Oktober 2019.

Widi Asih Nurhajati, Bachtiar Sjaiful Bachri : *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Berbasis Kompetensi Dalam Membangun Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS)* ; Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktek) Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017 e-ISSN 2527-6891.

Yusrianto Kadir : *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*; Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 1 – No 1 April 2018 P-ISSN: 2614 -5030, E-ISSN : 2416 -5022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقيّة اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلاميّة الحوكمية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Amat Budiman
ID Number : 31694104637
Date of Birth : August 17, 1967
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension	: 52
Structure & Written Expressions	: 53
Reading Comprehension	: 46
Overall Score	: 503

Expire Date : April 23, 2019

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



The Head of Language Development Center

Dr. H. Mulyo Hasbiyuan, M. Ed. TESOL

NIP. 19651028197031001



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

English Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Language Development Center
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Amat Budiman

Nomor ID : 31694104637

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Lahir : 17 Agustus 1967

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

50: الاستماع

54: القِرَاعَةُ

60 : ५५

547: النتيجة

Berlaku Hingga : 05 Mei 2019



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development of Syarif Ibrahim bin Ibrahim of Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

b. Penelitian tidak meruakikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed-TESOL

an kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Ronggowarsito No. 14 Telp. (0761) 28997 Fax (0761) 28997
PEKANBARU

Kode Pos : 28131

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 870/BPSDM/1.3/484

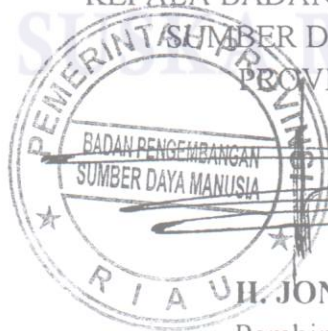
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, dengan ini menerangkan :

Nama : Amat Budiman
Nim : 31694104637
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Giam IX No 10 / 20 Perumahan Pandau Permai

Telah melaksanakan penelitian untuk bahan Disertasi yang berjudul
"Pengembangan Model Kurikulum Anti Korupsi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia" Provinsi Riau, dari tanggal 05 Maret s/d 01 September 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI RIAU,



H. JONI IRWAN

Pembina Utama Madya
NIP. 19630629 198910 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CURRICULUM VITAE (CV)

I. DATA PRIBADI

Nama : Drs. H. Amat Budiman, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Bengkalis 17 Agustus 1967
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pemda Riau
Nip Lama /Baru : 420008988 / 19670817 198903 1 008
TMT CPNS/PNS 100% : 1 Maret 1989 / 01 -03 -1990
JFT Awal TMT : Fungsional Ahli Madya / 11 Mei 2019
Jabatan /TMT : Fungsional Widyaiswara Ahli Madya/ 1 Okt 2017
Dupak Awal LAN : 359,87 (RekLan No.2123/K.1/PWI.2.11) 11-6-2013:
No/ Taspen : 420008988/01 Maret 2089
Dupak Awal Mei 2020 : 977,720(No.826/BPSDM/1508, Tgl 20 Juli 2020.
NWNI : 19670817 20151027149
No. Kartu IWI : 01416 KTA – IWI / 2016
Unit Kerja/Instansi : BPSDM Prov. Riau
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I IV – b – 1 Oktober 2019
No. Karpeg : E. 683272
No WP : 09.717.478.3-216.000
No. Peserta Askes : 0000021583438
No KPE : 6274 9210 0011 4549 Diter. di Jakarta 24 Nof 2010
No. KOPRI : 42-04-10-627418
No Kartu Istri PNS : 085181 HH
No Kartu Suami PNS : 267525 D
No. Kartu Keluarga : 1401060508110004



No. KTP : 14011061708670010 (Seumur Hidup)
 No. Kutipan Surat Nikah : 57/20/T-11/PW01/93-22 Syakban 1413 H /13 Feb 1993
 Alamat Kantor : Jl. Ronggowarsito, 14 Pekanbaru
 Alamat Rumah : Jl. Giam IX No. 10/20 Perum Pandau Jaya Kab. Kampar
 - Hp. 082397284895
 - Email : amatbudi707@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :

	Nama Sekolah	Jurusan	Tempat	Tgl ijazah Thn	Keterangan/No ijazah
S2	Pasca Sarjana Strata 2 UNRI	Monajmen Pemerintah Daerah	Pekanbaru	4 Nof 2006	Ijazah No. 0113/10/S2/2016
Univ	UNILAK	ADM Neg	Pekanbaru	15 Juni -1992	Ijazah No. 01046/S.1/UNILAK/F/A /1992
SMA	Handayani	IPA	Pekanbar	24 April 1986	Ijazah 09.OC.oh. 0014184
SMP	Negri 5 Pekanbaru	-	Pekanbaru	25 Mei 1983	Ijazah 09.OC.oh 0053660
SD	Negeri	-	Tanah Putih	20 Mei 1980	Ijazah Mei 1980 IV Aa. 08813

II. PENDIKAN DI DALAM JABATAN FUNGSIONAL 2013 s/d SEKARANG

No.	Jenis Kursus / Training	Tempat/Tgl	No	Kete
1.	Diklat Calon Widyaiswara	16 Ok s.d 19 Nov 2012 Pekanbaru	0461/D/PDP.09.7	STTPP
2.	TOF Kepemimpinan angkatan II untuk es III dan IV	22 s.d 28 April 2014 Pejompongian Jkt	0003969/DIKLATTEK NIS /086/3171/LAN/2014	STTPP
3.	TOF Pendidikan Peltihan Prajab Pola Baru	2 s.d 6 Des 2014 Lampung	-	STTPP
4	Diklat Teknis Pemantapan Diagnostic Reading	20-1-2015	00000210/DIKLAT TEKNIS /14/1400/LAN/2014	
5	Penddikan dan Pelatihan Kewidyaisuaraan Berjenjang	16 s.d 28 Feb 2015 Pusdiklat MA Megamedung	00001425/DIKLAT TEKNIS/005/3201/LA N/2015	STTPP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	7	Diklat Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	20 s.d 25 April 2015 Pekanbaru	00004011/DIKLAT TEKNIS/14/1400/LAN/ 2015	STTPP
	8	Pelatihan Pengelolaan Jurnal Ilmiah dan Penulisan KTI tahun 2015	18 -19 Ags 2015	-	sertifikat
	9	TOT Nilai-nilai Kebangsaan Lemhanas dan Out Bond	19 agus s.d 28 ags 2015	001/VIII/2015	Sertifikat
	10	TOT Sadar Wisata	1-3 Maret 2016 Peknbaru	05/TOT-RI/III/2016	Sertifikat
	11	TOF Sistem Perlindungan Anak UNICEF	16-20 Mei 2016 Jakarta	-	Setifikat
	12	Training For Training	20 – 21 Des 2016 Jakarta	-	Setifikat
	13	TOF Pelatihan Penerapan Kebijakan Pelatihan Dasar Calon PNS	27 Feb – 3 Maret 2017 LAN Samarinda		STTPP
	14	TOT Implementasi Bahan Ajar Kasus Pada diklat ASN	10-14 April 2017		STTPP
	15	Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah.	4 – 6 September 2017 Hotel Central Pekanbaru		STTPP
	16	Wokshoop Integritas	4-7 September 2017 Hotel Primer Pekanbaru		
	16	Diklat Aparatur Pelopor Revolusi Mental Bagi Jabatan Pengawas	29 Ok – 03 Nof 2018 BPSDM Depdagri		STTPP
	17	TOT PKA dan PKP Depdagri	3-8 Desember 2019		STTPP
	18	Diklat Penjenjangan Tinggi	16 Januari- 7- Februari 2020		STTPP
	19	Workshop Pelatihan Kepemimpinan PKA dan PKP di BPSDM Prov Riau	9-26 Maret 2020		STTPP
	20	Pelatihan E-Trayner Metode Pembelajaran Secara Online	16-19 Desember 2020		Sertifikat
	21	Lulus Ujian Kompetensi Penjenjangan Tigkat Tinggi (Utama	20 Januari 2021	0033/D.3/PDP,07.3	Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



IV. SPESIALISASI DALAM JABATAN

1. LPJ Pola Baru AntiKorupsi
2. Diklat Kepemimpinan III DAN IV Diagnostig Reading
3. Diklat Teknis
 1. Sapta Pesona
 2. Sistem Perlindungan Anak
 3. Out Bond
 4. Dinamika Kelompok

V. PENULISAN KARYA ILMIAH

1. Jurnal Pigur Judul **Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam** ISSN : 2541-0946 Vol 02 Nomor 01 Januari 2017
2. Jurnal Pigur Judul : **Kurikulum Anti Korupsi Perspektif Budaya Melayu** .ISSN : 2541-0946 Vol 03 Nomor 01 Januari 2017
3. Jurnal Pigur Judul : **Fitrah Dan Potensi Manusia: Tujuan Pendidikan Dalam Al-quran Dan Pengembangan Pendidikan Islam** ISSN No 2441-0946 Vol 03 Nomor 01 April 2017
4. Jurnal Pigur Judul **Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Budaya Melayu** ISSN No 2441-0946 Vol 01 Nomor 02 Nopember 2017
5. Jurnal Pigur Judul **Menghulu Berbudaya Melayu, Menghilir Riau Berintegritas: Nilai Anti Korupsi Pada Mata Diklat AntiKorupsi BPSDM Provinsi Riau** ISSN No 2441-0946 Vol 01 Nomor 02 Nopember 2018.
6. Jurnal Karya Aparatur Pemerintah Prov Riau Volumen 3 Nomor 2 Judul : **Implementasi Mata Diklat Anti Korupsi Pada Peserta Diklat Laksar CPNS**, ISSN 2614-106X
7. Jurnal No. 7 Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan SOCIUS Judul : **Aktualisasi Nilai-Nilai Aneka (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) Dalam Perspektif Islam**, P-ISSN 2089-9661, E-ISSN: 2089-967X
8. Jurnal Tunjuk ajar :**Penguatan Sikap Integritas Melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil** Jurnal Tunjuk Ajar Volume 3, Nomor 2, Agustus 2020 P-ISSN:2615-062X, Alamat Web <http://ejurnal.unri.ac.id/index.php/JTA/>

VI. ANGKA KREDIT

No	U R A I A N/ JABATAN	Jumlah/Priode Perhitungan	Ket .
1	Angka Kredit Pengangkatan Awal Widyaiswara Ahli Muda	359,87 Mulai PNS	Rekom Lan No. 2123/K.1/PWI.2.11 Tgl. 11-6-2013:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2	Angka Kredit Ditanda Tangan Sekda Widyaiswara Ahli Muda	635,690 Juni 2013- Desember 2016	Sekda No. 800/BKD/3.3/2017/68 Tanggal 15 Januari 2017
3	Angka Kredit Ditanda Tangan Sekda Widyaiswara Ahli Madya	747,00 Januari - Des 2017	Sekda No. 826/BPSDM/47.21 Tanggal 11 April 2018
4	Angka Kredit Ditanda Tangan Sekda Widyaiswara Ahli Madya	910.840 Januari - Okt 2018	Sekda No. 826/BPSDM/12.23 Tanggal 5 Nopember 2018
5	Angka Kredit Ditanda Tangan Sekda Widyaiswara Ahli Madya	952.720 Nopember 2018- Mei 2019	Sekda No. 826/BPSDM/12.12 Tanggal 11 Mei 2019
6	Angka Kredit Ditanda Tangan Sekda Widyaiswara Ahli Madya	977,720 Mei 2020	Juni 2019 s.d Mei 2020

Pekanbaru, Januari 2021

Drs. H. Amat Budiman, M.Si
Jabatan Widyaiswara Ahli Madya

CURICULUM VITAE
SAMPAI DENGAN Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DRS.H. AMAT BUDIMAN, MSI

NIP : 19671708 198903 1 008

Widyaiswara Ahli Madya

UIN SUSKA RIAU

**BADAN PENGEMBANGAN SUBER DAYA
MANUSIA PROV RIAU
TAHUN 2019**